

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4.1 Maksud	6
1.4.2 Tujuan	7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	8
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	19
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	141
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018	144
2.3 Permasalahan Pembangunan	145
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	245
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	247
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019.....	2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020.....	9

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
3.2.1 Proyeksi/Target Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	11
3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah.....	13
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	5
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	1
6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	1
6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2
BAB VII PENUTUP.....	1

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018	5
TABEL 2.2 JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KECAMATAN DI KABUPATEN KEDIRI PADA TAHUN 2018.....	7
TABEL 2.3 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PDRB KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010	10
TABEL 2.4 DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010.....	11
TABEL 2.5 PERKEMBANGAN KELOMPOK KESENIAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018.....	18
TABEL 2.6 JUMLAH FASILITAS PENDUKUNG OLAHRAGA TAHUN 2016 - 2018 .	19
TABEL 2.7 PERKEMBANGAN KEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN TAHUN 2016 - 2018.....	20
TABEL 2.8 CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA KUALITAS KELUARAN PENDIDIKAN TAHUN 2016 - 2018	21
TABEL 2.9 CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN TAHUN 2016 - 2018	23
TABEL 2.10 PERKEMBANGAN KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK TAHUN 2016 - 2018.....	25
TABEL 2.11 KINERJA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN 2016 - 2018	26
TABEL 2.12 CAPAIAN PENEMUAN PENYAKIT MENULAR DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2016 - 2018.....	29
TABEL 2.13 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TAHUN 2016 - 2018	31
TABEL 2.14 PERKEMBANGAN MORTALITAS TAHUN 2016 - 2018.....	32
TABEL 2.15 PERKEMBANGAN MORBIDITAS TAHUN 2016 - 2018	32
TABEL 2.16 PERKEMBANGAN STATUS GIZI TAHUN 2016 - 2018	35
TABEL 2.17 CAPAIAN MENINGKATNYA PENYEDIAAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2016 - 2018	35
TABEL 2.18 JUMLAH TENAGA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2016 - 2018 ..	36
TABEL 2.19 PERKEMBANGAN SARANA PRASARANA KESEHATAN TAHUN 2016 - 2018	36
TABEL 2.20 KINERJA PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2016 - 2018	37

TABEL 2.21 KINERJA MENINGKATNYA PERILAKU HIDUP SEHAT TAHUN 2016 - 2018	38
TABEL 2.22 KINERJA PELAYANAN RSUD TAHUN 2016 - 2018	40
TABEL 2.23 CAPAIAN SARANA INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN 2016 - 2018.....	41
TABEL 2.24 PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2016 - 2018.....	42
TABEL 2.25 KINERJA PELAYANAN IRIGASI DAN PENANGGULANGAN BANJIR TAHUN 2016 - 2018.....	43
TABEL 2.26 PERKEMBANGAN BANGUNAN IRIGASI DAN AREAL SAWAH TAHUN 2016 - 2018.....	44
TABEL 2.27 PANJANG SALURAN IRIGASI TAHUN 2016 - 2018.....	46
TABEL 2.28 CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2016 - 2018	48
TABEL 2.29 JUMLAH PELANGGARAN MENURUT JENIS PERATURAN DAERAH TAHUN 2016 - 2018	49
TABEL 2.30 CAPAIAN KINERJA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA/PERBUP TAHUN 2018	50
TABEL 2.31 CAPAIAN KUALITAS PENANGANAN KEBAKARAN TAHUN 2016 - 2018.....	51
TABEL 2.32 CAPAIAN KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN SOSIAL TAHUN 2016 - 2018.....	52
TABEL 2.33 PERKEMBANGAN PMKS TAHUN 2016 - 2018.....	53
TABEL 2.34 PERKEMBANGAN PANTI SOSIAL DAN PENGHUNI TAHUN 2016 - 2018.....	54
TABEL 2.35 DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) TAHUN 2016 - 2018.....	55
TABEL 2.36 CAPAIAN MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA DAN KESEMPATAN KERJA TAHUN 2016 - 2018.....	56
TABEL 2.37 PERKEMBANGAN DATA KETENAGAKERJAAN TAHUN 2016 - 2018.....	57
TABEL 2.38 PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TAHUN 2018	58
TABEL 2.39 CAPAIAN MENINGKATNYA PARTISIPASI PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016 - 2018.....	60
TABEL 2.40 CAPAIAN INDIKATOR PANGAN DAERAH TAHUN 2018.....	63
TABEL 2.41 CAPAIAN KINERJA KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016 - 2018.....	63

TABEL 2.43 KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN SETARA BERAS TAHUN 2016 - 2018.....	65
TABEL 2.44 PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN TAHUN 2016 - 2018.....	67
TABEL 2.45 POPULASI HEWAN TERNAK TAHUN 2016 - 2018	67
TABEL 2.47 CAPAIAN INDIKATOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 - 2018	70
TABEL 2.48 PERKEMBANGAN KUALITAS LINGKUNGAN TAHUN 2016 - 2018	71
TABEL 2.49 PERKEMBANGAN PENANGANAN PERSAMPAHAN TAHUN 2016 - 2018.....	71
TABEL 2.50 PERSENTASE CAPAIAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TAHUN 2016 - 2018.....	73
TABEL 2.51 PERKEMBANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN 2016 - 2018.....	74
TABEL 2.52 KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN DAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2016 - 2018.....	75
TABEL 2.53 PELAKSANAAN PROGRAM PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU TAHUN 2016 - 2018	79
TABEL 2.54 PROGRAM JALINMATRA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018.....	79
TABEL 2.56 CAPAIAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016 - 2018.....	80
TABEL 2.57 PERKEMBANGAN PESERTA KB DAN PUS TAHUN 2016 - 2018.....	82
TABEL 2.58 JUMLAH KADER PPKB TAHUN 2016 - 2018	82
TABEL 2.59 KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI TAHUN 2016 - 2018	83
TABEL 2.60 PERKEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 2016 - 2018	84
TABEL 2.61 PERKEMBANGAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA UJI KENDARAAN TAHUN 2016 - 2018.....	85
TABEL 2.62 JUMLAH KENDARAAN LULUS WAJIB UJI TAHUN 2016 - 2018	85
TABEL 2.63 PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016 - 2018	86
TABEL 2.64 PERKEMBANGAN MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016 - 2018.....	87
TABEL 2.65 CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2018	88
TABEL 2.66 CAPAIAN KINERJA PERKOPERASIAN DAN UMKM TAHUN 2016 - 2018.....	88

TABEL 2.67 PERKEMBANGAN KUD DAN NON KUD TAHUN 2016 - 2018.....	89
TABEL 2.67 PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL/INVESTASI TAHUN 2016 - 2018	91
TABEL 2.68 PERKEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN TAHUN 2016 - 2018....	91
TABEL 2.69 TARGET DAN REALISASI PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2016 - 2018	94
TABEL 2.70 PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2016 - 2018	95
TABEL 2.71 PERKEMBANGAN FASILITAS DAN KEGIATAN OLAH RAGA TAHUN 2016 - 2018.....	95
TABEL 2.72 PERKEMBANGAN SENI DAN KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN 2016 - 2018	98
TABEL 2.73 PERKEMBANGAN KEGIATAN SENI BUDAYA TAHUN 2016 - 2018...	99
TABEL 2.74 PERKEMBANGAN KELOMPOK KESENIAN TAHUN 2016 - 2018....	102
TABEL 2.75 KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2016 - 2018	104
TABEL 2.76 PERKEMBANGAN KINERJA KEARSIPAN TAHUN 2016 - 2018.....	104
TABEL 2.77 PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN DAN TINGKAT KONSUMSI IKAN TAHUN 2016 - 2018	106
TABEL 2.78 KINERJA PARIWISATA TAHUN 2016 - 2018.....	107
TABEL 2.91 RINCIAN KINERJA PENINGKATAN PERAN DPRD TAHUN 2016 - 2018.....	127
TABEL 2.107 PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2016 - 2018.....	142
TABEL 2.108 PERKEMBANGAN 11 KASUS KRIMINAL TERTINGGI TAHUN 2016 - 2018	143
TABEL 2.109 ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018.	144
TABEL 2.110 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN KINERJA TAHUN 2018 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2019 KABUPATEN KEDIRI	145
TABEL 2.111 HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2020.....	247
TABEL 2.112 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020.....	247
TABEL 3.1 KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018 DAN TARGET TAHUN 2019	3
TABEL 3.2 KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018 DAN TARGET TAHUN 2019	5

TABEL 3.3 PDRB PER KAPITA KABUPATEN KEDIRI ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2016 - 2018.....	7
TABEL 3.4 PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018 SERTA TARGET TAHUN 2019.....	8
TABEL 3.5 PENANAMAN MODAL/INVESTASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018	9
TABEL 3.6 REALISASI TAHUN 2017 – 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 - 2021	12
TABEL 3.7 PERKEMBANGAN PAD DAN PROPORSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI 2020 - 2021	16
TABEL 3.8 STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020 - 2021	17
TABEL 3.9 KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PAD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 – 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2020 - 2021	17
TABEL 3.10 DANA PERIMBANGAN DAN PROPORSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020 - 2021	18
TABEL 3.11 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAN PROPORSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2020-2021	19
TABEL 3.12 STRUKTUR BELANJA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020 - 2021	26
TABEL 3.13 REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 – 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020 - 2021	28
TABEL 3.14 PROPORSI BELANJA PEGAWAI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI 2020 - 2021	29
TABEL 3.15 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020 - 2021 DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI	32
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI.....	2
TABEL 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020	10
TABEL 4.3 PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PRIORITAS 1..	11

TABEL 4.4 PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PRIORITAS 2..	17
TABEL 4.5 PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PRIORITAS 3..	19
TABEL 4.6 PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PRIORITAS 4..	22
TABEL 6.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018 DAN TARGET 2019 - 2020	1
TABEL 6.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	3

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018	6
GRAFIK 2.2 PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018.....	8
GRAFIK 2.3 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2016 - 2018.....	9
GRAFIK 2.4 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PER KAPITA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018.....	12
GRAFIK 2.5 INFLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018.....	13
GRAFIK 2.6 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018.....	13
GRAFIK 2.7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018.....	14
GRAFIK 2.8 ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018	15
GRAFIK 2.9 PERKEMBANGAN DIMENSI PENGETAHUAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018.....	16
GRAFIK 2.12 PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN TAHUN 2016 - 2018	69
GRAFIK 2.13 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2016 - 2018	78
GRAFIK 3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018 DAN TARGET TAHUN 2019.....	8

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Kediri merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kediri, yang memuat kegiatan dan program prioritas pembangunan. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Pemerintah Kabupaten Kediri yang memuat program/kegiatan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah.

RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahun ke-4 (empat) dari RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat (1), dengan tahapan penyusunannya sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;

- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas - bawah dan bawah - atas. Teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Partisipatif yaitu peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas - bawah dan bawah - atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga nasional. Substansi RKPD Kabupaten Kediri tahun 2020 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020, berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 disusun selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, RKP Tahun 2020, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta mengacu sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan nasional. Dalam penyusunannya juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010 - 2030, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah, landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional tersebut menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

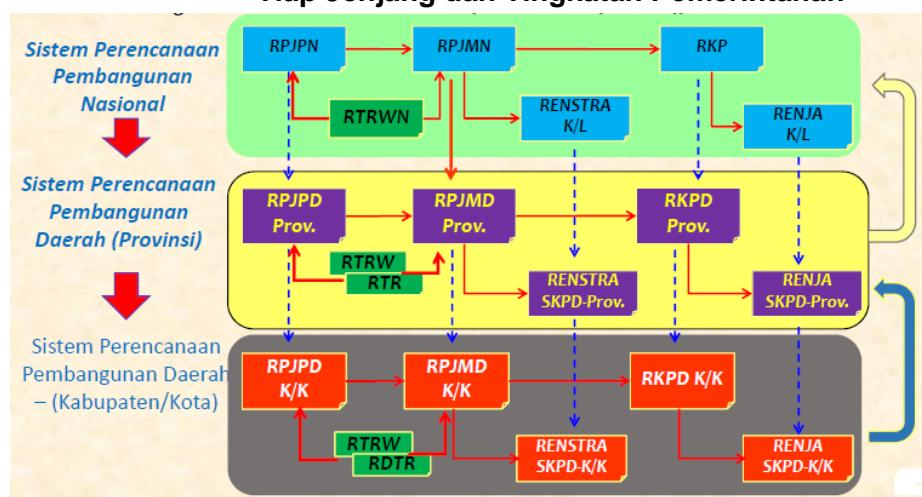
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hubungan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat, yaitu penyusunan

rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L. Sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, karena RKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan memfokuskan pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus disertai indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan pada tiap jenjang dan tingkatan pemerintahan, serta keserasian antar dokumen perencanaan pembangunan adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan
Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk :

- Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2016 - 2021 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu-isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020;
- Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan daerah;
- d. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan pembangunan;
- e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi kerangka operasional dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kediri yang akan dilaksanakan pada tahun 2020;
- b. Memantapkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memperhatikan efisiensi alokasi sumber daya dan kemampuan keuangan daerah, mengembangkan dan memantapkan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Kediri Tahun 2020;
- c. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020; serta
- e. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2020.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RKPD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum tentang kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan sasaran eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Tujuan dan sasaran pembangunan menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. Sasaran dan Prioritas pembangunan pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang disinkronkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kabupaten Kediri.

Lampiran I Program, Kegiatan, dan Pagu Indikatif tiap Perangkat Daerah

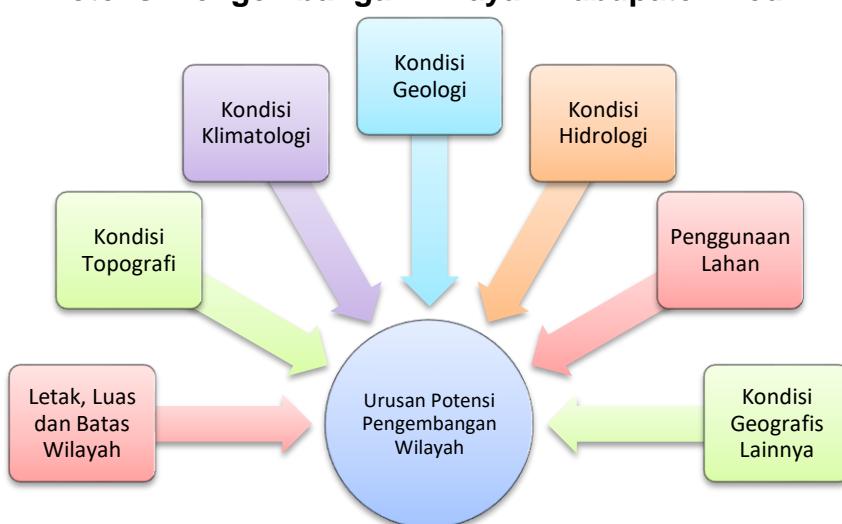
II**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH****2.1 Kondisi Umum Daerah**

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Analisis pada aspek geografi Kabupaten Kediri perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Berikut kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan budidaya

**Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Kediri**



Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Kediri dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

a. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Kediri terletak pada posisi $111^{\circ} 47' 05''$ s/d $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ s/d $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 1.386,05 Km² atau 138.605 Ha. Sedangkan secara administratif Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 343 desa dan 1 kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Kediri memiliki topografi wilayah yang cukup beragam dengan rata-rata ketinggian tanah diantara 0 - 500 meter diatas permukaan laut (dpl). Wilayah bagian utara-selatan Kabupaten Kediri merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 200 meter dpl, sementara pada wilayah bagian barat-timur merupakan wilayah perbukitan dan bergelombang.

Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- ❖ Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
- ❖ Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.
- ❖ Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Secara hidrologi, di wilayah Kabupaten Kediri mengalir banyak sungai ataupun saluran alam, sungai yang memiliki debit air yang cukup besar dan mengalir sepanjang tahun meliputi Kali Brantas, Kali Konto, Kali Bakung, Kali Kolokoso, Saluran Turitunggorono, Kali Bangi dan Kali Sedayu. Sementara sungai-sungai lainnya umumnya berupa sungai musiman yang hanya mengalir pada musim penghujan. Potensi air tanah sungai-sungai ini sebelum sampai ke Sungai Brantas telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pengairan sawah/irigasi.

Kondisi iklim pada wilayah Kabupaten Kediri pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu secara umum beriklim tropis dengan dua musim. Kondisi iklim rata-rata Kabupaten Kediri, yaitu:

- a. Pada musim kemarau suhu maksimum rata-rata $30,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum rata-rata $23,8^{\circ}\text{C}$, sedangkan pada musim penghujan suhu rata-rata sebesar $27,2^{\circ}\text{C}$.
- b. Kelembaban udara rata-rata 85,5% per tahun, sementara kelembaban nisbi (relatif) antara 74-86%.
- c. Kecepatan angin rata-rata pada musim kemarau antara 12-13 knots dan pada musim penghujan rata-rata kecepatan angin sebesar 17-20 knots.
- d. Musim kemarau berlangsung selama 6-7 bulan yaitu sekitar bulan Mei-Nopember, sementara musim penghujan berlangsung selama 4-5 bulan yaitu pada bulan Desember-April setiap tahunnya.

Curah hujan rata-rata pertahunnya sebesar 130-150 mm, dengan jumlah hari hujan rata-rata selama 6-15 hari per bulan.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 - 2030 untuk mewujudkan daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pembagian pusat kegiatan di Kabupaten Kediri secara hirarkis meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan, terletak di perkotaan Ngasem dan Pare;
- 2) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berorientasi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam

wilayah kabupaten, terletak di perkotaan Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen, dan Grogol;

- 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan yang meliputi Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo, Ngancar, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas, Kunjang, Purwoasri, dan Plemahan; dan
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan meliputi Kecamatan Grogol, Tarokan, Banyakan, Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, Wates, Ngancar, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Papar, Kunjang, Purwoasri, Plemahan, dan Semen.

Sedangkan kawasan strategis ditentukan berdasarkan kepentingan:

- 1) Kawasan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas kawasan pengembangan agropolitan dan kawasan pengembangan perdagangan, jasa, rekreasi meliputi:
 - a) Kawasan agropolitan Ngawasondat, meliputi Kecamatan Ngancar, Wates, Plosoklaten, Kandat, dan Ringinrejo sebagai pusat pengembangan kawasan di Kecamatan Wates, dengan komoditas unggulan berupa nanas, pepaya, dan sapi perah;
 - b) Kawasan agropolitan Pakancupung, meliputi Kecamatan Pare, Kandangan, Puncu, dan Kepung, berpusat di perkotaan Pare, dengan komoditas unggulan berupa cabai, bawang merah dan sayuran;
 - c) Kawasan agropolitan Segobatam, berada di Kecamatan Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Mojo, berpusat di perkotaan Banyakan, dengan komoditas unggulan berupa mangga podang dan ubi kayu;
 - d) Kawasan agropolitan Papar, Plemahan, Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Kunjang dan Gampengrejo dengan komoditas unggulan berupa padi dan palawija;
 - e) Kawasan perdagangan, jasa dan rekreasi berupa pengembangan *Central Business District (CBD)* Simpang Lima Gumul.
- 2) Sosial dan budaya meliputi penanganan dan melestarikan peninggalan sejarah Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerot, Pesanggrahan Jendral Sudirman, dan Situs Tondowongso; dan

- 3) Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan rawan bencana letusan gunung berapi dan rawan banjir yang meliputi:
- Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, berada di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis.
 - Kawasan rawan banjir, berada di Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri, yang rawan tergenang luapan Sungai Brantas dan Sungai Konto.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Kediri terdiri atas kawasan rawan longsor dan rawan banjir, dengan rincian sebagai berikut:

- Kawasan rawan longsor, berada di Kecamatan Grogol, Semen, Mojo, Puncu, Plosoklaten, Wates dan Ngancar.
- Kawasan rawan banjir, berada di Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri.

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015, sehingga diharapkan dapat mencegah dan menangani bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kediri.

d. Aspek Demografi

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Kediri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.649,426 jiwa, terdiri dari laki-laki 832.439 jiwa (50,47%) dan perempuan 816.987 jiwa (49,53%). Hal tersebut berarti sex ratio Kabupaten Kediri tahun 2018 adalah sebesar 101,89%. Perkembangan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

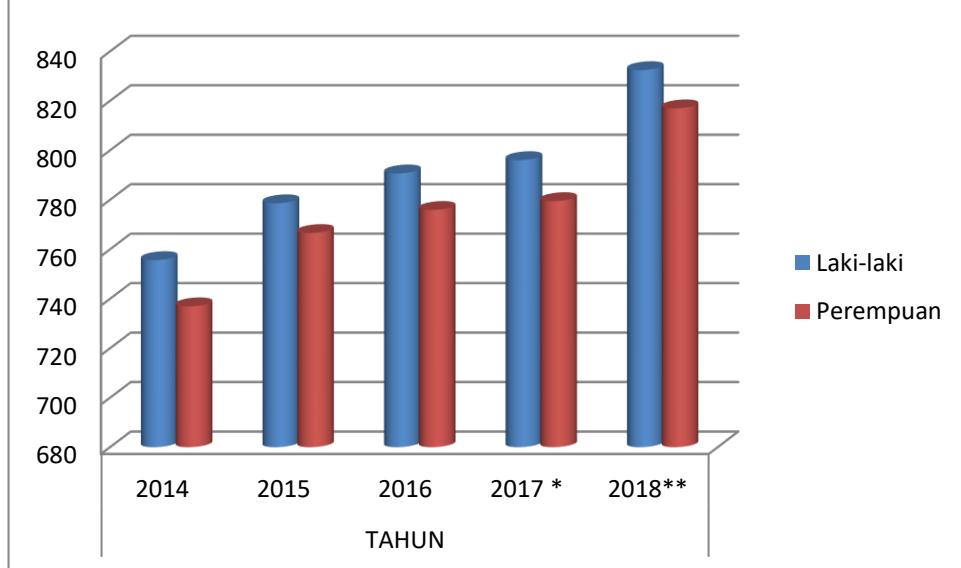
TABEL 2.1
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 - 2018
(Orang)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017 *	2018**
1.	Laki-laki	755.628	778.616	790.679	796.057	832.439
2.	Perempuan	736.957	766.593	775.919	779.479	816.987
	Jumlah	1.492.585	1.545.209	1.566.598	1.575.536	1.649.426
	<i>Sex ratio (%)</i>	102,53	101,57	101,90	102,13	101,89

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

*) Angka Diperbaiki **)Angka Sementara

GRAFIK 2.1
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 - 2018
(Orang)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

*) Angka Diperbaiki **)Angka Sementara

Kepadatan penduduk Kabupaten Kediri dihitung dengan menggunakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kabupaten Kediri memiliki wilayah seluas 138.605 Ha atau 1.386,05 Km², sehingga rata-rata kepadatan penduduknya adalah 1.190,02 jiwa/km² pada tahun 2018. Ditinjau dari kepadatan penduduk per kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Banyakan yaitu sebesar 3.523,87 jiwa/km² dan Kecamatan Ringinrejo sebesar 2.641,64 jiwa/km², sedangkan jumlah kepadatan penduduk terkecil yang tercatat berada di Kecamatan Gampengrejo dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 323,12 jiwa/km². Jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.2
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KECAMATAN
DI KABUPATEN KEDIRI PADA TAHUN 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (org/Km ²)
		(Km ²)	(orang)	(orang)	(orang)	
1	Semen	102,73	26.938	26.118	53.056	516,46
2	Mojo	80,42	39.875	38.238	78.113	971,31
3	Kras	41,85	32.198	32.152	64.350	1.537,63
4	Ngadiluwih	44,81	40.153	39.939	80.092	1.787,37
5	Kandat	42,38	31.695	31.512	63.207	1.491,43
6	Wates	51,96	46.693	46.080	92.773	1.785,47
7	Ngancar	76,58	25.397	24.829	50.226	655,86
8	Puncu	94,05	32.398	31.457	63.855	678,95
9	Plosoklaten	88,59	37.891	37.018	74.909	845,57
10	Gurah	50,83	42.235	41.743	83.978	1.652,13
11	Pagu	68,25	20.395	20.216	40.611	595,03
12	Gampengrejo	105,65	17.279	16.859	34.138	323,12
13	Grogol	41,67	24.410	23.679	48.089	1.154,04
14	Papar	47,21	27.465	27.316	54.781	1.160,37
15	Purwoasri	39,21	31.381	31.549	62.930	1.604,95
16	Plemahan	29,98	31.135	30.837	61.972	2.067,11
17	Pare	47,88	53.091	52.679	105.770	2.209,06
18	Kepung	42,50	43.459	41.736	85.195	2.004,59
19	Kandangan	36,22	26.406	25.815	52.221	1.441,77
20	Tarokan	24,86	32.240	30.910	63.150	2.540,23
21	Kunjang	35,58	19.321	19.129	38.450	1.080,66
22	Banyakan	16,76	29.930	29.130	59.060	3.523,87
23	Ringinrejo	21,83	29.282	28.385	57.667	2.641,64
24	Kayen Kidul	72,55	24.378	24.280	48.658	670,68
25	Ngasem	34,50	32.443	32.285	64.728	1.876,17
26	Badas	47,20	34.351	33.096	67.447	1.428,96
Jumlah		1.386,05	832.439	816.987	1.649.426	1.190,02

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri yang secara spesifik terdiri dari beberapa fokus yaitu :

- a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.
- b. Fokus kesejahteraan sosial.
- c. Fokus seni budaya dan olahraga.

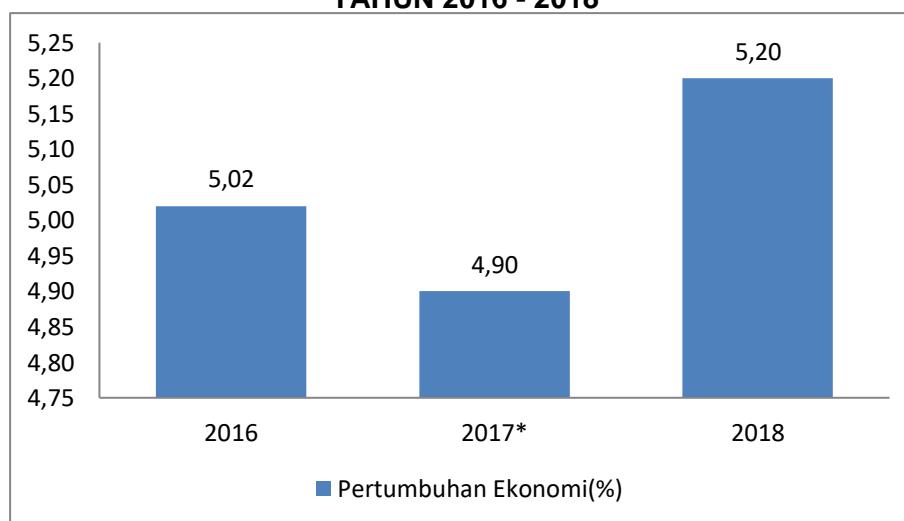
Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Kemampuan daerah ini menciptakan nilai tambah untuk berbagai aktivitas ekonomi. Penghitungan PDRB terdiri atas dasar harga konstan (ADHK) dan atas dasar harga berlaku (ADHB), dimana PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan suatu daerah sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

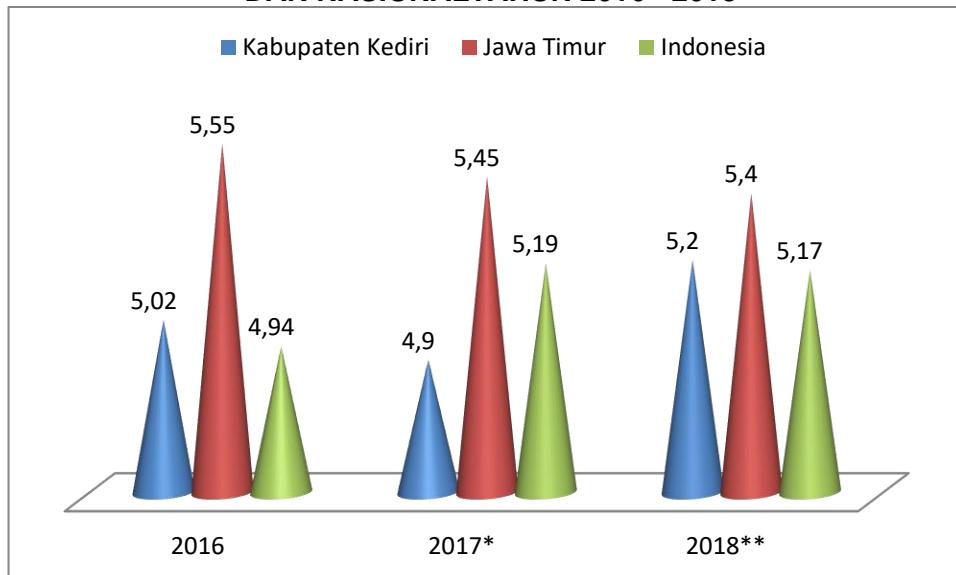
**GRAFIK 2.2
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016 - 2018**



Sumber : BPS dan Bappeda Kab Kediri
*) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami kondisi yang fluktuatif. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02, lalu pada tahun 2017 mengalami perlambatan menjadi 4,9. Namun pada tahun 2018 kembali mengalami percepatan menjadi 5,20 atau naik sebesar 0,30 poin. Untuk perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:

GRAFIK 2.3
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR
DAN NASIONAL TAHUN 2016 - 2018



Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Kediri

*) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, selama tahun 2016 - 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami tren yang fluktuatif. Tren fluktuatif ini dipengaruhi oleh kontribusi 17 sektor usaha yang secara dominan juga mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri secara sektoral selama tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.3
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PDRB KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016 - 2018 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,00	3,48	3,21
B	Pertambangan & Penggalian	2,34	2,96	2,74
C	Industri Pengolahan	5,85	5,97	4,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,44	3,71	3,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,18	4,57	4,77
F	Konstruksi	4,76	5,10	5,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,74	6,25	8,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,92	4,97	6,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,01	4,55	5,35
J	Informasi dan Komunikasi	7,46	8,04	7,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,49	4,37	6,33
L	Real Estate	5,20	5,48	5,44
M,N	Jasa Perusahaan	5,74	4,30	5,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,42	3,41	3,06
P	Jasa Pendidikan	5,77	4,72	4,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,49	4,34	6,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,19	4,93	4,92
Pertumbuhan Ekonomi		5,02	4,90	5,20

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Kediri

*) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Dari tabel di atas tampak bahwa pada tahun 2018 lapangan usaha PDRB yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sebesar 8,05%. Dilihat dari pertumbuhan PDRB pertahunnya, sektor tersebut memang mengalami percepatan. Pertumbuhan terbesar kedua terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi, yaitu sebesar 7,50.

Ditinjau dari distribusi PDRB, perekonomian Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir ditopang antara lain oleh empat lapangan usaha utama yaitu Informasi dan Komunikasi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kontruksi dan Industri Pengolahan. Gambaran distribusi PDRB Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.4
DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016 - 2018 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,70	23,32	23,81
B	Pertambangan & Penggalian	1,54	1,51	1,51
C	Industri Pengolahan	19,57	19,72	19,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	9,44	9,44	9,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,59	20,80	20,98
H	Transportasi dan Pergudangan	1,91	1,91	1,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,33	1,33	1,31
J	Informasi dan Komunikasi	6,16	6,32	6,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,82	1,80	1,90
L	Real Estate	2,08	2,09	2,11
M,N	Jasa Perusahaan	0,30	0,30	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,76	3,70	3,55
P	Jasa Pendidikan	4,93	4,91	4,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,82	0,88
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,91	1,90	1,85
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Kediri

*) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Dari tabel di atas tampak bahwa secara bertahap perkembangan perekonomian Kabupaten Kediri mulai mengalami pergeseran dari pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan Industri Pengolahan. Dimana lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan selama tiga tahun terakhir distribusinya menurun, sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami kenaikan secara bertahap.

b. Pendapatan Per Kapita

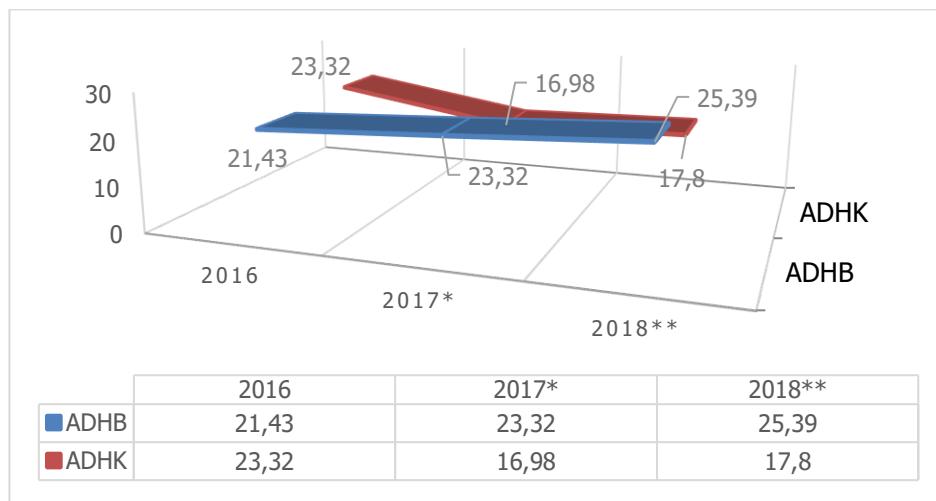
Pendapatan per kapita merupakan volume PDRB Kabupaten Kediri selama jangka waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemajuan perekonomian di

wilayah Kabupaten Kediri, tetapi tidak serta merta dapat diartikan sebagai gambaran tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Kediri.

Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Kediri selama tahun 2016

- 2018 seperti terlihat pada grafik berikut:

GRAFIK 2.4
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PER KAPITA
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018
(Dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Kediri

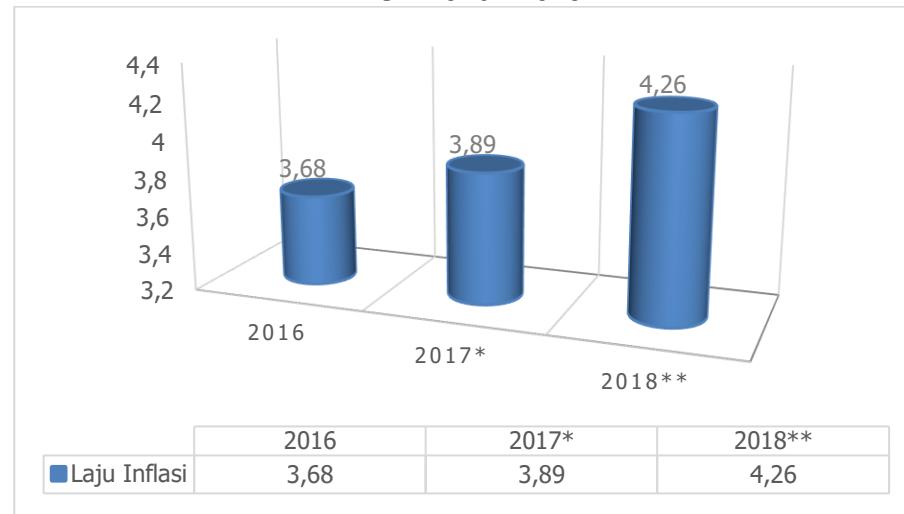
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Dari grafik di atas, tampak bahwa selama tiga tahun terakhir pendapatan/PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kediri mengalami kenaikan khusus untuk Atas Dasar Harga Berlaku. Pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada akhir tahun 2018 sebesar 25,39 juta rupiah, naik sebesar 2,07 juta rupiah dibandingkan tahun 2017 yaitu 23,32 Juta Rupiah, sedangkan pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2017 sebesar 16,98 juta rupiah dan tahun 2018 sebesar 17,8 juta rupiah.

c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan harga secara umum, besarnya diperoleh dari perkembangan nilai indeks implisit, yaitu suatu indeks yang menggambarkan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Kediri pada periode tahun 2016-2018 sebagaimana grafik berikut.

GRAFIK 2.5
INFLASI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016 - 2018

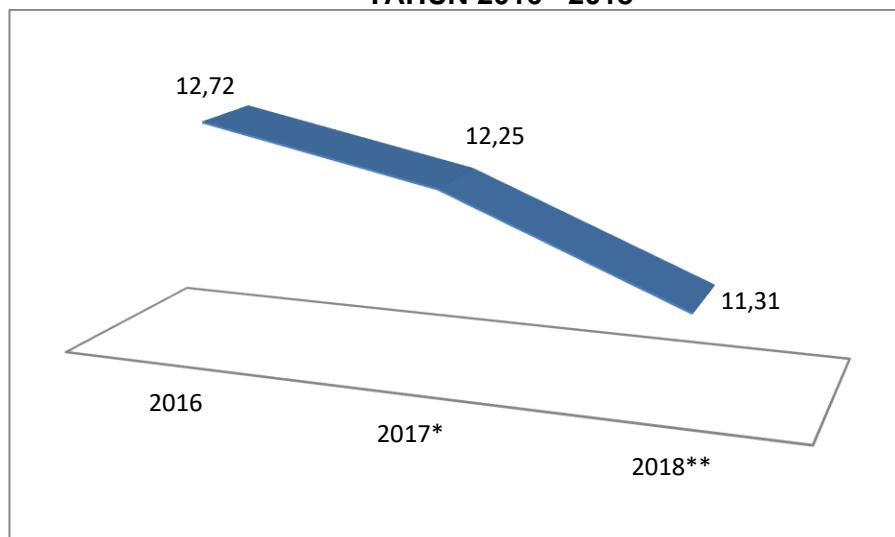


Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Kediri
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

d. Persentase Penduduk Miskin

Dalam tiga tahun terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri pada tahun 2018 sebesar 11,31% yang apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,94%. Untuk lebih jelasnya sebagaimana grafik berikut:

GRAFIK 2.6
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016 - 2018

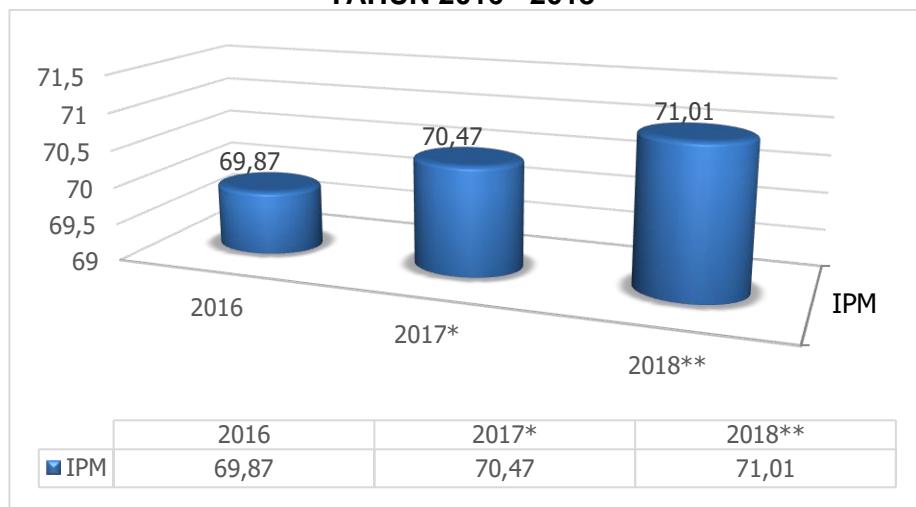


Sumber : Dinas Sosial dan BPS Kab. Kediri
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pada hakikatnya pembangunan ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat. Gambaran dampak pembangunan terhadap kualitas manusia dapat dilihat dari hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) pada suatu wilayah. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kediri selama tahun 2016 - 2018 sebagaimana grafik berikut :

**GRAFIK 2.7
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016 - 2018**



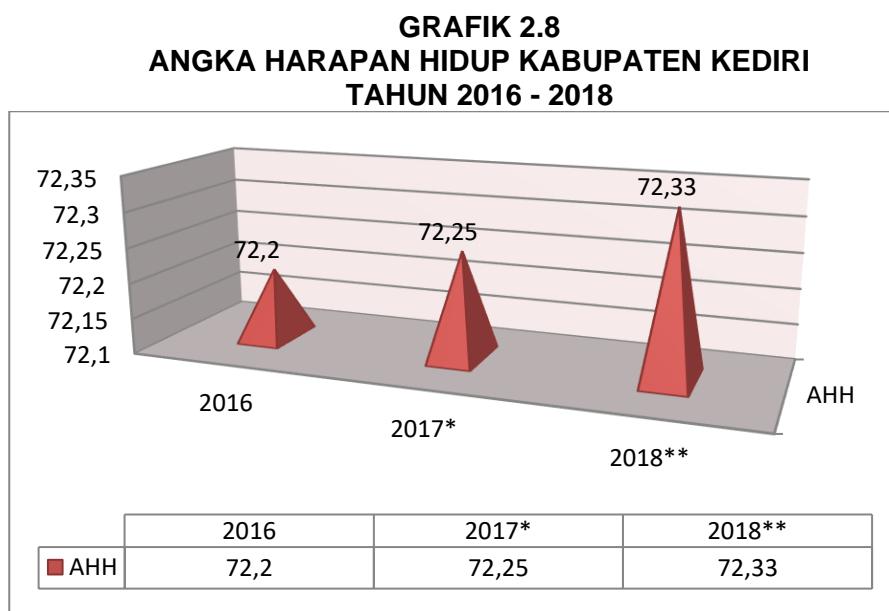
Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Kediri mencapai 69,87 dan meningkat menjadi 70,47 pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 71,01. Apabila dilihat Indeks Pembangunan Manusia mengalami tren positif dan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh komitmen Kepala Daerah untuk terus mengembangkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri. Selanjutnya karena IPM merupakan skor agregat dari tiga dimensi, perkembangan realisasi capaian ketiga dimensi tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan ditunjukkan dengan indikator Angka Harapan Hidup, yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.Untuk lebih jelasnya indikator perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Kediri selama tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Berdasarkan grafik diatas, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kediri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami tren kenaikan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan Kabupaten Kediri cukup berhasil dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar pada instalasi kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kediri.

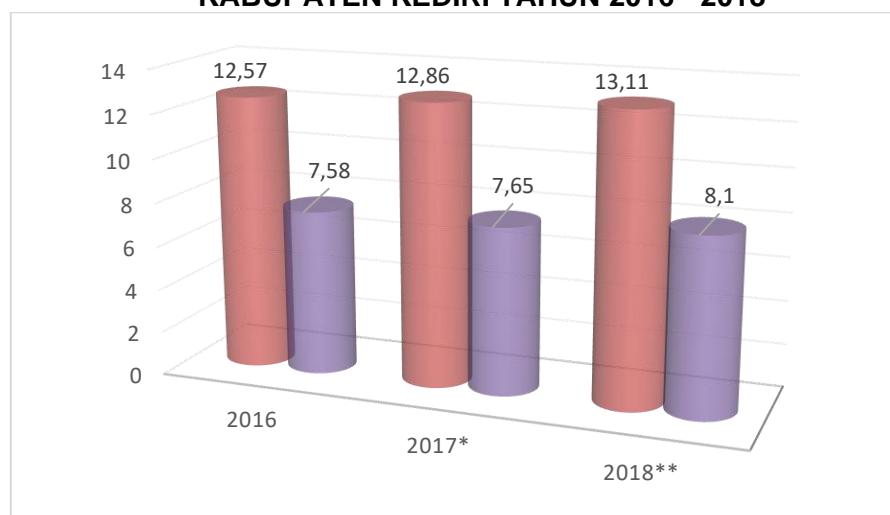
b. Dimensi Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung

dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Selanjutnya Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

GRAFIK 2.9
PERKEMBANGAN DIMENSI PENGETAHUAN
(HARAPAN LAMA SEKOLAH)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018



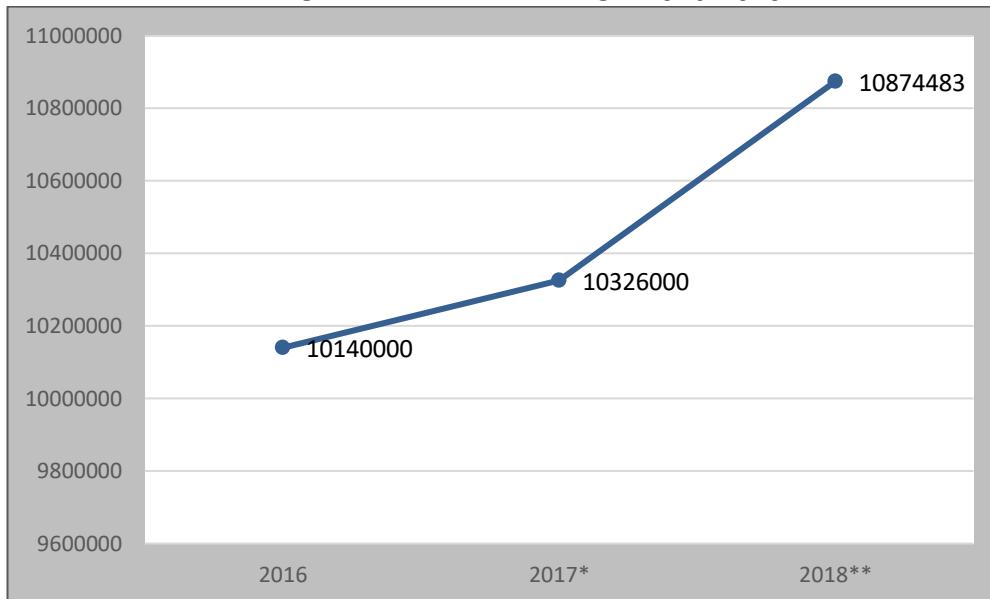
Sumber : BPS Kab. Kediri
 *)Angka diperbaiki **) Angka sementara

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ini diukur dengan pengeluaran (daya beli) yang ditentukan dari nilai pengeluaran dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran (daya beli) setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran (daya beli) dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Adapun perkembangan pengeluaran (daya beli) Kabupaten Kediri tahun 2016-2018 sebagaimana grafik berikut.

GRAFIK 2.10
PERKEMBANGAN PENGELUARAN (DAYA BELI)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016-2018



Sumber : BPS Kab Kediri dan BAPPEDA Kabupaten Kediri (diolah)

*) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Dari grafik di atas tampak bahwa selama tiga tahun terakhir pengeluaran per kapita di Kabupaten Kediri mengalami tren peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp.10.874.483. Tinggi rendahnya nilai ini dari masing-masing tahun sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi di samping pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Kediri. Sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian dan menjaga tingkat inflasi pada nilai yang rendah/stabil.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Penyelenggaraan aktivitas seni budaya oleh Pemerintah Kabupaten Kediri setiap tahunnya berhubungan dengan upaya pengembangan pariwisata agar para pelaku seni budaya memperoleh manfaat secara ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendukung pelestarian dan pengembangan seni budaya itu sendiri. Berikut disajikan perkembangan kelompok kesenian tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

TABEL 2.5
PERKEMBANGAN KELOMPOK KESENIAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	2016	2017*	2018**
A Kelompok Seni Tradisional				
1.	Jaranan	471	537	600
2.	Tiban	3	3	3
3.	Reog	8	10	11
4.	Wayang Mbah Gandrung	1	1	1
5.	Wayang Orang	1	1	2
6.	Wayang Krucil	3	3	3
7.	Wayang Suluh	112	112	112
8.	Wayang Kulit/Dalang	1	1	1
9.	Karawitan	18	18	23
10.	Waranggono	19	19	19
11.	Ludruk	3	3	4
12.	Kentrung	-	1	1
13.	Jemblung	6	6	6
14.	Macapat	6	6	6
15.	Kethoprak	6	6	8
16.	Pramugari	6	6	6
17.	Tayub	6	6	6
18.	Pencak silat	14	14	14
19.	Gala Ganjur	-	1	1
	Sub Jumlah	684	754	827
B. SANGGAR SENI :				
1.	Sanggar Tari	19	20	21
2.	Sanggar Lukis	7	7	7
3.	Teater	1	1	1
	Sub Jumlah	27	28	29
C Kelompok Seni Musik				
1.	Orkes Melayu	288	311	378
2.	Campursari	88	96	107
3.	Band	14	15	15
4.	Qosidah	13	13	17
5.	Hadrah	45	46	47
6.	Keroncong	5	5	5
7.	Electone	48	60	75
	Sub Jumlah	501	546	644
D. KELOMPOK PELAWAK				
1.	Lawak	8	8	8

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Sedangkan dalam penyelenggaraan urusan olahraga dapat digambarkan pada jumlah fasilitas pendukung olahraga yang tersedia sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.6
JUMLAH FASILITAS PENDUKUNG OLAHRAGA TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Jumlah Klub Olah Raga	209	209	494
2	Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)	365	365	365
3	Jumlah sekolah olahraga (Unit)	207	207	494

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri.

**) Angka diperbaiki, **) Angka sementara*

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum meliputi segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 4 (empat) fokus layanan, yaitu fokus urusan wajib layanan dasar, wajib bukan layanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1 Urusan Wajib Layanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka sejak tanggal 1 Januari 2017 urusan Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) dan Pendidikan Luar Biasa telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga fokus pembangunan bidang pendidikan, diarahkan pada pendidikan dasar 9 tahun yang meliputi : 1) Pendidikan moral/budi pekerti, untuk membangun watak dan kepribadian bangsa yang kokoh, cinta perdamaian, sadar hukum, anti korupsi, cinta tanah air sebagai landasan untuk membentuk sumber daya manusia yang utuh; dan 2) Membebaskan biaya pendidikan pada tingkat pendidikan tertentu dan/atau menekan biaya pendidikan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat serta memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

a) Perkembangan Kemerataan Pelayanan Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya kemerataan pelayanan pendidikan antara lain : cakupan PAUD, angka melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APuS), Angka Melanjutkan Sekolah (AMS).

Capaian kinerja pelayanan pendidikan selama tahun 2016 - 2018 untuk masing-masing indikator sebagaimana pada tabel berikut :

**TABEL 2.7
PERKEMBANGAN KEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN
TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			(%)
		2016	2017*	2018**	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	106,54	100,95	105,51	
2	Angka Melek Huruf Penduduk usia ≥15 th	99,78	99,80	99,83	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) :				
	1) SD/MI	109,47	108,70	107,76	
	2) SMP/MTs	101,66	103,10	100,95	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) :				
	1) SD/MI	99,76	98,88	98,76	
	2) SMP/MTs	78,81	81,75	80,53	
5	Angka Putus Sekolah (APuS) :				
	1) SD/MI	0,10	0,03	0,02	
	2) SMP/MTs	0,65	0,47	0,49	
6	Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)				
	1) SD/MI ke SMP/MTs	94,60	97,70	98,70	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya kemerataan pelayanan pendidikan antara lain : cakupan PAUD, angka melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APuS), Angka Melanjutkan Sekolah (AMS).

Angka Melek Aksara memberikan gambaran tingkat literasi (kemampuan baca-tulis) penduduk pada suatu daerah tertentu. Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, sebagai salah satu indikator perkembangan kemerataan pelayanan pendidikan, dapat dikatakan telah mencapai ketuntasan, yaitu mencapai angka 99,83% artinya bahwa hanya ada sebesar 0,17% penduduk Kabupaten Kediri usia 15 tahun lebih yang menyandang buta aksara, atau sebanyak 1.933

orang dari 1.136.892 orang dengan usia tersebut di atas yang masih menyandang buta aksara.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menggambarkan layanan pendidikan jenjang tertentu pada suatu wilayah/daerah terhadap penduduk usia tertentu pada wilayah yang sama, dan dinyatakan dalam bentuk persentase.

Dari indikator ini nampak bahwa APK pada jenjang Pendidikan Dasar mengalami penurunan, meskipun masih di kisaran 100%. Hal ini memberikan arti bahwa akses pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajat sangat efektif, dan mendapat animo masyarakat, serta munculnya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi pada pendidikan dasar.

Sementara itu Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2018 mengalami penurunan pada semua jenjang pendidikan bila dibanding tahun sebelumnya, yaitu:

1. Jenjang SD/sederajat mengalami penurunan sebesar 0,12%
2. Jenjang SMP/sederajat mengalami kenaikan sebesar 1,22%

b) Perkembangan Kualitas Keluaran Pendidikan

Meningkatnya kualitas keluaran pendidikan dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator seperti : angka kelulusan setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah, rata-rata nilai UAS dan UAN dan siswa yang memperoleh penghargaan bidang pendidikan dengan capaian sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.8
CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA KUALITAS KELUARAN PENDIDIKAN
TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR KINERJA	T A H U N		
		2016	2017*	2018**
1	% Angka Kelulusan			
	1) SD/MI :	99,82	99,48	99,87
	2) SMP/MTs :	99,15	99,88	99,86
2	Rata-rata nilai UAS dan UAN :			
	1) SD/MI	7,76	7,50	6,55
	2) SMP/MTs	7,60	5,30	5,40
3	Siswa memperoleh penghargaan di bidang pendidikan (siswa)	24	25	45

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Perkembangan Kualitas Keluaran Pendidikan juga ditunjukkan/ digambarkan oleh indikator jumlah siswa Kabupaten Kediri yang meraih juara/penghargaan atau berprestasi pada perlombaan/kejuaraan atau event-event pada tingkat provinsi maupun nasional baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah siswa Kabupaten Kediri yang meraih juara/penghargaan atau berprestasi pada perlombaan/kejuaraan atau event-event pada tingkat provinsi maupun nasional, pada tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan sebanyak 20 (dua puluh) siswa. Yaitu dari sebanyak 25 (dua puluh lima) siswa yang mampu meraih penghargaan/juara pada tahun 2017, menjadi 45 (empat puluh lima) siswa yang mampu meraih penghargaan/juara pada tahun 2018.

Hal ini memberikan gambaran bahwa adanya peningkatan daya saing pada siswa Kabupaten Kediri di tingkat regional, provinsi dan/atau tingkat nasional, atau semakin dominan persaingan siswa Kabupaten Kediri terhadap siswa kabupaten dan kota lain selama tahun 2018 ini.

c) Perkembangan Kualitas Manajemen Pendidikan

Kinerja Perkembangan Kualitas Manajemen Pendidikan ditunjukkan melalui 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kunci (IKK), meliputi : 1) rasio jumlah guru terhadap jumlah siswa, 2) persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana (S-1 dan/atau D-IV), 3) angka kompetensi guru (persentase guru yang bersertifikat profesi/keahlian sebagai guru), 4) persentase sekolah yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 5) persentase sekolah yang menggunakan teknologi informasi-komunikasi dalam proses belajar dan mengajar, 6) persentase gedung sekolah yang layak, 7) persentase sekolah yang memiliki perabot yang layak, 8) sekolah yang memiliki alat peraga dan praktek yang layak, 9) persentase sekolah yang memiliki alat olahraga yang layak, 10) persentase sekolah memiliki buku mata pelajaran pokok yang cukup, dan 11) persentase sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Capaian kinerja kualitas manajemen pendidikan adalah tabel berikut :

TABEL 2.9
CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN
TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Rasio Guru per siswa :			
	1) SD/MI :	1:16	1:16	1:16
	2) SMP/MTs :	1:14	1:15	1:15
2	% Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV :			
	1) SD/MI :	85,64	88,39	89,50
	2) SMP/MTs :	93,12	93,61	94,19
3	% Guru besertifikat keahlian/berkompeten (AKG)			
	1) SD/MI :	60,84	56,76	85,43
	2) SMP/MTs :	70,22	60,76	68,55
4	% Sekolah yang menerapkan KTSP :			
	1) SD/MI :	100	100	100
	2) SMP/MTs :	100	100	100
5	% Sekolah yang menerapkan Teknologi Informasi dalam proses belajar-mengajar:			
	1) SD/MI :	14,81	14,81	15,02
	2) SMP/MTs :	52,28	52,28	52,53
6	% Gedung sekolah yang layak:			
	1) SD/MI :	68,41	71,89	69,41
	2) SMP/MTs :	84,43	83,52	84,66
7	% Sekolah yang memiliki perabot yang layak :			
	1) SD/MI :	91,55	91,55	92,06
	2) SMP/MTs :	90,76	90,76	91,75
8	% Sekolah yang memiliki alat peraga dan praktik yang layak:			
	1) SD/MI :	46,68	46,68	44,10
	2) SMP/MTs :	39,78	39,78	40,31
9	% Sekolah yang memiliki alat olahraga yang layak			
	1) SD/MI :	71,75	71,75	71,75
	2) SMP/MTs :	69,89	69,89	68,89
10	% Sekolah yang memiliki buku mata pelajaran pokok yang cukup :			
	1) SD/MI :	97,18	97,18	98,50
	2) SMP/MTs :	86,71	86,71	83,00
11	% Sekolah yang Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/MBS			
	1) SD/MI :	100	100	100
	2) SMP/MTs :	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru yang ada untuk semua mata pelajaran pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah siswa yang ada pada jenjang pendidikan yang sama. Perkembangan rasio guru terhadap murid dari tahun 2016 hingga 2018, relatif tidak mengalami perubahan pada semua jenjang pendidikan, kalaupun ada perubahan sangatlah kecil dan terjadi naik dan turun silih berganti.

Rasio 1 (satu) orang guru menangani kurang dari 20 (dua puluh) siswa merupakan rasio yang sangat ideal dalam mendukung pelaksanaan proses belajar dan mengajar secara efektif. Dengan rasio seperti tersebut di atas sangat dimungkinkan volume dan kualitas interaksi antara guru dan murid, serta mata pelajaran yang diterapkan akan dapat berlangsung lebih intensif. Sesuai ketentuan, bahwa: "Semua guru pada semua jenjang pendidikan harus berkualifikasi sarjana (S1) dan/atau Diploma IV (D-IV)". Indikator persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana (S-1 dan/atau D-IV) sesuai ketentuan di atas, memberikan gambaran kualitas guru. Kualitas guru di Kabupaten Kediri berdasar indikator ini, dapat dikatakan bahwa pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Kediri belum memenuhi kualifikasi guru seperti yang dipersyaratkan, meskipun dari tahun ke tahun senantiasa mangalami peningkatan, dan terakhir telah mendekati 100%, dengan persentase terendah pada jenjang SD/MI, yaitu sebesar 89,50% dan SMP/MTs sebesar 94,19%. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya rekrutmen guru baru oleh lembaga swasta dan guru "lama" yang memang saat pengangkatan pertamanya belum mempersyaratkan ketentuan kualifikasi S1/D-IV.

Kedua aspek di atas (kualifikasi guru dan sertifikasi guru) perlu mendapat penanganan lebih intensif pada tahun-tahun mendatang guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kediri. Penurunan capaian indikator guru (kualifikasi guru dan sertifikasi guru) lebih diakibatkan adanya guru-guru yang berkualifikasi S-1/D-IV dan/atau bersertifikat profesi memasuki masa pensiun, sementara guru-guru pengganti belum berkualifikasi S-1/D-IV atau belum memungkinkan untuk mengikuti seleksi dan pelatihan sertifikasi pendidik. Kinerja yang memuaskan, artinya indikator mencapai pada tingkat maksimal (100%) adalah persentase sekolah yang menerapkan Kurikulum yang berlaku (KTSP dan Kurikulum 2013), dan persentase sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), artinya bahwa semua sekolah pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Kediri telah menerapkan kedua indikator tersebut. Sedang aspek sarana/prasarana pendidikan, yang meliputi persentase sekolah yang

menggunakan teknologi informasi-komunikasi dalam proses belajar dan mengajar, persentase gedung sekolah yang layak, persentase sekolah yang memiliki perabot yang layak, persentase sekolah yang memiliki alat peraga dan praktik yang layak, persentase sekolah yang memiliki alat olahraga yang layak, persentase sekolah memiliki buku mata pelajaran pokok yang cukup, masih perlu mendapat perhatian dan pengawalan yang cukup ketat.

Meskipun dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan, khususnya pada pemenuhan buku mata pelajaran pokok, yang menuntut ketercukupan 1 (satu) paket buku untuk 1 (satu) siswa, sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Secara matrik capaian kinerja manajemen pendidikan dapat disajikan pada table berikut:

**TABEL 2.10
PERKEMBANGAN KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK
TAHUN 2016 - 2018**

No	Uraian	Σ Guru yang ada	Σ Guru berkualifikasi	%
TAHUN 2016 :				
1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV :			
	a. SD/MI	9.580	9.702	60,84
	b. SMP/MTs	4.453	-	70,22
2.	Guru berkualifikasi keahlian/berkompeten(AKG)			
	a. SD	9.580	9.702	60,84
	b. SMP	4.453	-	70,22
TAHUN 2017* :				
1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV :			
	a. SD/MI	9.483	8.382	88,39
	b. SMP/MTs	4.710	4.409	93,61
2.	Guru berkualifikasi keahlian/berkompeten(AKG)			
	a. SD	9.483	5.383	56,76
	b. SMP	4.710	2.862	60,76
TAHUN 2018 **:				
1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV :			
	a. SD/MI	9.540	8.538	89,50
	b. SMP/MTs	4.547	4.283	94,19

No	Uraian	Σ Guru yang ada	Σ Guru berkualifikasi	%
2.	Guru berkualifikasi keahlian/ berkompeten(AKG)			
	a. SD	9.540	7.666	80,36
	b. SMP	4.547	2.554	56,17

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri.
*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

d) Perkembangan Jangkauan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Non-formal

Kinerja penyelenggaraan pendidikan non formal tahun 2018 secara umum mengalami sedikit penurunan pada beberapa indikator, yaitu pada indikator Persentase Anak Putus Sekolah yang mengikuti Program Paket A/B/C dan indikator Rasio Tutor Keaksaraan Fungsional Dengan Peserta Program. Sedangkan indikator lain, yang meliputi Persentase Kecukupan Tutor pada Kelompok Belajar Program Paket A/B/C, Persentase Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Memenuhi Standar, dan Persentase Lembaga Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang Memenuhi Standar, telah mencapai angka maksimal. Dan 2 (dua) indikator lain, yaitu Persentase Penduduk Buta Aksara yang mengikuti Program Keaksaraan Fungsional dan indikator Persentase Lembaga Kursus dengan Peserta Kursus mengikuti Ujian Nasional Kursus mengalami kenaikan yang cukup bagus.

Capaian kinerja kualitas penyelenggaraan pendidikan nonformal pada tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.11
KINERJA KUALITAS PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	% Anak putus sekolah yang mengikuti Program Paket A, B, C	57,62	38,69	31,62
2	% Penduduk buta aksara yang mengikuti program keaksaraan fungsional	15,4	15,40	35,49
3	% Kecukupan tutor pada kelompok belajar program Paket A,B,C	100,00	100,00	100,00
4	Rasio tutor keaksaraan fungsional dengan peserta program	1:10	1:10	1:15
5	% Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi standar	100,00	100,00	100,00
6	% Lembaga Taman Bacaan Masyarakat	100,00	100,00	100,00

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
	(TBM) yang memenuhi standar			
7	% Lembaga kursus dengan peserta kursus mengikuti ujian nasional kursus	64.43	64,43	64,50

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Persentase anak putus sekolah yang mengikuti Program Paket A/B/C pada tahun 2018 mengalami penurunan, yaitu sebesar 7,07% bila dibandingkan tahun 2017. Kondisi ini dipicu dengan munculnya penurunan Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2018, sementara siswa putus sekolah pada jenjang tersebut belum semuanya terwadahi atau tertampung pada Program Paket A/B/C pada tahun yang sama. Padahal secara konsep dan normatif bahwa anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan formal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selanjutnya hak pendidikannya diupayakan melalui Program Paket A/B/C (Pendidikan Non Formal).

Kondisi anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan formal setingkat lebih tinggi berkorelasi langsung dengan persepsi bahwa anak putus sekolah umumnya berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki kendala motivasi dari keluarga, oleh karena itu bahwa pendidikan yang dibutuhkan adalah program pendidikan yang fleksibel dalam ukuran waktu/saat pelaksanaan dan tempat serta memberikan kecakapan praktis (*life skills*). Oleh karena itu, penanganan terhadap anak putus sekolah dan tidak melanjutkan perlu diupayakan secara paralel dengan pengendalian terhadap lembaga pendidikan non formal dan lembaga penyelenggara kursus ketrampilan. Lembaga kursus ketrampilan yang ada perlu didorong untuk mengikutsertakan peserta kursus pada Ujian Nasional Kursus, sehingga peserta kursus memiliki kualifikasi standar formal untuk memasuki dunia kerja.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan, menjadikan RSUD Kab. Kediri sebagai pusat pelayanan rujukan yang paripurna Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
- c. Meningkatnya kualitas manajemen dan profesionalisme untuk mewujudkan kemandirian rumah sakit sebagai BLUD;
- d. Meningkatnya profesionalisme pegawai RS untuk mendapatkan pelatihan yang bermutu untuk menunjang pelayanan.

Capaian kinerja atas penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan selama tahun 2016 - 2018 diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran ini menggunakan indikator kinerja yaitu : Penemuan penyakit menular dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; Kesehatan Ibu dan Anak; Mortalitas; Morbiditas dan Status Gizi. Lebih lanjut capaian kinerja lebih terinci pada uraian berikut:

e. Penemuan Penyakit Menular dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang ditangani Dinas Kesehatan mencakup seluruh penderita yang ada sehingga menekan seminimal mungkin berkembang menjadi wabah. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja yang baik yaitu sebesar 51,48% pada tahun 2018. Untuk penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) semua pasien yang ditemukan dan ditangani sesuai standar. Sedangkan untuk pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin hanya mencapai 4,30% karena semua kasus pasien masyarakat miskin yang berobat di Puskesmas sudah dapat ditangani di level puskesmas sesuai dengan ketentuan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), sehingga tidak perlu dilakukan rujukan. Urusan yang dirujuk atau tidak, akan menjadi tanggung jawab dokter faskes I. Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini rujukan dilakukan berdasarkan indikasi medis dan secara berjenjang mulai dari puskesmas sampai rumah sakit lanjutan, kecuali dalam kondisi gawat darurat, peserta JKN termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) biasa langsung dirujuk ke faskes lanjutan. Jika peserta PBI ingin mendapatkan pelayanan yang

tidak sesuai dengan sistem perujukan dapat dikategorikan ke dalam pelayanan yang tidak sesuai prosedur BPJS sehingga pengobatannya tidak dibayarkan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan rincian capaian indikator kinerja pada kelompok penemuan penyakit menular, penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin selama tahun 2016-2018 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.12
CAPAIAN PENEMUAN PENYAKIT MENULAR DAN PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016*	2017*	2018**
1	% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	53,51	84	51.48
2	% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100
3	% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	4,30	4,30	4,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Cakupan pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai angka 88,4% yang berarti sudah melampaui target 84,61%, kondisi ini dikarenakan semua ibu hamil resiko tinggi yang mengalami komplikasi persalinan sudah tertangani sesuai dengan standart pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang ditangani, pada tahun 2018 terealisasi sebesar 92,39. Hal tersebut disebabkan disebabkan meningkatnya jumlah ibu hamil yang pada saat persalinan memilih untuk bersalin diluar kabupaten kediri (mendekati orang tua), terutama pada ibu yang pertama kali bersalin. Selain itu untuk cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) terealisasi sebesar 97,38% mendekati hasil yang diharapkan yaitu 100%. Penurunan ini disebabkan ada beberapa Puskesmas yang tidak mencapai semua indikator di semua reagen sehingga cakupan desanya tidak mencapai UCI. Sementara itu, untuk balita gizi buruk yang mendapat perawatan tercapai sejumlah 100%. Cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan karena : 1). Perubahan Definisi Operasional dan penetapan target pada SPM pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2). Mobilitas penduduk yang menyebabkan terputusnya pelaporan kunjungan bayi pada kelompok bayi yang dilahirkan di Kabupaten Kediri. 3) Tidak

semua bayi dapat dipantau tumbuh kembangnya karena setelah mendapatkan imunisasi lengkap, balita tersebut tidak kembali lagi ke posyandu. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan peran serta aktif kader kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluhan serta posyandu dengan mengoptimalkan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) di masing-masing puskesmas serta peningkatan peran serta aktif kelompok masyarakat seperti PKK dan kelompok masyarakat lain.

Adapun Capaian keluarga sehat adalah angka kumulatif dari jumlah keluarga yang sudah dilakukan survei dengan menggunakan indikator keluarga sehat. Sasaran dari survei tersebut adalah semua keluarga yang ada, dan ditargetkan pada tahun 2019 semua keluarga sudah dilakukan survei dan dilanjutkan dengan intervensi masalah kesehatan yang ada pada keluarga tersebut dengan pendekatan komprehensif lintas program dan lintas sektor.

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan/atau Dokter dan/atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan. Kurangnya pencapaian pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar sebanyak 0,5% yaitu masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun sebanyak 9 orang yang berada di wilayah Puskesmas Kandangan, Semen, Kras, Sidorejo dan Ngadi.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya ibu hamil yang masih bersalin di dukun adalah kurangnya pengetahuan masyarakat pentingnya bersalin di fasilitas kesehatan, masih kuatnya budaya di masyarakat, sosial ekonomi yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan untuk kegiatan imunisasi, untuk meningkatkan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*, kegiatan yang sudah dilakukan adalah :

- a. Koordinasi dengan koordinator imunisasi puskesmas lewat pertemuan dalam setahun yang diisi dengan penyampaian informasi terbaru, evaluasi laporan yang masuk dan validasi data setiap puskesmas;
- b. Bimbingan teknis ke puskesmas;
- c. Dilakukan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
- d. Kampanye Measles Rubella (MR).

Pada pelayanan kesehatan penanganan bayi dan balita gizi buruk yang ditangani sesuai dengan tata laksana gizi buruk dan atau kontak dengan tenaga kesehatan. Kondisi balita yang menderita gizi buruk kurun waktu tertentu semuanya telah mendapatkan pendampingan kader sehingga capaiannya 100%. Sementara itu, untuk persentase keluarga sehat di Kabupaten Kediri selalu mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Adapun rincian capaian pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana pada tabel berikut :

**TABEL 2.13
CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95,97	91,8	88,4
2	% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,63	94,5	92,39
3	% Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97,97	99,4	97,38
4	% Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100
5	% Cakupan kunjungan bayi	96,08	94,8	93,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

e. Mortalitas

Secara umum, capaian 6 (enam) indikator pada kelompok Mortalitas dalam kategori sangat baik. Pencapaian indikator tersebut didukung dengan adanya kemandirian dan peningkatan peran serta masyarakat serta sektor lain yang terkait di dalamnya agar memenuhi target yang ditetapkan. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 72,6 per 100.000 kelahiran hidup dikarenakan pendarahan, pre-eklampsi dan serangan jantung. Perkembangan mortalitas tahun 2016-2018 terlihat pada tabel berikut :

**TABEL 2.14
PERKEMBANGAN MORTALITAS TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Angka Kematian bayi per-1.000 Kelahiran Hidup	6,86	6,4	6.8
2	Angka Kematian Ibu melahirkan per-100.000 Kelahiran Hidup	65,73	61,6	72.6
3	% Angka penemuan penderita kusta baru dengan cacat 2	5	3	7
4	% Jml penderita kusta diobati yang <i>Release From Treatment</i> (RFT)	95,1	94,87	95.3
5	% Penemuan Penderita Diare	55,54	71,6	69
6	% Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita	69,88	68,23	55.57

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

f. Morbiditas

Morbiditas merupakan gambaran atau keadaan kesehatan secara umum untuk mengetahui derajat sakit/gangguan pada populasi yang dinyatakan dalam angka prevalensi atau insidensi. Ukuran yang dipergunakan dalam menentukan morbiditas adalah angka, rasio dan proporsi. Adapun capaian indikator pada kelompok Morbiditas kurun waktu tahun 2016–2018 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.15
PERKEMBANGAN MORBIDITAS TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Angka Kesakitan malaria per-1.000 Penduduk	0	0	0
2	% Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+	92	86,65	89

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
3	% Pengidap HIV yang mendapatkan pelayanan CST	79	86,1	89,5
4	Angka "Acute Flaccid Paralysis" (AFP) pada Anak Usia < 15 tahun per-100.000 Anak	7	7	4
5	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100.000 Penduduk	52	17,36	30,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kematian atau morbiditas akibat penyakit menular tidak terlalu tinggi, ini disebabkan adanya pergeseran jenis penyakit dari penyakit menular menjadi tidak menular karena gaya hidup. Dapat dilihat dari data bahwa jumlah kasus malaria pada tahun 2018 dilaporkan ada 11 kasus per 1000 penduduk disebabkan oleh adanya migrasi penduduk dari luar wilayah Kabupaten Kediri, sedangkan pada tahun sebelumnya tidak ditemukan.

Upaya untuk penanggulangan penyakit Malaria adalah dengan mengadakan Survei Migrasi di wilayah yang Resiko Tinggi (Penduduknya banyak yang bekerja di Luar Jawa) selain itu juga dilakukan penyuluhan untuk segera melaporkan bila ada masyarakat yang baru pulang (Bekerja) di Luar Pulau Jawa untuk diperiksa Sediaan Darah Jari untuk kewaspadaan dini penyebaran kasus Malaria. Selain itu juga dilakukan pemantauan kepada penderita dan diberi pengobatan supaya kasus Malaria tidak menyebar ke wilayah lain.

Kabupaten Kediri, dengan jumlah penduduk yang besar, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap cakupan program TB di Provinsi Jawa Timur, yang mana pada tahun 2018 jumlah kasus yang dicapai hanya untuk TB BTA (+) saja mencapai angka 89% dengan pencapaian kinerja sebanyak 91,75%. Kondisi ini yang berarti pengobatan TB paru BTA(+) sudah berhasil sembuh total.

Infeksi Menular Seksual (IMS) masih menimbulkan beban morbiditas dan mortalitas baik secara langsung yang berdampak pada kualitas hidup, kesehatan reproduksi dan anak-anak, serta secara tidak langsung melalui perannya dalam mempermudah transmisi seksual infeksi

HIV. Pada tahun 2018 kinerja mencapai 99,1%, kondisi ini menunjukkan bahwa semua penderita dalam wilayah rentan dan beresiko mendapatkan pemeriksaan CVT untuk mengetahui terinfeksi HIV atau tidak. Sebagai upaya pencapaian tujuan pengendalian IMS dan HIV AIDS dengan mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, pada tahun mendatang direncanakan adanya penambahan layanan baik layanan IMS, VCT, PITC maupun PDP/CST di Puskesmas.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit polio melalui gerakan imunisasi polio. Upaya ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi secara aktif terhadap kasus-kasus AFP kelompok umur <15 tahun, dalam upaya menemukan adanya transmisi virus polio liar. Berdasarkan perkiraan minimal kasus AFP non polio 2/100.000 anak usia <15 tahun, maka Kabupaten Kediri mendapat target menemukan sebanyak 6 kasus AFP. Sejak tahun 2016 – 2018, Kabupaten Kediri telah memenuhi target penemuan kasus AFP.

Sementara itu, Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100.000 Penduduk pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 59,59%. Kenaikan realisasi angka kesakitan DBD merupakan bukti dari peningkatan keaktifan dan kemampuan kegiatan surveillans penemuan penyakit oleh fasilitas pelayanan kesehatan sehingga semakin banyak kasus yang ditemukan. Kenaikan ini juga dipicu masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah terjadinya DBD. Solusi yang dilakukan adalah melakukan kerja bersama lintas sektor untuk pencegahan DBD melalui kegiatan PSN yang benar dan efektif serta menggiatkan kembali program Jum'at bersih.

g. Status Gizi

Peningkatan status gizi diharapkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri telah bebas dari status kecamatan rawan gizi. Untuk mengantisipasi hal tersebut diadakan kegiatan surveilensi gizi untuk dijadikan acuan dalam menetapkan jenis dan lokasi kegiatan pelayanan gizi pada masyarakat. Melalui program dan kegiatannya Dinas Kesehatan telah berhasil dalam menangani kondisi balita dengan gizi buruk, sehingga kecamatan di Kabupaten Kediri telah bebas status kecamatan rawan gizi

serta persentase balita dengan gizi buruk. Capaian perkembangan status gizi seperti pada tabel berikut:

**TABEL 2.16
PERKEMBANGAN STATUS GIZI TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Balita Dengan Gizi Buruk	0,66	0,66	0,034
2	% Kecamatan Bebas Rawan Gizi	100	100	100
3	% pelaksanaan surveensi gizi	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

b. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Tenaga Kesehatan

Pencapaian kinerja melalui sarana dan tenaga kesehatan akan menunjukkan mutu dan kualitas fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan, khususnya di puskesmas harus terus ditingkatkan pelayanannya, mengingat beberapa puskesmas telah terakreditasi. Capaian meningkatnya penyediaan sarana dan tenaga kesehatan 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.17
CAPAIAN MENINGKATNYA PENYEDIAAN SARANA DAN TENAGA
KESEHATAN TAHUN 2016 - 2018**

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Rasio Puskesmas dan Pustu terhadap jumlah penduduk	1 : 13.116	1 : 13.116	1 : 13.116
2	% Puskesmas yang melayani rawat inap	21,60	21,60	21,60
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1 : 153.469	1 : 153.469	1: 1.568.113
4	% Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar	100	100	100
5	% Penyediaan obat atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah	100	100	100
6	% Peningkatan tenaga kesehatan di sarana kesehatan pemerintah			
	1) Paramedik	0	0	0
	2) Dokter dan Dokter Gigi	0	0	18
	3) Bidan	0	0	8
7	% Pemenuhan kebutuhan			

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
	tenaga kesehatan			
1)	Paramedik	0	-	75
2)	Dokter dan Dokter Gigi	0	-	80
3)	Bidan	0	-	0
8	% Ketersediaan tenaga bidan desa	100,24	100,24	100,24

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

TABEL 2.18
JUMLAH TENAGA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2016 - 2018
(orang)

NO	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Dokter Spesialis	34	34	102
2.	Dokter Umum	55	45	111
3	Dokter Gigi	41	36	55
4	Bidan	416	343	581
5	Perawat	191	184	703
6	Sanitarian	36	36	51
7	Paramedis lain	171	171	171
8	Tenaga Non Medis	193	193	308
	Jumlah	1.103	1.042	2.082

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan tenaga pelayanan kesehatan (tenaga medis dan non medis) di Kabupaten Kediri mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kondisi ini dikarenakan pada tahun 2018 ada rekrutmen besar untuk ditempatkan pada RSUD SLG. Perkembangan sarana prasarana kesehatan seperti tabel berikut :

TABEL 2.19
PERKEMBANGAN SARANA PRASARANA KESEHATAN
TAHUN 2016 - 2018

(unit)

NO	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Puskesmas	37	37	37
2	Puskesmas Pembantu	80	80	80
3	Puskesmas Keliling	74	39	39
4	Posyandu	1727	1.729	1.730
5	Rumah Bersalin	0	0	0
6	Rumah Sakit Umum	7	7	7
7	Balai Pengobatan (BP)	0	0	0
8	Klinik	42	42	42

NO	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
9	Rumah Sakit Khusus	4	4	4
JUMLAH		1.959	1.938	1.938

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, tidak ada perubahan secara kuantitas. Perubahan dan perbaikan difokuskan pada sisi kualitas melalui penyediaan alkes, perbaikan gedung, penambahan pelayanan baru dan peningkatan kapasitas SDM. Penambahan fasilitas pelayanan yang berbasis UKBM seperti pada posyandu menunjukkan perbaikan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Perbaikan partisipasi masyarakat tersebut perlu didukung dengan penyediaan alokasi anggaran melalui Dana Desa dan sumber pendanaan lain yang memungkinkan sesuai aturan perundangan yang ada.

c. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dalam program perlindungan kesehatan masyarakat tahun 2016 - 2018 sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.20
KINERJA PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Peningkatan pengawasan sarana peredaran obat	100	100	100
2	Jumlah sarana peredaran kosmetik yang diawasi (Unit)	35	35	35
3	Jumlah pengawasan distribusi makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan (Unit)	75	75	75
4	% Penduduk miskin yang terjangkau dalam Jamkesmas & Jamkesda	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja perlindungan terhadap masyarakat mencapai hasil yang cukup bagus, pengawasan peredaran obat dan kosmetik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sudah dilakukan secara rutin untuk memantau peredaran makanan dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta pemegang SKM dan SPM,

Pemerintah Kabupaten Kediri secara bertahap memasukkan Peserta Pemegang SKM dan SPM serta masyarakat miskin lainnya menjadi Peserta PBI Daerah pada tahun 2018 dimana pembayaran iuran premi per bulannya akan di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga diharapkan seluruh penduduk di Kabupaten Kediri menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat. Dukungan dan peran serta Pemerintah Kabupaten Kediri sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan Program JKN-KIS, setidaknya terdapat peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan mendorong *Universal Health Coverage* (UHC), dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

d. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dimulai dari lingkungan rumah tangga yang mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatan setiap anggota keluarga dari gangguan penyakit serta jaminan lingkungan rumah tangga yang bersih dan sehat. Pemasyarakatan perilaku hidup sehat adalah salah satu upaya pembangunan yang bersifat preventif dan promotif. Capaian kinerja atas perilaku hidup bersih dan sehat selama tiga tahun terakhir terlihat sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.21
KINERJA MENINGKATNYA PERILAKU HIDUP SEHAT
TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Rumah Sehat	66,36	70,36	72,05
2	% Keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih	84,35	93,75	92,75
3	% Rumah yang memiliki jamban keluarga	82,69	71,8	72,8
4	% Peningkatan rumah dengan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)	66,36	71,76	71,76
5	% Tempat-tempat Umum sehat	85	88,84	88
6	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 72	1 : 72	1 : 72
7	% Posyandu Purnama dan Mandiri :			
	1) Purnama	81,88	81,43	81,38
	2) Mandiri	5,56	5,49	5,49
8	% Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas dan Rumah sakit	78,15	95,2	91,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dalam kinerja peningkatan perilaku hidup semua sudah mencapai hasil yang memuaskan. Pada tahun 2017 indikator persentase keluarga yang memiliki jamban mengalami penurunan menjadi 71,8% dibandingkan tahun 2016 sebesar 82,69%. Hal ini perlu untuk segera mendapatkan perhatian. Penurunan ini dikarenakan keterbatasan tenaga yang tersedia untuk melakukan mapping jamban yang sesuai dengan syarat kesehatan.

e. Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki 2 (dua) Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Pare) dan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul (RSUD SLG). RSUD Pare merupakan Rumah Sakit Kelas B non pendidikan dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). RSUD Pare telah terakreditasi 12 program pelayanan dan saat ini sedang berproses untuk melaksanakan akreditasi versi 2012 yaitu akreditasi rumah sakit menuju standar internasional dengan sistem *Joint Commission Internasional* (JCI). Sedangkan RSUD SLG merupakan Rumah Sakit Kelas C, yang telah diresmikan pada bulan Desember 2018 dan operasionalnya dimulai pada bulan Januari 2019.

Guna menunjang kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kedua rumah sakit tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas pelayanan yang secara bertahap akan ditingkatkan. RSUD Pare telah dilengkapi dengan fasilitas pelayanan instalasi gawat darurat, radiologi, laboratorium, kamar operasi, rehabilitasi medik, farmasi gizi dan perawatan intensif. Sesuai kebutuhan masyarakat dan tingkat kemampuan keuangan daerah, pelayanan rumah sakit juga telah dilengkapi dengan fasilitas kedokteran seperti *Electromyogram* (EMG), *Endoscopis*, *Broncocopis*, *Tread Mill*, *Intensive Coronary Care Unit* (ICCU), *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), *Ultra Sonografi* (USG) 4 dimensi, *CT-Scan*, *Electroencephalography* (EEG), *Patologi Anatomi* (PA), *Patologi Klinik* (PK) dan *Echocardiografi*.

Jumlah pelayanan rawat jalan yang diselenggarakan antara lain poli penyakit anak, poli bedah (bedah umum, bedah mulut), poli THT, poli kebidanan/obgyn, poli penyakit jantung dan paru, poli penyakit mata, poli lansia, HCT/HIV, mata, urologi, kulit kelamin, gigi, jiwa, bedah plastik dan bedah tulang. Kinerja pelayanan rumah RSUD Pare diukur menggunakan sebelas indikator dan tingkat capaiannya sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.22
KINERJA PELAYANAN RSUD TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Kapasitas Ruang Inap sesuai master plan RSUD (orang)	228	228	228
2	<i>Bed Occupancy Rate/BOR (%)</i>	70	71,3	78,3
3	Peningkatan jumlah kunjungan :			
	1) % peningkatan Pasien Rawat inap RS	15,5	15,5	9,0
	2) Jumlah Pasien Rawat jalan RS (orang)	92.341	95.331	93.556
4	% penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain	0,33	0,33	75,23
5	Angka kematian >= 48 jam setelah dirawat	695	712	749
6	% Peningkatan <i>Costumers Acquisition</i>	5,72	5,72	6,5
7	% Menurunnya jumlah keluhan pasien	1,50	1,50	1
8	Bed Turn Over (BTO) (kali)	63,7	70,8	74,9
9	% Angka Kematian Kasar/GDR Rumah Sakit	77,9	74,35	70,00
10	% Angka Kematian Bersih/NDR Rumah Sakit	49,3	45,5	42,2
11	% Tingkat kemandirian keuangan RSUD	52,05	75,75	74,96

Sumber : RSUD Pare Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Indikator-indikator yang berkaitan dengan tingkat kematian pasien (Gross Death Rate/GDR, Net Death Rate/NDR, Angka kematian >= 48 jam setelah dirawat) belum menggembirakan, dalam artian walaupun sudah menunjukkan tren menurun tapi belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut terutama disebabkan kondisi pasien saat dirujuk umumnya sudah parah saat masuk rumah sakit sehingga peluang untuk sembuh sangat kecil. Kondisi yang sama umumnya terjadi pada rumah sakit milik pemerintah yang berstatus sebagai rumah sakit rujukan. Namun demikian hal ini menjadi tantangan bagi pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri terutama pada aspek promotif dan preventif, sehingga meminimalkan terjadinya hasil kurang baik pada aspek kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan capaian tingkat kemandirian bervariasi setiap tahun, dikarenakan adanya kenaikan belanja, khususnya belanja modal yang bersumber dari DBHCHT dan DAK.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan Penyediaan Sarana Infrastruktur Daerah

Capaian kinerja penyediaan sarana infrastruktur daerah yang tertuang didalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.23
CAPAIAN SARANA INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN 2016 - 2018
 (persen)

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	% Pemenuhan kebutuhan jalan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	% Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	81,17	85,98	87,26	90,35	88,14
3	% Pemenuhan kebutuhan jembatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	% Jembatan dalam kondisi baik	81,67	83,60	84,89	80,92	80,95
5	% Jalan dalam kondisi mantap	-	-	87,26	93,5	91,47
6	% Infrastruktur daerah dalam kondisi baik	-	-	86,1	85,63	84,54

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan berhasil memenuhi seluruh kebutuhan jalan/jembatan, dalam artian kebutuhan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah baik jalan penghubung Kabupaten, kecamatan dan pedesaan dapat dipenuhi. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 88,14% mendekati target yang telah dicanangkan yaitu 90,5% sehingga capaian untuk indikator ini adalah 97,39%. Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 93,50% menjadi 91,47% dengan penurunan sebesar 2,03%. Hal ini disebabkan karena beban tonase kendaraan di jalan bertambah dan tidak dibatasi, Lalu lintas Harian Rata-Rata (LHR) tiap tahun bertambah, juga cuaca, dalam hal ini panas relatif lama kemudian turun hujan juga mempengaruhi kondisi jalan, kurangnya Drainase

yang mengakibatkan genangan air yang juga berpengaruh pada peningkatan kerusakan permukaan jalan.

Panjang jalan kabupaten pada tahun 2016 sepanjang 3.171,190 km adalah terdiri dari jalan kabupaten dan jalan desa, setelah dilakukan validasi data jalan tahun 2017 panjang jalan kabupaten yang hasilnya menjadi 1.224,20 km dan ruas jalan yang semula 472 ruas jalan menjadi 361 ruas jalan. Hal ini disebabkan karena terdapat overlapping penamaan ruas jalan dan penyesuaian panjang ruas jalan.

Selain Indikator jalan dalam kondisi baik, persentase Jembatan kabupaten dalam kondisi baik meningkat menjadi 80,95%. Indikator tersebut justru mengalami peningkatan sejumlah 0,03% dari tahun 2017. Peningkatan Persentase tersebut hasil dari Pembangunan Jembatan baru sejumlah 1 unit dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan sejumlah 33 unit jembatan yang sudah ada.

Sedangkan perkembangan Infrastruktur daerah dalam kondisi baik. Yang dimaksud Infrastruktur disini adalah jalan dan jembatan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sudah dilaksanakan. Pada tahun 2018 dari target 90 persen, dapat direalisasi 84,54 persen dengan capaian 93,94 persen adalah suatu angka yang tinggi. Namun terjadi penurunan infrastruktur dari tahun 2017 ke tahun 2018. Hal tersebut disebabkan terutama disebabkan oleh infrastruktur jalan yaitu beban tonase kendaraan di jalan bertambah dan tidak dibatasi, Lalulintas Harian Rata-Rata (LHR) tiap tahun bertambah, juga cuaca dalam hal ini panas relatif lama kemudian turun hujan juga mempengaruhi kondisi jalan, kurangnya Drainase, yang mengakibatkan genangan air yang juga berpengaruh pada peningkatan tingkat kerusakan permukaan jalan. Sedangkan untuk infrastruktur jembatan khusunya dari tahun 2017 mengalami kenaikan jembatan dalam kondisi baik.

Adapaun perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang ditujukan dengan status Panjang jalan tahun 2016-2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.24
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Status dan Panjang jalan (Km):			
	a. Pusat	39.963	39.963	39.963

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
	b. Provinsi	79.616	79.616	79.616
	c. Kabupaten	3.171.190	1.224.20	1.224.20
2	Kondisi Jalan Kabupaten (Km) :			
	a. Baik	2.740.150	1.106.08	1.079.41
	b. Sedang	365.450	38.54	40.71
	c. Rusak	65.590	79.58	104.47
	d. Makadam/Tanah	40.570	-	-
3	Panjang jalan kabupaten (Km):			
	a. Jalan beraspal	3.171,190	1.224,20	1.224,20
	b. Jalan tidak beraspal	40,570	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Sementara itu, kondisi jalan kabupaten rusak mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 104.47 kilometer, hal ini disebabkan karena beban jalan bertambah dan tidak dibatasi, Lalulintas Harian Rata-Rata (LHR) tiap tahun bertambah, kurangnya Drainase, yang mengakibatkan genangan air yang juga berpengaruh pada peningkatan tingkat kerusakan permukaan jalan. Meskipun demikian, mulai tahun 2016 permukaan jalan kabupaten makadam sudah ditingkatkan menjadi jalan aspal.

b. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi dan Penanggulangan Banjir

Pembangunan infrastruktur irigasi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terlindunginya sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti kawasan hutan lindung, sempadan sungai, kawasan rawan bencana dan kawasan konservasi sehingga sistem penyangga kehidupan alam dan ekosistem terjaga dengan baik. Persentase bangunan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kondisi stabil dengan pencapaian 74,19%. Kinerja pelayanan irigasi dan penanggulangan banjir diukur menggunakan 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.25
KINERJA PELAYANAN IRIGASI DAN PENANGGULANGAN BANJIR
TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Bangunan irigasi kondisi baik	74,19	74,19	74,19
2	Panjang irigasi kondisi baik	87,06	77,74	73,09
3	Panjang tanggul sungai kondisi baik	61,19	61,33	61,33

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Untuk mendukung program ketahanan pangan yaitu peningkatan swasembada pangan dilakukan dengan rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pekerjaan fisik perbaikan atau pemeliharaan jaringan irigasi pada tahun 2018 direncanakan dapat meningkatkan pelayanan jaringan irigasi. Pencapaian indikator tersebut didukung Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi dengan menghasilkan Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik sepanjang 9.515,18 meter

Untuk indikator panjang irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2017 mencapai 77,74%, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 73,09%. Hal tersebut dikarenakan metode hitung yang berbeda. Pada tahun 2017 metode hitung yang digunakan belum memasukkan Rekapitulasi Kerusakan Jaringan Irigasi dalam kurun waktu terakhir, dan baru dimasukkan pada Rekapitulasi Kondisi Jaringan Irigasi pada tahun 2018. Hal tersebut mengakibatkan prosentase turun dari tahun 2017.

TABEL 2.26
PERKEMBANGAN BANGUNAN IRIGASI DAN AREAL SAWAH
TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
A.	BANGUNAN IRIGASI (Unit):			
1	Bendung Tetap	284	284	284
2	Bendung Gerak	21	21	21
3	Bangunan Cekdam	54	54	54
4	Bangunan Bagi	90	90	90
5	Bangunan Bagi Sadap	112	112	112
6	Bangunan Sadap	391	391	391
7	Bangunan Ukur	821	821	821
8	Bangunan Talang	56	57	57
9	Bangunan Shypon	40	40	40
10	Bangunan Terjun	80	80	80
11	Gorong-gorong	447	449	449
12	Lain-lain	178	178	178
	JUMLAH	2.574	2.577	2.577
B	AREAL SAWAH (Hektar/Ha) :			
1	Sawah Teknis	39,251	39,251	39,251

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
	a. Pusat	9.136	9.136	9,136
	b. Provinsi	4.358	4.358	4,358
	c. Kabupaten	25.757	25.757	25,757
2	Sawah Setengah Teknis	2.519	2.519	2.519
	a. Pusat	-	-	-
	b. Provinsi	-	6	-
	c. Kabupaten	2.519	2.513	2.519
3	Sawah Sederhana/belum teknis	6.055	6.055	6.055
	a. Pusat	-	-	-
	b. Provinsi	-	199	-
	c. Kabupaten	6.055	5,856	6.055
	JUMLAH	47,825	47,825	47.825

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Beberapa embung beserta lokasi pembangunan yang ada di Kabupaten Kediri yaitu embung Guworejo di kecamatan Tarokan, embung Kucur-kucur di desa Selopanggung, embung Kalibago di desa Kalipang, embung igir-igir di desa Joho kecamatan Semen.

Beberapa embung beserta lokasi pembangunan yang ada di Kabupaten Kediri yaitu embung Guworejo di Kecamatan Tarokan, embung Kucur-kucur di Desa Selopanggung, embung Kalibago di Desa Kalipang, embung igir-igir di Desa Joho Kecamatan Semen.

Pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya telah meningkatkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik, sehingga jaringan irigasi berfungsi lebih maksimal. Pada gilirannya hal ini mendorong masyarakat memanfaatkan lahannya secara aktif dan lebih produktif. Jumlah sawah teknis tahun 2016 sampai tahun 2018 masih dalam kondisi stabil yaitu sejumlah 25.757 hektar. Sedangkan untuk areal sawah setengah teknis tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tetap sama yaitu 2.519 hektar.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2016-2018) areal sawah sederhana/belum teknis pada tahun 2018 kembali meningkat 199 hektar sehingga luasnya mencapai 6.055 hektar. Untuk sawah setengah teknis seluas 6 hektar

dengan lokasi di Balowerti merupakan pengalihan status dari Pemerintah Daerah ke Provinsi Jawa Timur. Adanya alih status dari Pemerintah Daerah ke Provinsi untuk sawah sederhana seluas 199 hektar dengan lokasi daerah irigasi yaitu Sumber Tapan (74 hektar), Betis Ngreco (10 hektar), Urung-urung (22 hektar), Munengan (50 hektar) dan Glodok (43 hektar). Pada tahun 2016-2018 panjang saluran primer/induk dan saluran sekunder tidak mengalami perubahan. Adapun data lebih terinci tentang saluran irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Kediri sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.27
PANJANG SALURAN IRIGASI TAHUN 2016 - 2018**

No	URAIAN	TAHUN			<i>(meter)</i>
		2016	2017*	2018**	
1	Saluran Primer/Induk :	788,900	788,900	788,900	
	a. Pusat (Primer)	49,324	49,324	49,324	
	b. Provinsi (Primer)	10,596	10,596	10,596	
	c. Kabupaten (Kali)	728,980	728,980	728,980	
2	Saluran Sekunder :	310,800	310,800	310,800	
	a. Pusat	109,975	109,975	109,975	
	b. Provinsi	25,996	25,996	25,996	
	c. Kabupaten	174,829	174,829	174,829	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Penyelenggaraan urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dengan tujuan mengarahkan tataran kebijakan penataan ruang baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang/rencana detail tata ruang, sedangkan untuk tataran pengendalian teknis implementatif pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Bagian Administrasi Pemerintahan. Dalam mendukung keberlangsungan kegiatan perekonomian masyarakat perlu adanya kawasan yang dikelola secara optimal melalui penataan ruang sebagai upaya mendukung keberlangsungan kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. Rencana tata ruang selain sebagai pedoman untuk menjaga konsistensi arah pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan, juga dapat menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi, efisiensi dan terkendali dengan program-program pembangunan.

Penataan ruang di Kabupaten Kediri diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai suatu kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan keadaan lingkungan alam/sumber daya alam, lingkungan buatan/binaan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan dan pengelolaan pembangunan yang dikaitkan dengan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang tersedia.

Adapun, Indikator % Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 85% mengalami peningkatan menjadi 100% ditahun 2018. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Rencana Tata Ruang.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diarahkan pada ketersediaan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang handal dan berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai antara lain meningkatnya masyarakat terhadap air bersih, meningkatnya kepemilikan rumah layak huni, serta penurunan luasan kawasan kumuh. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

- a. Pengembangan perumahan;
- b. Lingkungan sehat perumahan;
- c. Pemberdayaan komunitas perumahan;
- d. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- e. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- f. Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan;
- g. Pembangunan dan pengembangan penyediaan air minum;
- h. Pembangunan saluran drainase;
- i. Pembangunan infrastruktur pedesaan;
- j. Pembangunan rumah sakit;

Capaian kinerja pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2016-2018 untuk masing-masing indikator sebagaimana pada tabel berikut

TABEL 2.28
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak	78,30	73,61	83,26
3	% KK yang memiliki rumah layak huni	-	70,45	72,43
4	% PJU dalam kondisi baik	-	80,00	83
5	Luasan kawasan Kumuh yang tertangani (Ha)	-	4,48	21,50
6	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS (Unit)	2	4	5
7	Kawasan Kumuh (Ha)	25,98	21,50	0,00
8	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	26.435	25.996	25.217

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak tahun 2018 adalah 83,26%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 73,61%. Selanjutnya persentase KK yang memiliki rumah layak huni meningkat dari tahun 2017. Peningkatan tersebut sebesar 1,98%. Tahun 2017 sebesar 70,45% meningkat tahun 2018 sebesar 72,43%. Selain itu, persentase PJU dalam kondisi baik meningkat dari tahun sebelumnya dari tahun 2017 sebesar 80% meningkat 3% di tahun 2018 menjadi 83%.

Capaian untuk indikator Luasan Kawasan kumuh yang tertangani meningkat sangat drastis di tahun 2018. Peningkatan tersebut sebesar 21,5 hektar. Luasan Kawasan kumuh yang tertangani di Kabupaten Kediri pada tahun 2018 menjadi sebesar 25,98 Ha, sedangkan tahun 2017 hanya sebesar 4,48 Ha. Pada tahun 2018 di Kabupaten Kediri sudah tidak ada lagi Kawasan kumuh, apabila dibanding dengan tahun 2017 dimana Kawasan kumuh sebesar 21,50 Ha. Rumah tidak layak huni pun mengalami penurunan pada tahun 2018. Dimana pada tahun ini rumah tidak layak huni di Kabupaten hanya sebesar 25.217 unit, menurun 779 unit dari tahun 2017.

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk menciptakan situasi yang aman, tenteram dan tertib. Dalam mendukung pencapaian kinerjanya, menggunakan 5 (lima) indikator penting yaitu : persentase penegakan

Perda/Perbup, persentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup, persentase jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti, cakupan patroli petugas Satpol PP per hari, dan cakupan demonstrasi yang berlangsung aman dan kondusif. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai program pokok antara lain :

- a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- b. Pemeliharaan Ketrampilan dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- c. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- d. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

Beberapa pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang ketenteraman, ketertiban umum sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.29
JUMLAH PELANGGARAN MENURUT JENIS PERATURAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2018

No	JENIS KASUS	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Pedagang Kaki Lima (PKL) Perda Nomor 6 Tahun 2003	348	330	130
2	Reklame Perda Nomor 8 Tahun 2003	2.444	2980	2055
3	Izin Usaha/HO Perda Nomor 2 Tahun 1999	256	85	-
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perda Nomor 6 Tahun 1999	398	180	127
5	Galian C Perda Nomor 14 Tahun 1998	7	9	11
Jumlah		3.636	3.406	2.882

Sumber : Satpol PP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dari tabel di atas bahwa di tahun 2018 jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah cenderung mengalami penurunan menjadi 2.882 kasus dibandingkan tahun 2017 sebesar 3.406 kasus. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan target 100%, didukung dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan berlaku meningkat. Penegakan peraturan daerah terutama ijin mendirikan bangunan dan HO serta Galian Golongan C tidak dapat dinilai sebagai buruknya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda terhadap setiap pelanggaran peraturan daerah diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap

peraturan daerah yang berlaku. Penanganan kasus demonstrasi di Kabupaten Kediri masih dalam situasi aman dan kondusif. Adapun kegiatan dalam usaha meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah melalui : pembinaan terhadap masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha, Sosialisasi Perda dan Perbup, serta optimalisasi kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui bimtek atau pelatihan.

Capaian kinerja dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Bupati (Perbup) pada tahun 2018 seperti pada tabel berikut :

**TABEL 2.30
CAPAIAN KINERJA PENANGGANAN PELANGGARAN PERDA/PERBUP
TAHUN 2018**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	% Penegakkan perda dan perbup	100	100	100
2	% Pelanggaran perda/perbup yang ditindaklanjuti	41,2	41,6	40,06

Sumber : Satpol PP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Di samping melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja juga menangani penanggulangan terhadap bahaya kebakaran. Berkembangnya kawasan perumahan di Kabupaten Kediri akan berimplikasi pada resiko terjadinya bencana kebakaran sehingga memunculkan sistem proteksi kebakaran dan pencegahan dini terhadap bencana kebakaran. Salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya kebakaran adalah melalui pengaturan manajemen penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung, perumahan dan lingkungan. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mengantisipasi, menjaga dan mencegah terjadinya bencana kebakaran. Tentu saja pelayanan penanggulangan dan penanganan bencana kebakaran yang tepat waktu oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri menjadi faktor kunci atas keberhasilan meningkatnya kualitas penanganan kebakaran. Adapun capaian indikator kualitas penanganan kebakaran selama tahun 2016-2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.31
CAPAIAN KUALITAS PENANGGANAN KEBAKARAN
TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Kasus kebakaran yang direspon kurang dari 15 menit	15	15	26,4
2	% Gedung, pasar/plasa yang memiliki sistem pengaman kebakaran sesuai standar	30	30	24
3	% Peningkatan jumlah sarana prasarana PMK	6,87	25,00	42,6

Sumber : Satpol PP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

2.1.3.1.6 Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan untuk menjunjung tinggi semangat pemberdayaan (*empowerment*) yang bertujuan membebaskan masyarakat dari belenggu ketidakmampuan, tak berketerampilan (*unskill*), keterbelakangan dan kemiskinan. Pada tataran operasional, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpenciran, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Adapun program pokok yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri pada tahun 2018 adalah;

1. Rehabilitasi Sosial;
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Pemberdayaan Sosial;
4. Penanggulangan Kemiskinan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di bidang sosial merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial, adapun tupoksi urusan pemerintahan daerah di bidang sosial meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Keberhasilan atas pelaksanaan program pembangunan bidang sosial, dapat dilihat dari meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan sosial sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.32
CAPAIAN KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN SOSIAL
TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% PMKS yang ditangani	8,34	21,61	27,01
2	% PMKS yang memperoleh bantuan sosial - Dana APBD Kab. Kediri	0,037	0,23	0,397
3	% Jumlah PSKS yang di berdayakan	12,09	69,31	58,96
4	% Penduduk Miskin	12,72	12,25	11,31

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dalam tiga tahun terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri pada tahun 2018 sebesar 11,31% yang apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,94%.

Pada tahun 2018 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kediri adalah 746.248 orang, sedangkan PMKS yang diberi bantuan melalui APBD Kabupaten Kediri adalah 2.966 orang, maka capaian kinerja IKU (Indikator Kinerja Utama) meningkatnya pemberian bantuan untuk PMKS tahun 2018 adalah 0,397 orang. Pada tahun 2018 terdapat pergeseran atau review IKU di Dinas Sosial Kabupaten Kediri.

Penanganan PMKS pada tahun 2018 sebesar 27,01% apabila dibanding tahun 2017 penanganan PMKS sebesar 21,61% ada peningkatan sebesar 5,4 %. Sementara itu, untuk persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari dana APBD Kabupaten Kediri terus meningkat pada tiap tahunnya.

Pada tahun 2018 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat menjadi sebesar 0,397 %. Adapun untuk indikator persentase Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan justru menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 realisasinya sebesar 69,31% menurun pada tahun 2018 menjadi 58,96%. Penurunan ini terjadi disebabkan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang belum memenuhi target. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh partisipasi dari klien yang kurang berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut:

TABEL 2.33
PERKEMBANGAN PMKS TAHUN 2016 - 2018

(orang)

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
A	PMKS :			
1.	Anak balita terlantar	8	5	5
2.	Anak terlantar	406	435	169
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	68	62	128
4.	Anak jalanan	184	75	134
5.	Anak dengan ketidakstabilan	1.829	1.448	667
6.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	49	14	36
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	192	202	169
8.	Lanjut usia terlantar	2.507	2.668	2.291
9.	Penyandang disabilitas	3.965	2.556	4.281
10.	Tuna Susila	207	935	857
11.	Gelandangan	152	103	68
12.	Pengemis	164	15	188
13.	Pemulung	490	468	429
14.	Kelompok minoritas	167	156	80
15.	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	715	725	805
16.	Orang dengan HIV/AIDS	1.032	1.338	1.500
17.	Korban penyalahgunaan Napza	233	221	324
18.	Korban trafficking	9	1	22
19.	Korban tindak kekerasan	186	40	156
20.	Pekerja Migran bermasalah sosial	62	30	86
21.	Korban bencana alam	167	41	52
22.	Korban bencana sosial	13	-	7
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	42.686	3.340	4.772
24.	Fakir miskin (*)	483.349	575.293	725.751
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	750	556	3.271
26.	Komonitas Adat Terpencil	-	-	-
	Jumlah (A)	539.590	590.727	746.248
B	Jumlah penduduk	1.566.598	1.575.536	1.649.426
C	% PMKS (A:B)	34,44	37,49	45,24

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kediri.

(*) Fakir Miskin = DBT per tgl 31 Mei 2018

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Upaya menekan jumlah PMKS terus dilakukan mengingat permasalahan sosial bersifat kompleks dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan melalui lintas sektor. Permasalahan pokok yang memerlukan penanganan komprehensif adalah membangkitkan motivasi para PMKS (akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial) dalam melepaskan diri dari permasalahan sosial yang dihadapi, karena pada umumnya para PMKS menilai sudah tidak memiliki peluang (*hopeless*) untuk hidup berkelayakan. Secara keseluruhan jumlah PMKS di

Kabupaten Kediri ditahun 2018 sebesar 746.248 jiwa. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama Fakir Miskin di Kabupaten Kediri sejumlah 725.751 orang/Anggota Rumah Tangga ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 71/HUK/2018 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan orang Tidak Mampu Tahun 2018. Data tersebut merupakan Basis Data Terpadu (BDT) yang berisikan 40 % penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah 40 % jumlah penduduk yang ada dalam BDT adalah persentase secara nasional. BDT bukan basis data kemiskinan, BDT adalah basis data yang memuat nama dan alamat penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sosial kepada PMKS dilakukan agar PMKS memiliki keberdayaan untuk mengentaskan diri dari permasalahan sosial yang dihadapi. Penanganan PMKS dengan pemberian bantuan sosial pada tahun 2018 meliputi penyantunan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi dan penyantunan lansia/jompo. Sedangkan penanganan PMKS dengan pemberian pelatihan terdiri dari : pelatihan ketrampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar (termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal), pembinaan alih profesi eks lokalisasi, pengiriman anak calon tetirah, ketrampilan eks korban narkotika dan diklat bagi anak putus sekolah dipanti sosial remaja terlantar (PSRT). Keberadaan/ketersediaan panti sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah mendukung proses percepatan pengentasan pada PMKS. Perkembangan panti sosial selama tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.34
PERKEMBANGAN PANTI SOSIAL DAN PENGHUNI
TAHUN 2016 - 2018**

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Panti (Unit)	52	51	52
2.	Penghuni (Orang)	4.875	1.020	1.020

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Selanjutnya data potensi dan sumber kesejahteraan sosial selama tiga tahun terakhir yang pendataannya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sperti tabel berikut :

TABEL 2.35
DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
TAHUN 2016 - 2018

No	JENIS POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Pekerja sosial professional	2	2	2
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	344	344	344
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	20	36	31
4	Lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	52	51	52
5	Karang Taruna	344	371	371
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1
7	Keluarga Pioner	344	-	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	3	-	1
9	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	26	26	451
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	26	26	451
11	Dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial	137	-	5
JUMLAH		1.299	857	1.284

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ditahun 2018 tidak ada keluarga pioner disebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk menjadi keluarga pioner. Sedangkan dengan adanya keluarga pioner di desa mampu mengatasi permasalahan sosial dengan cara yang lebih efektif. Namun kedepannya akan terus disosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga pioner

2.1.3.2 Wajib Bukan Layanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan perekonomian, semakin tinggi kualitas dan produktivitas tenaga kerja akan berpengaruh output yang dihasilkan dalam proses produksi. Tenaga kerja memiliki peran penting ditengah upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran dan menjaga keseimbangan antara permintaan tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang ada di daerah.

Perkembangan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri diarahkan pada upaya peningkatan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja. Adapun Program Pembangunan urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain :

- a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Penempatan tenaga kerja;
- c. Hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. Perlindungan tenaga kerja;

Kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan pada tahun 2018 dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, serta meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Perkembangan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja tahun 2016–2018 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.36
CAPAIAN MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA DAN
KESEMPATAN KERJA TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Penurunan angka pengangguran	37,75	32,10	-28,11
2	% Tingkat penyerapan angkatan kerja	95,05	94,39	96,82
3	Jumlah pencari kerja yang dilatih (orang)	2.815	2.913	4.448
4	% Pencari kerja yang ditempatkan	95,16	90,55	94,10

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Adapun perkembangan data ketenagakerjaan di kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir terlihat pada Tabel dibawah ini berikut :

TABEL 2.37
PERKEMBANGAN DATA KETENAGAKERJAAN TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
A.	Data Ketenagakerjaan (orang) :			
1.	Lowongan Kerja	10.004	10.134	10.902
2.	Pencari Kerja Terdaftar	10.312	10.421	10.248
3.	Penempatan Tenaga Kerja	9.243	9.436	9.643
4.	Angkatan Kerja	809.072	853.996	818.385
5.	Angkatan Kerja Tertampung	769.061	826.827	783.578
6.	Penduduk Usia Kerja	1.189.952	1.199.531	1.208.769
7.	Pengangguran Terbuka	40.011	27.169	34.807
B.	Upah Minimum Kerja Kab. Kediri (Rp/bulan)	1.135.00	1.576.120	1.713.400
C.	Pengangguran :			
1.	Angka pengangguran (A7 : A4)	4,95	3,18	4,25
2.	% Penurunan angka pengangguran (angka tahun lalu – tahun ini x 100%)	1,4	1,77	-1,07
D.	Penempatan Tenaga Kerja :			
1.	% Penempatan tenaga kerja (A3 : A2)	89,63	90,55	94,10
2.	Lowongan kerja tidak terisi (A1 – A3)	761	698	880
3.	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia : a. Laki-laki b. Perempuan	2.355 857 1.498	2.593 871 1.722	4.142 854 3.288

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Sebagaimana pada tabel diatas, perkembangan data ketenagakerjaan jumlah lowongan kerja pada tahun 2018 sebanyak 10.902 lowongan merupakan jumlah lowongan dari adanya kegiatan Bursa Kerja, Bursa Kerja Mini dan lowongan yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kediri dalam kurun tahun 2018.

Pencari Kerja Terdaftar sebanyak 10.248 orang adalah jumlah yang mencari kerja dari data AKI dan juga TKI yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri. Untuk Penempatan Tenaga Kerja tahun 2018 sebanyak 9.643 orang termasuk Penempatan Luar Negeri TKI sebanyak 4.142 orang dan sisanya penempatan melalui Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL). Angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas)

yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja bergantung pada penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas. Secara keseluruhan angkatan kerja pada tahun 2018 sebanyak 818.385 orang. Sementara itu, upah minimum kerja Kabupaten Kediri pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.713.400,00 / bulan. Sedangkan untuk persentase penempatan kerja, sebesar 94,10% angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan sudah menempati lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja

Gambaran capaian kinerja perlindungan terhadap tenaga kerja selama tahun 2016–2018 terlihat sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.38
PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TAHUN 2018

(persen)

No	INDIKATOR	T A H U N		
		2016	2017*	2018
1	% Kepatuhan perusahaan terhadap norma Jamsostek	97,17	95,85	88,03
2	% Perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	90,91	92,79	92,05
3	Angka kecelakaan kerja (kejadian)	45	50	26
4	% Penurunan angka kecelakaan kerja	36,36	38	24
5	% Perusahaan yang menerapkan UMK (bagi perusahaan yang wajib/seharusnya menerapkan UMK)	99,87	99,87	99,76
6	% Pemberlakuan peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	37,65	27,39	40
7	% Kepatuhan atas ketentuan mengenai kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit	66	62	56
8	% Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Tripartit)	92,31	92,31	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada perusahaan – perusahaan yang meliputi pembinaan sarana hubungan industrial, norma ketenagakerjaan, pembinaan dan penyuluhan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Langkah – Langkah pembinaan dan penyuluhan ini perlu terus dilakukan guna untuk menekan jumlah kecelakaan kerja, meningkatkan kepatuhan perusahaan pada norma Jamsostek maupun norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pada tabel Perkembangan Perlindungan Tenaga Kerja Tahun 2017 sampai dengan 2018, memperlihatkan keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri, Indikator kinerja yang tergolong menunjukkan keberhasilan capaian kinerja dari tahun 2018 ini meliputi :

- Persentase kepatuhan terhadap norma Jamsostek yaitu dari 1.270 perusahaan yang ada sebanyak 1118 perusahaan yang telah memenuhi norma Jamsostek.
- Persentase perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dari 1.270 perusahaan yang ada 1.169 perusahaan yang telah memenuhi norma K3.
- Angka Kecelakaan Kerja menurun dari 50 menjadi 26 kejadian, tahun 2018 persentase penurunan angka kecelakaan kerja sebesar 92,3 %
- Persentase perusahaan yang seharusnya menerapkan UMK sesuai dengan UMK yang berlaku sebesar 99,76% diantara 741 perusahaan yang ada, 1270 perusahaan telah menerapkan UMK dan ada 3 perusahaan yang melakukan penangguhan dalam pelaksanaan UMK.
- Persentase pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) naik menjadi 40% dari 300 perusahaan yang wajib PP/PKB sudah 120 perusahaan yang telah memiliki PP/PKB,
- Persentase Kepatuhan atas ketentuan Lembaga Kerjasama Bipartit naik menjadi 56% dari 50 perusahaan yang wajib terdapat 28 perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit,
- Persentase penyelesaian hubungan industrial 100% kasus perselisihan yang masuk ada 10 kasus dan 10 kasus dapat diselesaikan melalui

Mediator itu menggambarkan bahwa tingkat pemahaman para pelaku hubungan industrial dalam hal penyelesaian perselisihan cukup baik..

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas hidup serta kesadaran dan keadilan gender, serta terhapusnya segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Penyelenggarannya dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Program yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A adalah :

- a. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- c. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- d. Peningkatan peran perempuan di perdesaan.

Perkembangan program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama tahun 2016-2018 diukur dari meningkatnya partisipasi perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.39
CAPAIAN MENINGKATNYA PARTISIPASI PEREMPUAN SERTA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN
TAHUN 2014 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	% Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah	50,40	51,16	50,35	55,51	57,61
2	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga DPRD (Orang)	13	13	13	13	13
3	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0,020	0,026	0,0098	0,0143	0,00090
4	% Kasus KDRT yang ditangani	95	108	100	100	100
5	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif	1	1	1	1	1
6	% Peningkatan peran kader wanita	100	100	100	100	100

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
7	% Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	100	100	100	100	100
8	% Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100	100	100	100	100

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Secara umum, partisipasi dan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkat seiring dengan kemudahan akses informasi, interaksi antar penduduk yang semakin terbuka, disamping inisiasi melalui program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Partisipasi perempuan (bekerja) dalam lembaga pemerintahan yang semakin meningkat selama tahun 2016 - 2018 dan jumlah perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kediri sebanyak 13 orang atau 26% dari seluruh anggota DPRD.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan dan kompetensi perempuan untuk menduduki jabatan/fungsi publik semakin meningkat. Hal tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan – kegiatan inisiasi Pemerintah Kabupaten Kediri melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terutama : terbinanya kelompok Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), pelatihan kewirausahaan berwawasan gender bagi pelaku wirausaha perempuan; Sosialisasi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Bimbingan teknis Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) dengan mengadakan pelatihan secara multi level training (MLT) dan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan untuk mempromosikan hasil karyanya melalui pameran pembangunan di kabupaten Kediri.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama tahun 2016 – 2018 mengalami fluktuatif. Jumlah kasus KDRT tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 di Kabupaten Kediri mengalami penurunan dari 70 kasus ditahun 2017 turun menjadi 56 kasus ditahun 2018 dari 56 kasus yang melapor 100% dan kasusnya

sudah di tangani. Data tahun 2018 diperoleh dari Dinkes, RSUD Kab Kediri, RS Bhayangkara, Polres, Polresta.

2.1.3.2.3 Pangan

Pembangunan ketahanan pangan pada tataran implementasi secara teknis adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani dalam membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, melalui pengembangan sistem usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. Terkait dengan upaya ketahanan pangan pemerintah daerah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sedangkan masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, serta terjangkau sesuai dengan daya beli.

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) melalui program-program antara lain:

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan
- b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- c. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- d. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- e. Pengembangan Perbibitan Peternakan.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) adalah:

- a. Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan yang aman.
- b. Meningkatnya produktivitas dan populasi ternak.

Capaian kinerja pangan daerah meliputi nilai pola pangan harapan, rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun) dan peningkatan produksi peternakan sebagaimana tabel dibawah.

TABEL 2.40
CAPAIAN INDIKATOR PANGAN DAERAH TAHUN 2018

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI RPJMD TAHUN 2016-2021	2016	2017*	2018**
1.	Nilai Pola Pangan Harapan	87,9	88,1	88,7
2.	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	137,22	132,65	138,24
3.	%Peningkatan produksi peternakan daging	0,14	0,88	4,01
4.	% Peningkatan produksi peternakan Telur	0,37	6,21	0,67
5.	% Peningkatan produksi peternakan Susu	0,31	18,77	2,56

Sumber : DKPP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator kualitas konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, pangan hewani, gula dan lain-lain). Pola Pangan harapan (PPH) dapat diartikan sebagai komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. PPH dapat dinyatakan dalam bentuk komposisi energi (kalori) aneka ragam pangan dan/atau dalam bentuk komposisi berat (gram atau kg) aneka ragam pangan yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk. PPH mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Skor PPH tahun 2018 sebesar 88,7, meningkat dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Ini menunjukkan pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kediri sudah bergerak ke arah konsumsi yang lebih beragam dan seimbang.

Capaian kinerja urusan pangan digambarkan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.41
CAPAIAN KINERJA KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016 - 2018

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
A. Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan yang aman				
1	Ketersediaan energi dan protein per kapita (kal/kapita/hari)	-	3.526,80 dan 93,55	3698,51 dan 77,67
3	Jumlah cadangan pangan utama (ton)	-	113,96	189,3

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
4	Persentase wilayah rawan pangan (%)	1,16	1,16	0
5	Persentase wilayah bebas rawan pangan (%)	-	89,83	89,83
6	Stabilitas harga pangan utama di tingkat produsen (%)	-	100	100
7	Stabilitas harga pangan utama di tingkat konsumen (%)	-	2,94	4,25
8	Jumlah konsumsi pangan (sayuran dan buah) (gram/kapita/hari)	-	250	249
9	% Pangan segar yang aman	-	93,33	100
B. Meningkatnya produktivitas dan populasi ternak				
1	Produktivitas ternak			
	- Service per Conception (SC)	1,16	1,20	1,20
	- Conception Rate (CR) (bulan)	14	14	13,5
	- Calving Interval (CI) (%)	86,44	80,10	81,50
2	Jumlah Populasi Ternak (ekor)			
	- Sapi potong	212.376	223.216	230.020
	- Sapi perah	9.766	10.167	10.380
	- Kambing	139.369	141.670	143.092
	- Domba	43.322	43.668	44.062
	- Ayam buras	1.311.990	1.333.712	1.347.603

Sumber : DKPP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Capaian indikator kinerja DKPP pada tahun 2018 berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan yang aman

Rata-rata ketersediaan pangan utama per penduduk menggambarkan jumlah beras yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri per hari untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Ketersediaan pangan utama dipengaruhi oleh jumlah produksi beras, keluar masuknya beras dari dan ke luar Kabupaten Kediri, stok akhir bulog serta jumlah penduduk Kabupaten Kediri. Pada akhir tahun 2018 diperoleh jumlah ketersediaan pangan utama sebanyak 138,24 kg/kapita/tahun. Selanjutnya, DKPP Kabupaten Kediri berperan memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/ penggilingan.

Perkembangan ketersediaan setara beras selama 3 (tiga) tahun terakhir digambarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.43
KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN SETARA BERAS
TAHUN 2016 - 2018

No.	URAIAN	TAHUN			<i>(kg/kapita/tahun)</i>
		2016	2017*	2018**	
1	Padi	137,22	132,65	138,24	
2	Jagung	82,47	106,46	217,12	
3	Ubi Kayu	23,38	31,01	99,26	
4	Ubi Jalar	1,96	1,52	6,62	
5	Kacang Tanah	5,10	4,47	1,77	
6	Kedelai	0,51	0,19	19,17	

Sumber : DKPP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Ketersediaan bahan pangan setara beras menggambarkan ketersediaan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai yang dikonversi menjadi setara beras. Dalam tabel terlihat ketersediaan padi pada tahun 2018 setara dengan 138,24 kg/kapita/tahun ketersediaan beras. Dari tahun 2016 sampai 2018, ketersediaan padi setara beras cenderung stabil yaitu selalu berada di atas 130 kg/kapita/tahun. Untuk jagung terjadi peningkatan ketersediaan yang signifikan dibandingkan tahun 2017. Ini disebabkan meningkatnya harga jual jagung sehingga meningkatkan minat petani untuk menjadikan jagung menjadi komoditas utama yang ditanam. Dengan meningkatnya luasan tanaman jagung, produksi pun bertambah. Demikian juga dengan ketersediaan ubi kayu setara beras tahun 2018 mengalami peningkatan cukup tinggi dikarenakan meningkatnya produksi yang dihasilkan petani sebagai efek harga jual yang cukup bagus sehingga petani tertarik bertanam ubi kayu. Ketersedian ubi jalar dan kedelai pada tahun 2018 mengalami peningkatan cukup signifikan akibat meningkatnya luasan tanaman. Sedangkan pada komoditas kacang tanah, ketersediaan setara beras pada tahun 2018 ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Ini sangat dipengaruhi dengan berkurangnya minat petani untuk bertanam komoditas tersebut, yang secara langsung berdampak pada penurunan jumlah produksi.

b. Meningkatnya produktivitas dan populasi ternak

Persentase peningkatan produksi peternakan menggambarkan seberapa besar kenaikan produksi tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Produksi peternakan yang dihitung meliputi produksi daging, telur dan susu. Pada tahun 2018, produksi daging mencapai 19.269,208 ton. Sedangkan produksi di tahun 2017 sebanyak 18.525,558 ton. Sehingga kenaikan produksi daging di tahun 2018 sebanyak 743,65 ton atau sebesar 4,01%. Dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 yang sebesar 0,68% maka capaian tahun 2018 sebesar 590,32% (kategori Sangat Baik). Untuk telur, pada tahun 2018 produksinya mencapai 84.676,547 ton. Sedangkan produksi di tahun 2017 sebanyak 84.109,081 ton, sehingga produksi telur di tahun 2018 naik sebanyak 567,466 ton atau sebesar 0,67%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 yang sebesar 0,87% maka capaian tahun 2018 sebesar 77,55% (kategori Baik). Produksi susu pada tahun 2018 mencapai 20.360,842 ton. Dibandingkan produksi di tahun 2017 yang sebanyak 19.852,959 ton, terjadi peningkatan produksi telur di tahun 2018 sebanyak 507,883 ton atau sebesar 2,56%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 yang sebesar 4% maka capaian tahun 2018 sebesar 63,96% (kategori Rendah). Kurang maksimalnya capaian peningkatan produksi susu dipengaruhi adanya perubahan angka parameter produktivitas untuk menghitung asumsi produksi susu dalam kilogram/ ekor/ tahun. Tahun 2016 diasumsikan produksi susu per ekor sapi perah sebanyak 2.880 kg/tahun, sedangkan mulai tahun 2017 parameter produktivitas berubah menjadi 3.366,7 kg/ekor/tahun. Ini mengakibatkan peningkatan produksi dari tahun 2016 ke tahun 2017 terhitung sangat tinggi. Sedangkan peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 terhitung cukup karena menggunakan angka parameter produktivitas yang sama. Meskipun capaian peningkatan produksi telur dan susu dibandingkan target tahun 2018 yang telah ditetapkan belum maksimal, namun telah terjadi kenaikan produksi dibanding tahun 2017. Adapun faktor pendorong keberhasilan meningkatnya produksi daging, telur dan susu dibandingkan tahun 2017 antara lain terus dilaksanakannya kegiatan peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan ruminansia dan non ruminansia serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan

bisnis yang mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing. Kegiatan tersebut masih akan terus dilaksanakan di tahun 2019 untuk menjaga tren positif peningkatan produksi peternakan di masa yang akan datang.

Adapun perkembangan produksi dan produktivitas peternakan selama 3 (tiga) tahun terakhir ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**TABEL 2.44
PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN
TAHUN 2016 - 2018**

No .	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Jumlah produksi peternakan (kg)			
	- Daging	18.363.948	18.525.558	19.269.208
	- Telur	79.189.950	84.109.081	84.676.547
	- Susu	16.088.899	19.108.014	20.360.842
2	Peningkatan produksi peternakan (%)			
	- Daging	14,11	0,88	4,01
	- Telur	37,48	6,21	0,67
	- Susu	31,25	18,77	2,56
3	Produktivitas ternak			
	- Service per Conception (SC)	1,16	1,30	1,26
	- Conception Rate (CR)	14	14	13,5
	- Calving Interval (CI)	86,44	80,10	81,50

Sumber : DKPP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

**TABEL 2.45
POPULASI HEWAN TERNAK TAHUN 2016 - 2018**

No.	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Sapi potong	212.376	223.216	230.020
2	Sapi perah	9.766	10.167	10.380
3	Kerbau	371	371	354
4	Kuda	286	285	278
5	Kambing	139.369	141.670	143.092
6	Domba	43.322	43.668	44.062
7	Babi	2.538	2.475	2.084
8	Ayam buras	1.311.990	1.333.712	1.347.603

No.	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
9	Ayam petelur	8.096.260	7.974.816	8.049.842
10	Ayam pedaging	2.786.652	11.280.929	11.445.032
11	Itik	234.440	239.128	243.158
12	Entog	54.995	55.545	56.103
13	Kelinci	11.201	11.346	11.480
14	Buruh puyuh	602.774	611.815	620.271
15	Merpati	21.393	21.693	21.976

Sumber : DKPP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2018 populasi hewan ternak terutama sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, kelinci, burung puyuh dan merpati cenderung meningkat. Ini tidak terlepas dari hasil upaya peningkatan populasi hewan ternak yang senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan, antara lain melalui pembinaan untuk peningkatan kompetensi SDM peternak dan kelompok ternak dalam rangka pengembangan peternakan berwawasan agribisnis, pengembangan teknologi peternakan, peningkatan sarana-prasarana pendukung pengembangan peternakan, optimalisasi inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi ternak serta pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak.

Secara umum, realisasi jumlah populasi ternak di Kabupaten Kediri dari tahun 2016 sampai 2018 dapat mencapai target yang ditetapkan. Untuk kuda, ayam petelur dan entog walaupun belum maksimal mencapai target namun masih termasuk kategori berhasil dengan prosentase capaian mendekati 100%. Untuk selanjutnya, penetapan target akan disesuaikan dengan kondisi yang ada serta diiringi dengan upaya peningkatan populasi ternak secara optimal.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di selenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersifat koordinatif karena urusan ini pada dasarnya masih ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri.

GRAFIK 2.12
PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Fasilitasi penyelesaian Konflik/kasus pertanahan	1	2	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri.

**) Angka diperbaiki, **) Angka sementara*

Kendati penyelesaian sertifikat pada tiga tahun terakhir jumlah relatif besar tetapi upaya – upaya sertifikasi tanah perlu terus digalakkan, mengingat jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat cukup banyak. Kepemilikan sertifikat tanah dapat meminimalkan terjadinya permasalahan – permasalahan pertanahan.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kehutanan, kebersihan dan Pertamanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan mewujudkan kualitas lingkungan yang lestari melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu. Pelestarian lingkungan hidup dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam, pencegahan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran, pencegahan perluasan lahan kritis, pelayanan persampahan dan peningkatan pertamanan untuk menunjang kualitas lingkungan hidup dalam mengantisipasi dampak pemanasan global (global warming) serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adapun capaian indikator lingkungan hidup lainnya meliputi persentase penurunan beban pencemaran lingkungan sebesar 3,025% dan Angka Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik Terbangun sebesar 10,28 Ha sebagaimana tabel dibawah.

TABEL 2.47
CAPAIAN INDIKATOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 - 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1. Menurunnya beban pencemaran lingkungan	Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan	2	2	3,025
2. Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Angka Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik Terbangun	9,071	10,111	10,285

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapa langkah strategi antara lain :

- Mewujudkan kebersihan kota dan jalan-jalan umum;
- Melaksanakan pengelolaan sampah;
- Mewujudkan penataan taman kota/RTHKP yang indah, bersih dan hijau;
- Pembangunan lampu dekoratif kota;
- Pemantauan/pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan bahan pencemar lingkungan;
- Melaksanakan konservasi daerah tangkapan air dan pencegahan tanah longsor dikawasan rawan longsor;
- Penyuluhan dan pelatihan tentang kepedulian terhadap lingkungan melalui bimtek pada masyarakat/PKK dan sekolah-sekolah (adiwiyata).

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup meliputi peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan penanganan persampahan dan peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Adapun target dan realisasinya sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Kabupaten Kediri merupakan wilayah agraris dan belum banyak industri besar yang memberikan dampak eksternalitas terhadap lingkungan. Industri yang ada didominasi oleh industri sedang dan kecil yang dikelola secara perorangan sehingga tingkat pencemarannya belum berdampak luas pada lingkungan. Untuk

mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan maka digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator. Tiga indikator sebagai dasar penilaian IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Perkembangan kualitas lingkungan tahun 2016-2018 sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.48
PERKEMBANGAN KUALITAS LINGKUNGAN TAHUN 2016 - 2018
(persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	59,00	58,89
2	Indeks kualitas udara (IKU)	-	80,06	80,92
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	-	57,00	56,90

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Indeks Kualitas Air yang diukur pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Hal ini disebabkan pertumbuhan industri yang pesat mengakibatkan meningkatnya pencemaran di badan air. Sedangkan Indeks Kualitas Udara pada tahun 2018 sebesar 80,92 mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya sebesar 80,06. Namun secara umum tingkat pencemaran air dan udara masih berada pada batas yang diizinkan. Pencapaian selanjutnya yaitu Indeks Tutupan Lahan (ITL) di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 56,90 dari tahun 2017 dikarenakan daerah/kawasan yang mengandung belukar dan sempadan jalan tidak termasuk dalam pengukuran ITL. Meskipun demikian Indeks Tutupan Lahan sudah melebihi target yang ditetapkan.

b. Peningkatan Penanganan Persampahan

Untuk mengukur capaian Sasaran ini digunakan indikator kinerja yaitu : persentase penanganan persampahan, persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah dan persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Adapun capaian perkembangan penanganan persampahan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.49
PERKEMBANGAN PENANGANAN PERSAMPAHAN TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Penanganan persampahan	20,61	20,26	43,35
2	% Luas cakupan permukiman yang	30,77	30,77	34,61

No	INDIKATOR	T A H U N		
		2016	2017*	2018**
	dilayani pengangkutan sampah			
3	% Volume sampah yang terangkut ke TPA	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Pada tahun 2018 pencapaian persentase penanganan persampahan sebesar 43,35%, persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah sebesar 34,61% dan persentase volume sampah yang tersangkut ke TPA sebesar 100%.

Pada tahun 2017 capaian kinerja penanganan persampahan mencapai 20,26% hal ini dikarenakan perhitungan timbulan sampah didasarkan pada jumlah penduduk daerah layanan saja dan dihitung berdasarkan volume sampah per hari. Sedangkan pada tahun 2018 didasarkan pada amanah Jakstrada yang merupakan program dari Kementerian LHK dan wajib diikuti Pemerintah Daerah. Sehingga formulasi indikator penanganan persampahan disesuaikan dengan kewajiban Jakstrada.

c. Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Sasaran meningkatnya luasan RTHKP indikator kinerjanya adalah angka luasan RTHKP. Formulasinya berupa angka komulatif luasan RTHKP terbangun/terkelola. Capaian indikator kinerja Angka luasan RTHKP adalah 10,285 Ha dari yang ditargetkan 9,002 Ha. Hal ini karena pada tahun 2016 ada penambahan luasan taman yang dibangun berupa plint taman kawasan SLG dan Pare serta penambahan taman aktif (Taman Hijau SLG) yang dibangun oleh Kantor Lingkungan Hidup. Jika dilihat dari capaian luasan dapat disimpulkan telah melebihi target.

Sedangkan pada tahun 2017 terdapat penambahan luasan RTHKP terbangun seluas 1,040 Ha berupa taman aktif yaitu Taman Ngadiluwih. Pada tahun 2018 terjadi penambahan luasan RTH yaitu taman Kepung seluas 1.542M2 atau 0,1542 Ha Dari jumlah luasan RTHKP didapatkan capaian yang cukup tinggi yaitu 114,25%.

Berdasarkan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM bahwa luas penyediaan RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Jika dihitung dari luas kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Kediri maka luasan RTHKP

yang dikelola DLH sebesar 0,12%. Hal tersebut karena RTH yang dikelola DLH hanya berupa RTH kawasan perkotaan berupa taman dan taman plint jalan.

Pada tahun 2017 luas RTHKP publik terbangun sebesar 10,111 Ha. Dengan demikian terdapat peningkatan luasan sebesar 1,040 Ha atau 11,46 % dari tahun 2016. Pada tahun 2018 terdapat peningkatan luasan sebesar 0,1542 Ha, jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka terjadi peningkatan luasan sebesar 1,72%, jika dibandingkan dengan tahun 2016 didapatkan peningkatan sebesar 13,38%.

Pada tahun 2018 diprioritaskan pada peningkatan kualitas taman yang telah ada yaitu Hutan Kota, Taman Tugu batas sebanyak 5 lokasi, dan Taman Ringin Budho serta upaya mempercantik wajah kota melalui kegiatan penataan dekorasi kota. Untuk peningkatan luasan diprioritaskan pada taman di Ibu Kota Kecamatan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ruang publik bagi masyarakat yang jauh dari kawasan Pare dan SLG yang sedianya sebagai pusat Kota.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi, penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Sedangkan untuk implementasi pencapaian misi program dan kegiatannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Penduduk. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan pada tahun 2018 dinyatakan baik dengan nilai SKM 80,02 dan angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya (2017) yaitu hanya sebesar 77,42.

Capaian kinerja dalam peningkatan administrasi kependudukan sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.50
PERSENTASE CAPAIAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Kepemilikan KTP EL	98.40	96.09	99,67
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	Sudah
3	% Penduduk wajib KK yang memiliki KK	97.20	89.77	89,03

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
4	% KK yang disediakan dalam waktu 1 hari	1.12	90.00	100
5	% Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	98.40	96.09	99,67
6	% KTP yang diselesaikan dalam waktu 1 hari	1.39	70.00	100
7	% Penduduk yang berakta kelahiran	64.16	31.00	34,97
8	% Bayi berakta kelahiran	90.64	99.00	99,37
9	% Akta kelahiran yang diselesaikan dalam waktu 1 hari	55.17	95.00	100
10	Pasangan berakta perkawinan/surat nikah	320.00	356.00	452
11	% Akta perkawinan/surat nikah yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari	100	100	100
12	% Penduduk meninggal berakta kematian	14.22	54.00	23,55
13	% Survei Kepuasan Masyarakat	-	Baik (77,42)	Baik (80,02)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dengan adanya berbagai inovasi pelayanan yang dilaksanakan di Dispendukcapil Kabupaten Kediri diharapkan menimbulkan beberapa perubahan baik dalam pelayanan maupun waktu pelaksanaan pelayanan. Dengan sistem dan program baru diharapkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan secara efektif dan lebih efisien. Kondisi ini berimplikasi pada data indikator capaian keberhasilan di bidang administrasi kependudukan seperti persentase penduduk terhadap kepemilikan KTP, KK dan persentase penduduk berakta kelahiran serta kepemilikan dokumen kependudukan lainnya. Adapun data kuantitatif perkembangan administrasi penduduk tahun 2016-2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.51
PERKEMBANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN 2016 - 2018
(lembar)

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Pelayanan Akta Catatan Sipil:			
	a. Akta Kelahiran	29.268	39.605	34,454
	b. Akta Perkawinan	305	356	452
	c. Akta Kematian	1.755	1.132	522
	d. Akta Perceraian	45	85	74
	e. Akta Pengangkatan Anak	32	27	20
2.	Pelayanan KTP	56.598	57.028	160,018
3.	Pelayanan KK	96.263	133.828	72,871

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan salah satu Dinas yang tugas dan fungsinya membidangi pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Arah dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan;
- b. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pemberdayaan fungsi BUMDes dari segi pengelolaan managemen produktifitas serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulan dan mendayagunakan potensi ekonomi;
- d. Peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pedesaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk unggulan desa;
- g. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pedesaan/kelurahan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas;
- h. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam pedesaan;
- i. Peningkatan peran Pemerintahan Desa dalam fungsi pelayanan, regulasi dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan peranan BPD dan LPMD serta kelembagaan masyarakat desa lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Perkembangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.52
KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN DAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Anggota PKK yang aktif	344	85,51	68,58
2	Desa yang mendapat dana bantuan partisipatif	2017 Desa	2017 Desa	2017 Desa

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
3	% Desa yang menyelesaikan pembangunan partisipatif tepat waktu	100 %	100 %	100 %
4	% Aparatur pemerintah desa yang mendapat pembekalan dalam bidang manajemen pemerintah desa	19,25	19,25	19,25
5	Jumlah BUMDes yang terbentuk	341	341	341
6	% BUMDes yang aktif	2,35	19,06	42,52
7	Jumlah desa tertinggal (desa)	113	113	23
8	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Desa (desa)	343 Desa	343 Desa	343 Desa
9	Jumlah LPMD yang aktif	1.029	1.029	1.029
10	Jumlah KPM yang aktif	686	686	686
11	Jumlah pelaksanaan gotong royong masyarakat	343	343	343
12	% Laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	50	60,64	50
13	Jumlah Kawasan perdesaan yang ditetapkan	1	-	-

Sumber : DPMPD Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Persentase anggota PKK yang aktif pada tahun 2018 hanya mencapai sebesar 68,58 %, hal ini disebabkan seringnya adanya pergantian kepengurusan karena banyak yang mengundurkan diri sibuk mencari nafkah sedangkan menjadi pengurus PKK adalah sukarelawan. Sedangkan untuk persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu sampai awal Januari 2019 masih sebesar 50 %, hal ini disebabkan karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Untuk tahun 2018 sasaran jumlah kawasan pedesaan yang ditetapkan tidak dapat tercapai karena adanya pertimbangan dan masukan bahwa karena Surat Keputusan Bupati tentang penetapan kawasan perdesaan tahun sebelumnya belum ada kajian dari dinas terkait sehingga disarankan untuk tahun ini tidak menerbitkan atau membuat surat keputusan yang menetapkan kawasan perdesaan sebelum ada rencana tindak lanjut dari penetapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar hambatan seperti pada tahun 2018 tersebut tidak terulang lagi maka pada awal 2019 ini DPMPD Kabupaten Kediri (Bidang Penguatan Kelembagaan dan

Pengembangan Partisipasi Masyarakat) akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta.

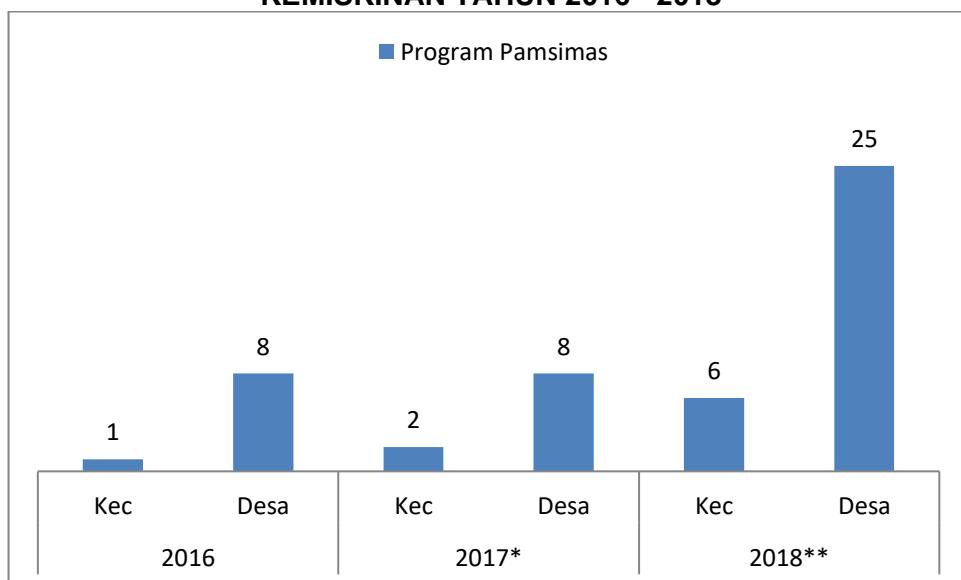
Seluruh program pembangunan pemberdayaan masyarakat/pemerintahan desa pada dasarnya bermuara pada salah satu tujuan utama yaitu agar masyarakat/pemerintahan desa memiliki kemandirian pembiayaan dalam pembangunan desa. Semakin tinggi kemampuan masyarakat/pemerintah desa untuk membiayai kegiatan pembangunan desanya maka tingkat keberdayaan masyarakat/ pemerintahan desa semakin tinggi. Desa yang mendapat dana bantuan partisipatif dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, hal ini didukung pula adanya dana desa yang sangat membantu desa sebagai wujud swadaya keberdayaan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Sesuai RPJMD dan Renstra 2016-2021 BUMDes menjadi salah satu indikator sasaran. Jumlah desa tertinggal merupakan salah satu indikator kinerja didalam RPJMD Kabupaten Kediri, pada tahun 2018 target jumlah desa tertinggal diperoleh melalui target pengurangan jumlah desa dari 113 desa menjadi 111 desa. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 30 tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Ditahun yang sama pada tahun 2018 jumlah Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk bertambah sebanyak 341 Desa. Selain itu, BUMdes yang sudah terbentuk juga telah aktif dalam setiap kegiatannya. Terbukti pada tahun 2018, persentase BUMDes yang aktif di Kabupaten Kediri mencapai 42,52%. Capaian ini akan terus ditingkatkan oleh DPMPD untuk tahun-tahun selanjutnya.

Sedangkan dalam upaya peningkatan pengelolaan pemerintahan desa dapat dilihat dari kemampuan pemerintah desa menangani permasalahan yang timbul. Adanya program pelatihan, sosialisasi, diseminasi tata kepemerintahan bagi aparatur desa salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sekaligus sebagai alat ukur tingkat keberhasilan program peningkatan SDM aparatur desa. Perkembangan program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan tahun 2016-2018 sebagaimana tabel berikut :

**GRAFIK 2.13
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN TAHUN 2016 - 2018**



Sumber : DPMPD Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Program Pamsimas III (tahun 2016-2019) bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi serta meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih.

Program Pamsimas I yang dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dan Pamsimas II dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah berhasil

meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan prilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota.

Disamping program-program di atas, selama tahun 2016-2018 di bidang pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan program pemberian bantuan rehab rumah setiap tahunnya melalui Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) khususnya kepada Rumah Tangga Miskin/Rumah Tangga Sangat Miskin (RTM/RTSM). Beberapa hal yang menyebabkan Pemerintah melaksanakan program ini, yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan, pendapatan minimun bagi suatu keluarga atau bisa dikatakan termasuk dalam kalangan masyarakat ke bawah, dan masih banyaknya keluarga yang menghuni rumah kurang layak huni. Hal-hal inilah yang menjadi acuan bagi Pemerintah untuk melaksanakan program rehab rumah, sehingga terjadi pemerataan tempat tinggal yang layak huni. Program rehab rumah ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Seleksi dilakukan oleh Aparatur Desa yang telah memiliki data-data masyarakat kurang mampu. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan untuk pemberian bantuan RTM/RTSM sejumlah 507 orang dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 57. Untuk mengetahui penerima bantuan rehab bagi RTM/RTSM sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.53
PELAKSANAAN PROGRAM PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU
TAHUN 2016 - 2018**

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Penerima manfaat (RTM/RTSM)	1.560	57	507
2.	Kecamatan	25	22	8
3.	Desa	113	43	32

Sumber : DPMPD Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

**TABEL 2.54
PROGRAM JALINMATRA DI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016 - 2018**

Tahun	Jalinmatra BRTSM		Jalinmatra PFK		Jalinmatra PK2	
	Kec	Desa	Kec	Desa	Kec	Desa
2016	-	-	4	23	2	4
2017	2	6	8	36	7	8
2018	5	20	17	38	8	10

Sumber : DPMPD Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Untuk menggali potensi dan inovasi yang ada di Desa di Kabupaten mulai tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kediri mengadakan Anugerah Desa Award dimana dalam penjurinya melibatkan Pemerintah Kabupaten Kediri serta pihak lain yaitu Radar Kediri, Akademisi dan Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3).

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan pada tataran operasional diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui: 1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ber-KB; 2) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan; 3) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; 4) memperkuat kelembagaan dan jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama tahun 2016 - 2018 dapat diukur dari meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.56
CAPAIAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016 - 2018
(persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Prevalensi peserta KB aktif	77,06	72,46	71,98
2	Persentase KB aktif MKJP	30,90	34,89	35,83
3	Persentase Unmeet Need	8,34	12,27	11,49
4	Persentase pencapaian peserta KB baru	104,55	82,89	85,70
5	Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	20,6	19,99	18,48
6	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100	100	100
7	Persentase kelompok tribina yang aktif			
	BKB	96,56	99,70	81,38
	BKR	99,40	98,85	83,53
	BKL	93,50	99,11	79,37

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Pada Tahun 2018, pencapaian Kesertaan ber-KB aktif sebesar 71,98% dan KB aktif MKJP sebesar 35,83%, hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi terutama pemakaian alat kontrasepsi yang efektif yaitu alat kontrasepsi jangka panjang yang pemakaiannya minimal 3 tahun yang bertujuan menjarangkan ataupun mengakhiri kehamilan. Salah satu dampaknya adalah penurunan kelahiran pada tahun 2018 menjadi 23.346 kelahiran dari 23.600 kelahiran di tahun 2017. Pencapaian *unmet need* (PUS yang belum ber-KB) belum tercapai 100%, ini menandakan bahwa *unmet need* di kabupaten Kediri masih cukup tinggi sebesar 11,49%. Jumlah unmet need yang cukup tinggi ini juga menjadi perhatian khusus terutama pada PUS dengan usia di atas 40 tahun karena memiliki resiko tinggi untuk hamil dan melahirkan. Guna menekan jumlah unmet need yang tinggi pada tahun 2018 dilaksanakan mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat dilakukan pelayanan KB melalui Mobil Unit Pelayanan yang dilaksanakan di 20 desa, selain itu juga dilaksanakan pemberian Informasi kepada masyarakat melalui ledang ataupun pemutaran film/hiburan kepada masyarakat dengan menggunakan Mobil Unit Penerangan sebanyak 16 kecamatan dengan harapan bahwa masyarakat memperoleh informasi tentang Kependukuan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Guna meningkatkan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam program keluarga berencana telah dilakukan Safari KB meliputi kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait (Dinkes, TNI, Kecamatan, TPPKK Kecamatan, PKB, Lembaga Swasta, Lembaga Profesi) dan monitoring kegiatan pelayanan di klinik KB. Pelaksanaan kegiatan Safari KB ini sebanyak 5 kali kegiatan dengan harapan bahwa masyarakat yang ingin ber-KB dapat terlayani dengan pelayanan gratis.

Capaian indikator persentase pencapaian peserta KB baru sebesar 85,70%. Pencapaian peserta KB baru semua metode ini diutamakan kualitas atau peserta KB baru dengan metode MKJP. Perolehan peserta KB baru dalam tahun 2018 sebanyak 36.327 akseptor dari jumlah ini 30,28% (11.001 akseptor) memakai metode kontrasepsi jangka panjang. Tujuan dari pemakaian kontrasepsi jangka panjang ini untuk meningkatkan keberlangsungan peserta KB.

Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam ber-KB sangat menentukan keberhasilan program KB, selain tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat. Faktor lain mengenai latar belakang pendidikan, ekonomi, budaya, sosial dan karakteristik kehidupan akan menentukan perilaku masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program KB. Perkembangan peserta KB dan pasangan usia subur (PUS) pada tahun 2016–2018 sebagaimana tabel berikut.

TABEL 2.57
PERKEMBANGAN PESERTA KB DAN PUS TAHUN 2016 - 2018

(orang)

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Peserta KB Aktif/Lestari	244,304	224.144	217.669
2.	Peserta KB Baru	35.612	46.222	36.327
3.	Pasangan Usia Subur (PUS)	317,048	309.336	302.393
4.	Peserta KB Mandiri	173,436	152.209	145.018

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Keberhasilan program KB dipengaruhi oleh jaringan pelayanan KB yang telah mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kediri beserta ketersediaan alat kontrasepsinya, dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan/program sebagai kader Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD. Jumlah anggota masyarakat yang terlibat sebagai kader program KB selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan karena dinilai sudah memadai, yaitu di setiap desa sudah terdapat seorang kader PPKBD dan antara 6 sampai dengan 9 kader Sub PPKBD. Jumlah kader PPKBD pada tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.58
JUMLAH KADER PPKB TAHUN 2016 - 2018

(orang)

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	PPKBD	344	344	344
2.	Sub PPKBD	2.931	2.931	2.931

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

2.1.3.2.9 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran mobilitas baik orang dan barang, sehingga meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik. Selanjutnya seiring dengan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di segala aspek kehidupan khususnya di bidang perhubungan pemerintah berupaya mewujudkan keterpaduan pembangunan antar wilayah yang ditunjang dengan sarana prasarana transportasi dan infrastruktur perhubungan yang memadai.

Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan selama kurun waktu tahun 2016 - 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Aman, Lancar, Terjangkau

Lima indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat capaian sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.59
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI
TAHUN 2016 - 2018**

(persen)

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1.	Angkutan darat dibanding penumpang umum	75,35	78,03	73,33	90,05	93,20
2.	Perkembangan penumpang yang terangkut	68,76	64,24	65,28	95,24	118,43
3.	Izin Trayek Angkutan Umum	100	100	80,00	59,09	40,00
4.	Ketersediaan fasilitas terminal penumpang/barang	33,30	33,30	100,00	100,00	100,00
5.	% Ketersediaan rambu lalu lintas dan sarana pendukung lain	56,51	67,52	76,57	89,00	73,53
6.	Nilai survei Kepuasan Masyarakat terhadap unit Pelayanan Publik Perhubungan	-	-	74,62	73,93	74,42
7.	% Angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi dan laik jalan kendaraan	-	-	90.92	91.04	86.50
8.	% Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	-	-	76.57	102.50	73.53
9.	Jumlah Ketersediaan unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Kediri	-	-	50,00	50,00	50,00
10.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	-	-	76.57	89	89
11.	Persentase transportasi umum yang laik fungsi	-	-	76.57	89	89

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Indikator Angkutan darat dibanding penumpang umum pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Secara umum kondisi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain : peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kemudahan memiliki kendaraan bermotor, kondisi angkutan umum yang dinilai belum memuaskan dari aspek ketepatan waktu dan kenyamanan.

Pemerintah Kabupaten Kediri mengoptimalkan hal-hal yang menjadi kewenangan guna menjamin pelayanan transportasi yang aman, tertib dan lancar. Pada tahun 2018 fasilitas terminal yang ada relatif sudah mencukupi untuk kegiatan transportasi. Selanjutnya data kuantitatif perkembangan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.60
PERKEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN 2016 - 2018

(Unit/Buah)

NO	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Rambu-rambu lalu lintas	3.719	3.850	3.862
2	Guardrail	425	439	439
3	APILL	113	118	113
4	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	343	358	358
5	Cermin Tikungan	43	52	52
6	Moving Sign Display (MSD)	76	76	76
7	Traffic Annoincer System (TAS)	6	6	6
8	Marka	43.604	46.823	49.750
9	Traffic Cone	1.632	1.632	1.652
10	Paku Marka Solar Cell	131	131	131
11	Deliniator	1.306	1.499	1.499
12	Paku jalan	3.290	3.290	3.290
13	Running Text	5	5	5
14	Road Barrier	207	207	207

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri.

* Angka diperbaiki, ** Angka sementara

Peningkatan sarana prasarana perhubungan akan terus ditingkatkan, kondisi ini merupakan upaya dari Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang berdampak positif sekaligus mempermudah masyarakat dalam bertransportasi.

b. Pemenuhan Sarana Prasarana Uji Kendaraan Bermotor

Pencapaian dalam pemenuhan sarana dan prasarana diperlukan guna menjalankan fungsi pengujian kendaraan bermotor. Adapun capaian kinerja selama tahun 2016 - 2018 tergambar sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.61
PERKEMBANGAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA UJI KENDARAAN
TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN			<i>(persen)</i>
		2016	2017*	2018**	
1	Ketersediaan unit pelayanan uji kir kendaraan	100,00	100,00	100,00	
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana uji kir kendaraan bermotor	100,00	100,00	100,00	
3	Kendaraan yang telah uji kir	85,00	92,03	95,37	
4	Peningkatan PAD dari sektor perhubungan	110,91	110,24	109,04	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Kepemilikan sarana/prasarana uji kir yang lengkap memfasilitasi bagi petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam menegakkan ketentuan bagi seluruh kendaraan bermotor wajib kir berdomisili hukum di Kabupaten Kediri yang harus telah memiliki sertifikat/surat kir sebagai salah satu persyaratan dapat melewati jalan umum. Hal tersebut tampak dari jumlah kendaraan yang telah lulus uji kir pada tahun 2018 mencapai sebesar 95,37% dari jumlah kendaraan wajib kir, dengan rincian secara kuantitatif seperti pada tabel berikut :

TABEL 2.62
JUMLAH KENDARAAN LULUS WAJIB UJI TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN			<i>(unit)</i>
		2016	2017*	2018**	
1.	Mobil Penumpang Umum	75	89	49	
2.	Bus Umum	185	175	176	
3.	Bus Bukan Umum	805	679	845	
4.	Mobil Barang Umum	4,689	3,914	3,961	
5.	Mobil Barang Bukan Umum	19,544	18,374	20,108	
6.	Kereta Gandengan Umum	114	94	62	
7.	Kereta Gandengan Bukan Umum	16	5	3	
8.	Kendaraan yang lulus uji kir (%)	84.98	92.55	95.37	
	JUMLAH	25,428	23,330	25,204	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang informasi dan komunikasi sasaran strategis yang hendak dicapai antara lain yaitu meningkatnya PD yang berbasis *e-Government*, meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik dan meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah.

Adapun capaian kinerja sasaran atas penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.63
PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Web site milik pemerintah daerah (situs)	1	1	1
2	Pameran / Expo (kali)	2	3	2
3	% Kecukupan SDM di bidang TIK	80	80	81
4	% Jumlah titik koneksi yang terhubung dengan jaringan intranet	94,5	95	95
5	Jumlah media cetak yang diterbitkan	3	2	-
6	% penyebaran informasi, komunikasi dan media masa melalui kerja sama	80	98	120
7	Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi	-	480	822
8	% Desa yang membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	13.6	28	57.8
9	% PPID aktif pada PD	100	100	100
10	% PD yang berbasis e-government	100	100	100
11	Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab	410 Mbps	410 Mbps	510 Mbps
12	Jumlah update pada media pemerintah daerah	4x/hr	4x/hari	7x/hr
13	Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab	1,6jt	8jt	13,3jt

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi di tahun 2018 bisa mencapai 822/tahun, dengan rata-rata 3 (tiga) berita per hari. Pada tahun 2017 rata-rata jumlah update publikasi di media pemerintah 4 kali per hari, sedangkan pada tahun 2018 bisa mencapai 7 kali per hari. Hal ini karena didukung dengan adanya media sosial seperti *instagram*, *facebook*, dan *twitter* yang juga aktif digunakan selain website pemerintah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2018 Dinas

Kominfo tidak menerbitkan media cetak internal. Hal ini dikarenakan di era sekarang, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook lebih efektif dalam menyampaikan informasi baik secara cepat maupun secara luas. Selain itu Dinas Kominfo juga memiliki TV streaming Kediri Lagi TV sebagai media penyiaran.

Adapun perkembangan media komunikasi dan informatika sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.64
PERKEMBANGAN MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2016 - 2018**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Pusat Informasi dan Komunikasi	1	1	1
2.	Juru Infokom	11	4	2
3.	Penerangan pembangunan (SK Bupati No. 677/2003):			
	- Forum Dialog Interaktif (FDI) Kecamatan	6	3	-
	- Kelompok Informasi & Komunikasi Interaktif Pedesaan (KIKIP)	121	121	-
4.	Penerangan umum (kali):			
	- Pertunjukan rakyat	2	3	44
	- Pemutaran film	1	2	-
	- Pameran	2	3	2
	- Siaran Keliling	12	-	-
	- Penerbitan/liputan	3	2	-
	- Bakoinmas	1	3	6
	- Kerjasama informasi dengan media massa	5	115	120
5.	Pelatihan bidang komunikasi dan informasi (orang)	160	900	1.400

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan urusan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan agar koperasi dan usaha mikro menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang mampu mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelatihan, bantuan sarana promosi yang kesemuanya berorientasi kepada pengembangan koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kemampuan organisasi manajemen serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemitraan.

Capaian kinerja pembangunan koperasi dan usaha mikro daerah meliputi persentase koperasi sehat, persentase koperasi aktif dan persentase pertumbuhan usaha mikro sebagaimana tabel dibawah.

**TABEL 2.65
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2018**

No	Indikator	2018		
		Target	Realisasi	Capaian
1	% Koperasi Sehat	87,30	98,5	112,83
2	% Pertumbuhan Usaha Mikro	2,03	1,94	95,68
3	% Peningkatan wirausaha baru	3,35	3,23	96,42
4	% Usaha Mikro yang berijin	136,26	45,15	60,15
5	% Usaha Mikro hasil binaan yang omsetnya meningkat	58,52	71,96	122,97
6	% Koperasi hasil binaan yang mendapat peningkatan predikat	2,01	2,15	106,97

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri.

Pencapaian kinerja pada urusan koperasi dan usaha mikro tahun 2016 - 2018 diukur dengan menggunakan indikator dengan tingkat keberhasilan sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.66
CAPAIAN KINERJA PERKOPERASIAN DAN UMKM TAHUN 2016 - 2018**
(persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM				
1	Koperasi aktif	75,29	66,79	53,40
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	11,03	7,07	6,70
3	Pertumbuhan Modal Sendiri Koperasi	4,53	5,94	5,61
4	Koperasi yg sehat	88,33	90,57	98,5
5	Perkembangan Usaha kecil dan menengah :			
	1) Jumlah unit	172.814	173.024	173.111
	2) Pertumbuhan Volume Usaha UMKM	18,34	19,42	17,49
Fasilitasi Promosi UMKM :				
1	UMKM mengikuti pameran	0,74	0,74	0,74

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah koperasi aktif disebabkan data tersebut adalah data sementara karena untuk tahun buku 2018 pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan syarat koperasi dinyatakan sebagai koperasi aktif masih berjalan ditahun 2018 ini. Koperasi sehat sebagai indikator tujuan RPJMD tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tahun 2017 sebesar 90,57% meningkat menjadi 98,50% karena semakin meningkatnya pemahaman manajemen koperasi oleh pengurus koperasi. Peningkatan capaian jumlah usaha mikro kecil tahun 2018 sebesar 0,05% dibandingkan tahun 2017, hal ini menunjukkan upaya peningkatan jumlah usaha mikro telah disesuaikan dengan sasaran yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri tahun 2016-2021.

Kinerja perkoperasian secara rinci diperlihatkan dengan perkembangan KUD dan non-KUD selama tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.67
PERKEMBANGAN KUD DAN NON KUD TAHUN 2016 - 2018

No	U R A I A N	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
A. K U D				
1. Jumlah KUD (unit)		27	27	27
2. Anggota (orang)		80,491	80,090	72,558
3. Modal Sendiri (juta Rp)		32,043	39,001	39,108
4. Modal Luar (juta Rp)		63,357	53,478	55,616
5. Aset KUD (juta Rp)		95,400	92,478	94,725
6. Volume Usaha (juta Rp)		68,296	110,889	66,176
7. SHU (juta Rp)		7,542	807	1,001
B. Koperasi Non K U D				
1. Jumlah Koperasi (unit)		1,361	1,361	1,374
2. Anggota (orang)		66,796	83,438	83,144
3. Modal Sendiri (juta Rp)		173,539	251,782	415,014
4. Modal Luar (juta Rp)		251,082	280,037	249,302
5. Aset (juta Rp)		424,621	531,819	664,316
6. Volume Usaha (juta Rp)		430,018	613,688	706,988
7. SHU (juta Rp)		179,425	19,396	22,812
C. Usaha Koperasi (Unit)				
1. Koperasi Aktif		1,045	732	750
2. Koperasi tidak aktif		343	662	651
3. Koperasi sekunder		3	3	3
4. Koperasi primer		1,385	1,391	1398

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Berdasarkan tabel di atas kenaikan pertumbuhan modal sendiri koperasi baik KUD maupun Non-KUD pada tahun 2018 sebesar 454.122 Juta Rupiah dari tahun 2017 yang sebesar 290.783 Juta Rupiah.

Aset KUD dan Non-KUD pada tahun 2018 meningkat menjadi 759.041 juta rupiah disebabkan adanya kenaikan jumlah simpanan wajib dan simpanan pokok anggota koperasi dan meningkatnya minat masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Sedangkan koperasi aktif terjadi peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 menjadi sebanyak 750 karena semakin meningkatnya pemahaman manajemen koperasi oleh pengurus koperasi.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Terwujudnya Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan investasi yang menarik serta menjadi mitra terbaik bagi investor merupakan suatu keadaan yang dicitacitakan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Agar terlaksananya tujuan tersebut perlu didukung dengan pelayanan investasi, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor. Dalam rangka melaksanakan Urusan Penanaman Modal ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Beberapa hal di tahun 2018 yang menjadi perhatian dalam meningkatkan daya tarik investasi antara lain :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk pengembangan usaha, seperti: jalan, jembatan, fasilitas perbankan dan infrastruktur telekomunikasi;
- b. Kemudahan dan penyederhanaan prosedur perizinan investasi;
- c. Pemberian fasilitas dan keamanan dalam berusaha bagi penanaman modal terutama PMA dan PMDN berupa: pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal;
- d. Ketersediaan bahan baku dan penyiapan tenaga kerja yang terdidik;
- e. Pelayanan profesional, cepat dan memuaskan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani investasi.

Perkembangan capaian kinerja urusan penanaman modal digambarkan dengan menggunakan 6 (enam) indikator sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.67
PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL/INVESTASI
TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Usaha Baru (Perusahaan)	1,328	1,277	1,001
2	Penyerapan Tenaga Kerja (Org)	9,792	8,154	14,405
3	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	462.935070	819.704460	586.856516
4	PMDN dan PMA	20	22	35
5	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	2,816,428	3,222,781	3,294,895
	Jumlah Tenaga Kerja	9,792	8,154	14,405

Sumber : DPMPTSP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dalam mendukung peningkatan penanaman modal, DPMPTSP mengadakan promosi potensi investasi melalui pameran yang dilaksanakan baik di Kabupaten dan Kota Kediri bahkan mengikuti kegiatan pameran di daerah lain. Dengan adanya pameran ini diharapkan potensi unggulan daerah dan produk daerah Kabupaten Kediri dapat dikenal di berbagai daerah serta adanya peningkatan nilai investasi di Kabupaten Kediri. Selain dengan pameran juga dibuat buku profil investasi perusahaan yang ada di Kabupaten Kediri, sehingga memudahkan bagi semua pihak yang membutuhkan data tentang investasi di Kabupaten Kediri.

Selanjutnya mengenai perkembangan jumlah pelayanan perizinan di Kabupaten Kediri selama tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.68
PERKEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN TAHUN 2016 - 2018

NO	URAIAN	JML SK IZIN YG DITERBITKAN		
		2016	2017*	2018**
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	0	0	6
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	12	12	0
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	1	1	0
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	1	1	0

5.	Izin Usaha Penanaman Modal	2	2	2
6.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,950	2,724	1,936
7.	Izin Gangguan (HO)	504	205	-
8.	Izin Pemasangan Reklame	598	567	637
9.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	23	8	14
10.	Izin TDUP/Huller	12	18	4
11.	SIUP	1,319	1,187	1,002
12.	TDP	1,452	1,300	1,075
13.	Izin Lokasi	21	15	3
14.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	156	139	155
BIDANG KESEHATAN :				
15.	Izin Apotik	64	55	38
16.	Izin Penutupam Apotik	0	0	7
17.	Izin Toko Obat	3	4	6
18.	Izin Penutupan Toko Obat	0	0	0
19.	Izin Mendirikan, Izin Operasional Klinik	8	22	24
20.	Izin Mendirikan, Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D	1	2	3
BIDANG KETENAGAKERJAAN :				
18.	Izin Mendirikan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI)	11	0	0
19.	Izin Mendirikan Penampungan Sementara CTKI	10	10	6
20.	Izin Pendirian/Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Swasta	11	11	13
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP :				
21.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	12	16	29
22.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	10	13	16
23.	Izin Lingkungan	17	39	42

	BIDANG PEMBANGUNAN :			
24.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	72	60	30
	BIDANG KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN :			
25.	Izin Usaha Industri (IUI)	35	36	33
26.	Izin Usaha Toko Modern	2	0	4
27.	Tanda Daftar Industri (TDI)	27	23	0
28.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	26	27	15
	BIDANG PARIWISATA :			
29.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	23	22	34
	BIDANG PERHUBUNGAN :			
30.	Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang	12	7	18
	BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN :			
31.	Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Peternakan Rakyat	12	15	14
32.	Izin Pemotongan Hewan	2	7	12
	JUMLAH	6.409	6.548	5.179

Sumber : DPMPTSP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Berdasarkan tabel di atas untuk izin prinsip penanaman modal dan izin prinsip perluasan penanaman modal ditahun 2018 tidak ada, diubah menjadi pendaftaran penanaman modal sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan perizinan adalah target dan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan seperti kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan, tingkat kenyamanan kondisi kantor, izin yang diterbitkan dan secara lengkap capaian indikator tersebut sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.69
TARGET DAN REALISASI PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU
TAHUN 2016 - 2018

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Jumlah staf dengan kualitas SDM yang memadai dan kompeten dibidangnya	96.88	96.77	100
2	% Masyarakat yang merasa nyaman dengan suasana dan kondisi kantor pelayanan	76.33	76.35	77.97
3	% Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	73.41	76.62	77.78
4	Jumlah ijin yang diterbitkan terhadap jumlah berkas ijin yang masuk (%)	100	100	100
5	Jumlah Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perizinan (buah)	1	1	1

Sumber : DPMPTSP Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dari tabel di atas menunjukkan indikator masyarakat yang merasa nyaman dengan suasana dan kondisi kantor pelayanan dan indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan mengalami peningkatan pada tahun 2018.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat keberhasilan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat digambarkan melalui dua aspek yaitu meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda, serta meningkatnya prestasi olahraga daerah. Capaian kedua aspek tersebut sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.70
PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
	Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda			
1	Jumlah organisasi kepemudaan (Unit)	113	113	87
2	Kelompok Karang Taruna yang berprestasi	0	1	1
3	Pemuda pelopor/berprestasi (Orang)	12	12	12
	Meningkatnya prestasi olahraga daerah			
1	Jumlah Klub Olah Raga	209	209	494
2	Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)	365	365	365
3	Jumlah sekolah olahraga (Unit)	207	207	494
	Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan dalam 1 (satu) tahun	32	25	40

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

TABEL 2.71
PERKEMBANGAN FASILITAS DAN KEGIATAN OLAHRAGA
TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Jumlah klub Olah raga :			
	- Bola Voli	21	21	48
	- Bulutangkis	32	32	132
	- Sepak bola	52	52	76
	- Tenis Meja	40	40	80
	- Tenis Lapangan	8	8	40
	- Atletik	7	7	35
	- Senam Aerobik/Sanggar	26	26	20
	- Senam Artistik	2	2	2
	- Renang	10	10	35

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
	- Catur	11	11	26
2	Jumlah gedung/lapangan olah raga:			
	- Bola Voli	85	85	85
	- Bulutangkis	98	98	98
	- Sepak bola	173	173	173
	- Tenis Lapangan	8	8	8
	- Atletik	1	1	1
3	Jumlah sekolah olahraga :			
	- Sekolah Sepak Bola (SSB)	52	52	76
	- Sekolah Bulutangkis	32	32	132
	- Sekolah Tenis Meja	40	40	80
	- Sekolah Tenis Lapangan	8	8	40
	- Sekolah Bola Voli	21	21	48
	- Sekolah Atletik	7	7	35
	- Sekolah Renang	10	10	35
	- Sekolah Senam	26	26	22
	- Sekolah Catur	11	11	26

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kediri pelaksanaannya diselenggarakan secara lintas sektoral-horisontal, yaitu oleh Dinas Pendidikan, Bakesbangpol, Dinas Sosial serta Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk mengembangkan organisasi dan kegiatan kepemudaan yang positif serta membudayakan aktivitas olahraga di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Tingkat capaian program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat digambarkan pada 2 (dua) aspek, yaitu meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda, serta meningkatnya prestasi olahraga daerah. Kinerja urusan pemuda dan olahraga mengalami pasang-surut yang cukup variatif dari tahun ke tahun, artinya bahwa kadang kala mengalami kenaikan capaian cukup tinggi, kadang kala pula mengalami penurunan capaian. Hal ini dikarenakan aspek sifat non formal dari organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga masyarakat dan animo masyarakat yang kadang menggelora dan kadang pula menyurut.

Demikian pula perkembangan fasilitas keolahragaan, mengalami pasang-surut yang cukup variatif dari tahun ke tahun dan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2018. Pembangunan fasilitas keolahragaan diarahkan pada upaya

mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga dan mempertahankan kondisi lapangan olahraga yang ada tetap layak untuk digunakan. Dari segi prestasi yang dicapai, pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan, yaitu sebanyak 40 (empat puluh) anak/event jika dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 15 (lima belas) anak/event. Selama tahun 2018 atlet-atlet pelajar telah menorehkan prestasi dalam event di tingkat provinsi maupun pada event di tingkat nasional.

2.1.3.2.14 Statistik

Ketersediaan data statistik yang akurat dan tepat waktu tentang hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berguna baik bagi para pemangku kepentingan maupun lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Kediri. Melalui data statistik dapat dilakukan kegiatan perencanaan sehingga menjadi pijakan untuk menetapkan arah kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Sedangkan bagi lingkungan internal pemerintah data statistik tersebut merupakan rujukan dalam melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, merumuskan perbaikan dan optimalisasi kinerja, dan media akuntabilitas kepada publik. Pelaksanaan Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Salah satu bentuk pembangunan di Kabupaten Kediri adalah pelestarian dan pengembangan kawasan budaya sebagai pusat peradaban budaya dan pemerintahan. Kemegahan Kediri masih memberikan bukti-bukti hingga sekarang, seperti ditemukannya situs-situs sejarah kuno dan peninggalan seni budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat. Pembangunan budaya di Kabupaten Kediri seperti tempat religius Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerot, Situs Tondowongso dan situs-situs lain yang masih dalam pengkajian dan penelitian.

Capaian kinerja sasaran strategis pembangunan kebudayaan daerah adalah mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah yang ditunjukkan dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan sebesar 50,20% meningkat dari tahun sebelumnya (2017) yang hanya 44,16%.

Adapun capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan kebudayaan dalam rangka meningkatkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-

nilai budaya, sejarah dan nilai tradisi memiliki indikator sasaran antara lain persentase seni budaya lokal yang dilestarikan dan persentase cagar budaya yang dilestarikan serta indikator tambahan lain sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 2.72
PERKEMBANGAN SENI DAN KEBUDAYAAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2018

No	U R A I A N	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Jumlah grup kesenian	1.220	1.336	1.508
2.	% kelompok seni dan budaya yang dibantu/diberdayakan	51,31	44,16	50,20
3.	Jumlah Seni budaya lokal yang dilestarikan	26	28	40
4.	Jumlah gedung kesenian	3	3	3
5.	Jumlah Penyelenggaraan festival dan kegiatan seni budaya	76	87	102
6.	% Peningkatan pentas seni dan budaya	46,15	14,47	17,24
7.	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ***)	109	110	130

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Kegiatan seni budaya tradisi masih tetap diselenggarakan hingga saat ini oleh masyarakat karena merupakan identitas atau tata nilai yang menjadi perekat kebersamaan, perkauman, kekerabatan diantara kelompok masyarakat yang menjadi pemangku seni budaya tersebut. Beberapa kesenian daerah lain yang tumbuh dengan baik di Kabupaten Kediri tidak terlepas dari mudahnya akses geografis dari dan menuju Kediri.

Sedangkan budaya spiritual dan Upacara Adat daerah yang masih terpelihara dengan baik antara lain : Budaya Spiritual Wiwitan (Tanam Padi), Methik Kopi, Nyadran (Bersih Desa), Mendhem Golekan, Megengan (menjelang Idul Fitri), Kebur Banyu (upacara minta hujan), Upacara Adat Ritual Sesaji Gunung Kelud, Upacara Adat Ziarah Menang 1 (satu) Suro, Upacara Adat Ziarah Prabu Anom Doko, Upacara Adat Tirto Husada, Wisuda Waranggono, dan sebagainya. Aktivitas pengembangan seni budaya selama tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.73
PERKEMBANGAN KEGIATAN SENI BUDAYA TAHUN 2016 - 2018

No	U R A I A N	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
A.	Kegiatan Budaya Tradisi :			
1.	- Ritual Sesaji Kelud, Ngancar	1	1	1
	- Nyadran Poso	-	-	1
	- Megengan	-	-	1
	- Wiwitan Pari	-	-	1
	- Puputan Pari	-	-	1
	- Manten Tebu (Buka Giling), Kras	-	-	1
	- Methik Kopi, Plosoklaten	-	-	1
2.	Kegiatan tradisional/suroan			
	- Ziarah Menang (Sri Aji Joyoboyo), Pagu	1	1	1
	- Ziarah Makam Kyai Prabu Anom Doko	1	1	1
	- Mbah Suko (Memetri) Ds. Katang, Ngasem	1	1	1
	- Pelestarian Budoyo Botoputih, Plosoklaten	1	1	1
	- Lestari Budoyo Setono Lilir, Kandat	1	1	1
	- Sesaji Tirtohusodo, Sukowono, Ironggolo – Mojo	1	1	1
	- Ritual Sesaji Ki Onggomerto (Sedekah Bumi), Kepung	1	1	1
	- Ritual Tiban Purwokerto, Ngadiluwih	1	1	1
	- Kebur Banyu, Ubalan, Plosoklaten	1	1	1
	- Mendhem Golekan, Kandangan	1	1	1
	- Nyadran Mbah Kabul, Ngasem	-	-	1
	- Bersih Desa Jabon, Banyakan (KA Suryo Hadi Kusumo)	-	-	1
	- Nyadaran Suran	-	-	1
	- Ziarah Makam Syech Abdul Mursyad, Grogol	-	-	1
	- Bersih Desa Larungan, Semen	-	-	1
	- Ritual Sesaji Dam Sumberpucung Galuhan, Kandat	-	-	1
	Sub Jumlah	11	11	23
		2016	2017	2018*

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
B	Festival Seni Budaya :			
1	Pekan Budaya	1	1	1
2	Parade Budaya	1	1	1
3	Festival Kelud	1	1	4
4	Festival Tari Kontemporer/Tradisi	1	1	0
5	Pagelaran Kesenian Daerah	40	53	56
	Sub Jumlah	44	57	62
C	Pengiriman Duta/Tim Kesenian :			
1	Pengiriman Duta/Team Kesenian ke berbagai daerah/Provinsi	20	19	17
2	Pengiriman Duta/Team Kesenian ke Luar Negeri	1	-	-
	Sub Jumlah	21	19	17
1	Pembinaan Seniman dan Organisasi Kesenian	0	1	0
	JUMLAH	76	88	102

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Selain upacara adat di atas, sebenarnya masih banyak upacara yang berkaitan dengan ritual siklus hidup, yang tetap dilestarikan masyarakat Kabupaten Kediri, seperti: Mitoni (tingkepan) yakni upacara memperingati 7 bulan kehamilan, biasanya dilaksanakan menjelang usia kehamilan 7 bulan; Brokohan yakni upacara memperingati hari kelahiran anak/bayi; Tedhak siten yaitu upacara memperingati turun tanah untuk pertama kalinya bagi bayi/anak, biasanya dilaksanakan ketika anak atau bayi berusia menjelang 7-8 bulan; Khitanan yaitu upacara inisiasi seorang anak laki-laki menjadi remaja atau akil baligh/dewasa yang biasa disebut sunatan walau ada juga anak perempuan ketika masih bayi juga dikhitan/sunat, sebagai simbol menuju kedewasaan dan pengubahan estetika seksualitas; Temanten atau Mantenan adalah simbol seseorang menuju kedewasaan dalam hidup berumahtangga, dimana permulaan hidup sebagai makhluk bermasyarakat dimulai dari sini, dipenuhi rangkaian acara maupun simbol-simbol, mulai dari siraman (membersihkan diri), midodareni (malam bersilaturahim), injak telur (harapan dan kesetiaan), sikepan sindur (tali kasih yang erat), pangkuhan/pangkon (berbagi kasih yang adil), kacar-kucur (kesejahteraan berumahtangga), dulang-dulangan (saling menolong), sungkeman (bakti pada orang tua), janur kuning (harapan mendapat

cahaya baik), kembar mayang (bijaksana, pandai, hati-hati dan motivasi tinggi), dan tarub (kemakmuran); Munggah Molo yakni upacara mendirikan atau membangun rumah, terutama pada waktu menaikkan kerangka atap, dengan menggunakan sesajen yang terdiri dari bahan-bahan beras, bumbu-bumbu dapur, tebu sejodo, pisang sejodo, padi seikat, kelapa, kupat, lepet, tikar daun pandan, bantal, guling dan bendera Merah Putih dengan harapan agar terbina kekompakan dan harmonisasi antara keluarga dan masyarakat sekitar; Kepaten/kematian, yaitu upacara melepas atau mengiringi kepergian arwah (roh) menuju alam lain dengan harapan orang yang meninggal ini akan mendapat pengampunan dari Sang Pencipta dan dimasukkan dalam surga; Pitu/7 harinya, yaitu selamatan dalam rangka memperingati kematian seseorang setelah 7 hari kepergiannya, yang biasanya dilaksanakan pada menjelang 7 hari (bisa malam sebelum hari ke-7); Patang puluh/40 harinya yaitu selamatan dalam rangka memperingati kematian seseorang setelah 40 hari/sebulan lebih kepergiannya, yang biasanya dilaksanakan pada menjelang 40 hari (bisa malam sebelum hari ke-40); Satusan/100 harinya, yakni selamatan dalam rangka memperingati kematian seseorang setelah 100 hari/tiga bulan lebih kepergiannya, yang biasanya dilaksanakan pada menjelang 100 hari (bisa malam sebelum hari ke-100), Mendhak pisan-pindo yakni selamatan dalam rangka memperingati kematian seseorang setelah 1 tahun dan dua tahun kepergiannya, yang biasanya dilaksanakan pada menjelang 1 atau 2 tahun (bisa malam sebelum tahun ke-1 maupun 2), Sewu/1000 harinya, atau akhir dari kewajiban ahli waris untuk mengadakan selamatan berkaitan peringatan kematian seseorang atau sanak keluarganya, yakni selamatan dalam rangka memperingati kematian seseorang setelah 1000 hari atau lebih kurang 3 tahun kepergiannya, yang biasanya dilaksanakan pada menjelang 1000 hari (bisa malam sebelum hari ke-1000). Itulah beberapa upacara adat yang berkembang dan masih dilestarikan dalam masyarakat Kabupaten Kediri.

Adapun perkembangan kelompok kesenian yang ada selama tahun 2016 s.d. 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.74
PERKEMBANGAN KELOMPOK KESENIAN TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016*	2017**
A.	KELOMPOK SENI TRADISIONAL:			
1.	Jaranan	471	537	600
2.	Tiban	3	3	3
3.	Reog	8	10	11
4.	Wayang Mbah Gandrung	1	1	1
5.	Wayang Orang	1	1	2
6.	Wayang Krucil	3	3	3
7.	Wayang Suluh	112	112	112
8.	Wayang Kulit/Dalang	1	1	1
9.	Karawitan	18	18	23
10.	Waranggono	19	19	19
11.	Ludruk	3	3	4
12.	Kentrung	-	1	1
13.	Jemblung	6	6	6
14.	Macapat	6	6	6
15.	Kethoprak	6	6	8
16.	Pramugari	6	6	6
17.	Tayub	6	6	6
18.	Pencak silat	14	14	14
19.	Gala Ganjur	-	1	1
	Sub Jumlah	684	754	827
B.	SANGGAR SENI :			
1.	Sanggar Tari	19	20	21
2.	Sanggar Lukis	7	7	7
3.	Teater	1	1	1
	Sub Jumlah	27	28	29
C.	KELOMPOK SENI MUSIK :			
1.	Orkes Melayu	288	311	378
2.	Campursari	88	96	107
3.	Band	14	15	15
4.	Qosidah	13	13	17
5.	Hadrah	45	46	47
6.	Keroncong	5	5	5
7.	Electone	48	60	75
	Sub Jumlah	501	546	644
D.	KELOMPOK PELAWAK			
1.	Lawak	8	8	8
	Jumlah	1,220	1,336	1,508

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Kesenian dan kebudayaan sebagai aset potensi di Kabupaten terus dikembangkan untuk diarahkan pada peningkatan pengembangan nilai seni dan pengelolaan budaya daerah.

Hal ini terus dilakukan dengan meningkatkan partisipasi di berbagai Event Seni Budaya baik dari skala regional maupun tingkat nasional. Keberhasilan pengembangan di bidang ini, dipengaruhi adanya:

- 1) Faktor Geografis, Kabupaten Kediri letaknya strategis sebagai pintu gerbang antar daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Banyaknya obyek wisata yang berpotensi sebagai wisata unggulan.
- 3) Adanya beberapa destinasi wisata baru yang sangat potensial untuk menarik kunjungan wisata.
- 4) Meningkatnya pemasaran kerjasama antar daerah di bidang kepariwisataan.
- 5) Meningkatnya pembangunan sarana-prasarana pariwisata, event-event promosi pariwisata dan pagelaran seni budaya.
- 6) Kabupaten Kediri kaya akan seni budaya daerah yang sampai saat ini masih diminati masyarakat.
- 7) Peran aktif seniman dan budayawan dalam mengembangkan seni budaya daerah.
- 8) Kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pagelaran seni budaya.

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk melihat kinerja perpustakaan dapat diukur dari jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah koleksi buku, SDM dan sarana prasarana. Hal ini dalam upaya meningkatkan tumbuh kembangnya budaya baca di masyarakat.

Salah satu prasyarat bagi terbentuknya masyarakat yang beradab, adalah meningkatnya minat baca di masyarakat melalui gerakan gemar membaca.

Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Adapun pencapaian kinerja urusan perpustakaan pada tahun 2016-2018 tampak sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.75
KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	34.582	35.204	35.568
2	Pengunjung perpustakaan (org)	14.817	23.814	29.335
3	% Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan umum	51,70	60,72	23,18
4	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	84	94	99
5	Kegiatan peningkatan minat baca yg dilaksanakan (kegiatan)	1	3	1
6	% Perpustakaan yang memiliki jumlah SDM yang memadai di bidang perpustakaan	46,97	46,97	46,97
7	% Kecukupan sarana prasarana perpustakaan umum yg memadai	86,03	88,00	90,00

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Dari data di atas, terlihat pada tahun 2018 adanya kenaikan jumlah pengunjung, jumlah koleksi buku dan jumlah perpustakaan desa dengan ini berdampak pada peningkatan minat baca masyarakat dilihat dari peningkatan pengunjung perpustakaan dari 14.520 orang yang merupakan target menjadi 24.335 orang atau 202,03%. Hal ini dikarenakan adanya gerakan membaca masyarakat melalui pembinaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat serta adanya peningkatan sarana prasarana dan perluasan cakupan pelayanan perpustakaan keliling dan adanya kunjungan siswa ke perpustakaan daerah.

2.1.3.2.17 Kearsipan

Kebijakan urusan kearsipan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam upaya pelestarian dan penyelamatan dokumen daerah. Adapun pencapaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 - 2018 tampak sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.76
PERKEMBANGAN KINERJA KEARSIPAN TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh PD	15 PD	20 PD	25 PD
2	Unit Kerja yang memiliki SDM yang memadai di bidang kearsipan	70 sdm	20 sdm	20 sdm

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
3	Sarana prasarana kearsipan yang memadai di setiap Unit Kerja	70 UK	32 UK	40 UK

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Pada tahun 2018 penerapan pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan dengan capaian sebesar 100%, dan PD yang melakukan penerapan pengelolaan arsip secara baku sebanyak 25 PD. Jumlah ini bertambah sebanyak 5 PD dibanding tahun 2017. Unit kerja yang memiliki SDM yang memadai dibidang kearsipan terealisasi 20 SDM sesuai dengan targetnya. Sarana prasarana kearsipan yang memadai disetiap unit kerja mengalami kenaikan menjadi 40 unit kerja. Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 32 unit kerja. Meskipun terjadi kenaikan sarana prasarana kearsipan namun kondisi ini perlu terus dilakukan penyelamatan arsip sesuai undang-undang tentang penyelenggaraan kearsipan.

2.1.3.3 Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Pembangunan dibidang perikanan bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; pelestarian sumberdaya perairan umum, peningkatan sarana prasarana perikanan; pameran dan kontes ikan dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga sehat dan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, tujuan ekonomis lainnya adalah untuk meningkatkan produksi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani ikan.

. Perkembangan produksi perikanan dan tingkat konsumsi ikan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.77
PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN DAN
TINGKAT KONSUMSI IKAN TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Produksi perikanan:			
	- Kolam (Ton)	15.303,38	16.768	18.792,97
	- Perairan Umum (Ton)	156,40	170,754	179,500
	- Ikan hias (ribu ekor)	260.539,9	291.551	297.073
	- Benih ikan (juta ekor)	16.940	18.115,24	18.572,196
2.	% Pertumbuhan masyarakat yg melakukan budi daya perikanan	2,20	1,79	2,51
3.	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	19,05	20,01	20,32
4.	Nelayan perairan umum (orang)	304	322	335
5.	Petani ikan (orang)	8.330	8.479	8.692
6.	Nilai tambah produksi perikanan	-	1.379.752.825	1.386.536.270

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan produksi perikanan pada tahun 2018 produksi perikanan di kolam menjadi sebesar 18.792,97 ton dimana tahun sebelumnya (2017) sebesar 16.678 ton. Pengembangan dibidang perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan melalui kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan; intensifikasi budi daya ikan hias; pengembangan pemberian ikan; pengembangan budidaya ikan di kolam rakyat; pendampingan sertifikasi tanah untuk pembudidaya ikan; pemantauan dan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan

2.1.3.3.2 Pariwisata

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Kediri dapat direspon secara positif dan memberikan dampak turunan untuk pengembangan usaha baru bagi masyarakat seperti usaha jasa pariwisata, usaha berbagai produk kerajinan dan perdagangan produk lokal. Pembangunan yang telah dilakukan dalam urusan pariwisata tidak hanya berhenti sampai pada pembangunan fisik berupa pemeliharaan ataupun peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata saja, tetapi juga pembangunan kepariwisataan secara non fisik yaitu dalam hal pengembangan konsep dan strategi promosi dan pemasaran lewat media massa maupun media sosial, seperti website kepariwisataan, instagram dan sejenisnya.

Capaian kinerja sasaran strategis pembangunan pariwisata tahun 2018 ditujukan dalam rangka meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang ditunjukkan dengan persentase PAD sektor pariwisata sebesar 1,11% yang mana jumlah PAD pariwisata sebesar Rp 5.338.376.580. Adapun capaian strategis lainnya ditunjukkan dengan indikator jumlah kunjungan wisata sebesar 3.252.052 melebihi target yang ditetapkan sebesar 1.959.964 atau capaian sebesar 165,92%. Indikator lain adalah persentase peningkatan destinasi wisata dan persentase tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.78
KINERJA PARIWISATA TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Jumlah Kunjungan Wisata yang tercatat (orang) :	1.991.817	2.303.066	3.252.052
2	% Peningkatan destinasi wisata	10,20	20,41	48,98
3	Kelompok sadar wisata (kelompok)	10	12	28
4	Usaha kepariwisataan yang direkomendasikan	23	45	76
5	Restoran/rumah makan (unit)	62	102	114
6	Penginapan/Hotel/pondok (unit)	18	27	31

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kediri
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Pada tahun 2018, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2017). Apabila tahun 2017 sebesar 2.303.066 orang meningkat menjadi 3.252.052 orang ditahun 2018. Hal tersebut dikarenakan :1) Semakin gencarnya promosi dan publikasi melalui media sosial terkait destinasi wisata dan even-even kepariwisataaan 2) Munculnya destinasi wisata baru kurang

lebih 14 destinasi, 3) semakin tumbuhnya kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang ada di desa-desa wisata, 4) semakin banyaknya pemaketan wisata yang berorientasi pada link of stay seperti kampung inggris, artinya dengan semakin lama mereka tinggal di kampung inggris maka semakin banyak kesempatan bagi mereka untuk mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Kediri.

Selain itu, persentase peningkatan destinasi wisata yang terus meningkat ditahun 2018 dipengaruhi faktor banyaknya desa yang ingin mandiri dengan menciptakan destinasi wisata baru. Hal ini akan mengundang pihak swasta untuk menjalin kerjasama. Penyelenggaraan urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui program-program pembangunan antara lain :

- a. Pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Pengembangan kemitraan;
- c. Pengembangan destinasi pariwisata.

Hal lain yang menguntungkan dari sektor pariwisata adalah semakin dikenalnya Kabupaten Kediri sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan tergambar dari kelompok sadar wisata yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari peluang yang tumbuh pada sektor kepariwisataan.

Indikator berikutnya terkait peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan antara lain yang pertama adalah kelompok sadar wisata. Tampak fluktuatif, dengan lonjakan drastis pada tahun 2016, dan menurun di tahun 2017 namun melesat kembali di tahun 2018, dengan target 15 pokdarwis ternyata realisasinya jauh melampaui yakni sejumlah 28 pokdarwis atau 186,67% capaian kinerjanya. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memacu kemandirian desa, khususnya desa wisata yang diharapkan akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

Selanjutnya yakni jumlah restoran/rumah makan, setiap tahunnya mengalami kenaikan, yang berarti bahwa iklim usaha (investasi) di Kabupaten Kediri dalam kondisi yang kondusif. Tampak terlihat dari peningkatan yang terjadi setiap tahunnya pada capaian kinerja pariwisata. Dari jumlah awal 62 unit pada tahun 2016, mengalami kenaikan pesat sekitar 40 unit di tahun 2017 sehingga menjadi 102 unit dan bertambah pula tahun 2018 menjadi 114 unit, sehingga capaiannya sekitar 111,76%. Begitu pula yang terjadi pada indikator Penginapan/hotel, yang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 hanya 18 unit, mengalami penambahan 9 unit di tahun berikutnya, dan bertambah lagi 4 unit, sehingga sampai dengan tahun 2018, terdapat sejumlah 31 unit penginapan/hotel

yang terdata atau capaian kinerjanya sebesar 114,81%.

2.1.3.3.3 Pertanian

Penyelenggaran urusan bidang Pertanian dan Perkebunan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri. Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan yaitu meningkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan memadukan sub sistem sarana prasarana, produksi, distribusi dan pemasaran (permodalan, teknologi dan SDM) secara utuh dan terintegrasi dengan memperhatikan keunggulan potensi ekosistem dan pariwisata dengan strategi :

- a. Mengamankan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui pengendalian hama penyakit, penanggulangan dampak bencana alam banjir dan kekeringan serta memperkecil losses (kehilangan/susut hasil sebagai akibat dari penanganan panen dan pasca panen);
- b. Memenuhi sarana dan prasarana on-farm untuk petani mulai dari ketersediaan pupuk, ketersediaan benih/bibit, pestisida, alat mesin pertanian, infrastruktur pertanian (berupa jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani dan jalan produksi) sampai dengan memulihkan kembali kesuburan tanah lahan pertanian dan optimalisasi lahan;
- c. Pengembangan Agribisnis pertanian mulai dari sarana produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan sampai pemasaran hasil;
- d. Meningkatkan penguasaan teknologi pertanian melalui pelatihan-pelatihan, sekolah lapang, demplot dan sosialisasi serta laboratorium lapang;
- e. Memenuhi ketersediaan data dan informasi sebagai pendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan kemampuan berusaha tani dan pemanfaatan pekarangan;
- g. Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan.

Capaian kinerja sasaran strategis pembangunan pertanian daerah adalah meningkatnya produksi bahan pangan utama dan meningkatnya produksi hasil perkebunan yang ditunjukkan dengan indikator nilai produksi bahan pangan utama (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar) sebesar 803.382 ton sedikit dibawah target yaitu sebesar 819.000 ton atau dengan capaian sebesar 98,09%, disebabkan penurunan produksi padi, akan tetapi diimbangi dengan kenaikan produksi jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Adapun nilai produksi perkebunan (tebu, kakao, kopi, cengkeh dan kelapa) sebesar 2.319.670 ton sedikit mendekati target sebesar 2.381.700 ton. Hal

ini disebabkan terutama karena penurunan produksi pada komoditas tanaman tebu, sedangkan komoditas lain relatif tetap.

Dibandingkan tahun 2017 produksi bahan pangan utama menurun 3,60%, hal ini disebabkan karena anomali iklim dan pergeseran tanam sehingga berdampak pada penurunan luas tanam dan luas panen khususnya tanaman padi sebagaimana tabel di berikut.

**TABEL 2.79
CAPAIAN NILAI PRODUKSI PERTANIAN TAHUN 2016 - 2018**

No	Formula	2016	2017*	2018**
1	Jumlah produksi bahan pangan utama	854.329	815.527	803.382
2	Jumlah produksi hasil perkebunan	234.260	238.171	231.967

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Kediri
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

3.1. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Capaian tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara lebih rinci seperti pada tabel berikut :

**TABEL 2.80
PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA TAHUN 2016 - 2018**

No	U R A I A N	T A H U N		
		2016	2017*	2018**
I	PRODUKSI PERTANIAN			
A	PRODUKSI BAHAN PANGAN UTAMA (TON)			
1	PADI	341.555	319.535	293.347
2	JAGUNG	322.930	339.955	343.550
3	UBI KAYU	178.363	147.349	156.456
4	UBI JALAR	11.481	8.688	10.478
B	PRODUKSI SAYURAN UTAMA (TON)			
1	BAWANG MERAH	11.430	11.862	12.612
2	CABE BESAR	7.464	7.445	5.741
3	CABE KECIL	22.036	31.198	35.111
C	PRODUKSI BUAH - BUAHAN UTAMA (TON)			
1	NANAS	36.377	105.493	132.003
2	MANGGA	36.988	74.146	107.060
3	SIRSAT	5.238	5.292	5.954
4	DURIAN	4.250	6.350	11.007
5	ALPUKAD	4.289	3.802	5.149
6	PEPAYA	31.075	19.501	16.885
7	PISANG	10.397	13.859	11.457
8	NANGKA	5.157	4.896	4.919
9	RAMBUTAN	9.866	12.050	17.219

No	U R A I A N	T A H U N		
		2016	2017*	2018**
10	SALAK	747	502	517
11	SAWO	3.028	1.199	1.380
12	BLIMBING	1.386	1.163	2.305
13	DUKU / LANGSEP	26	32	70
14	JAMBU BIJI	1.879	1.422	2.183
15	JERUK	845	2.104	2.090
D PRODUKSI PERKEBUNAN (x 10 Ton)				
1	TEBU	215.709	237.733	231.527
2	KAKAO	44	39	39
3	KOPI	56	56	57
4	CENGKEH	31	32	33
5	KELAPA	310	311	311
II PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN UTAMA				
A PRODUTIVITAS BAHAN PANGAN UTAMA (TON/HA)				
1	PADI	5,99	6,10	6,07
2	JAGUNG	6,31	6,40	6,52
3	UBI KAYU	30,90	31,65	34,50
4	UBI JALAR	33,76	30,59	34,47
B PRODUKTIVITAS SAYURAN UTAMA (TON/HA)				
1	BAWANG MERAH	6,32	6,69	6,87
2	CABE BESAR	6,70	6,53	7,15
3	CABE KECIL	4,16	5,45	5,75
C PRODUKTIVITAS BUAH-BUAHAN UTAMA (TON/HA)				
1	NANAS	73,15	74,69	79,30
2	MANGGA	6,69	7,25	8,46
3	SIRSAT	7,99	6,87	7,62
4	DURIAN	5,00	7,04	7,15
5	ALPUKAD	4,98	5,02	6,60
6	PEPAYA	57,19	52,85	57,18
7	PISANG	10,29	10,06	9,82
8	NANGKA	3,88	3,93	4,42
9	RAMBUTAN	5,00	4,94	5,20
10	SALAK	15,71	15,71	15,70
11	SAWO	4,56	3,95	4,31
12	BLIMBING	5,93	5,99	6,58
13	DUKU / LANGSEP	3,00	3,00	5,32
14	JAMBU BIJI	14,62	14,10	12,03
15	JERUK	16,53	18,11	21,30
D PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN (TON/HA)				
1	TEBU	107,31	108,36	108,47
2	KAKAO	0,30	0,30	0,30
3	KOPI	0,61	0,61	0,62
4	CENGKEH	0,16	0,17	0,18
5	KELAPA	0,64	0,64	0,64

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Secara umum produksi bahan pangan utama tahun 2018 ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun yang mengalami kenaikan adalah komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, sementara komoditas padi mengalami penurunan. Faktor dominan yang menyebabkan penurunan produksi padi dikenakan menurunnya luas tanam dan panen akibat pengaruh iklim sehingga berganti ke komoditas lainnya. Sedang produktivitas 3 tahun terakhir mengalami peningkatan untuk komoditas Jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Untuk tanaman pangan, pengaruh iklim khususnya curah hujan, mempengaruhi terjadinya pergeseran tanam dari padi ke tanaman jagung, dan juga karena pengaruh OPT pada tanaman tebu, sehingga tanaman tebu yang dibudidayakan di lahan kering sebagian beralih ke lahan sawah, untuk menghindari serangan endemis OPT.

Produktivitas perkebunan belum mencapai target dengan pencapaian 98,61% (Tebu dan Cengkeh mencapai target, sementara kakao, kopi dan kelapa belum mencapai target yang ditetapkan). Hal ini berkaitan dengan intensitas budidaya, pemanfaatan benih unggul dan pengaruh anomali iklim khususnya curah hujan yang sangat berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap produksi dan produktivitas, serta harga pasar komoditas, yang mempengaruhi animo petani dalam membudidayakannya.

Dilihat dari tabel produksi dan produktivitas, produksi bawang merah mengalami kenaikan dari 11.862 ton ditahun 2017 menjadi 12.612 ton pada tahun 2018. Demikian pula cabe kecil dari 31.198 ton ditahun 2017 menjadi 35.111 ton pada tahun 2018. Sementara itu, untuk tanaman cabe besar, produksinya mengalami penurunan di tahun 2017 berproduksi 7.445 ton turun ditahun 2018 menjadi 5.741 ton. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan luas tanam dan panen. Mengingat faktor curah hujan di tahun 2018 yang kurang sehingga ketersediaan airpun mengalami penurunan. Sementara itu, sentra produksi cabe besar ada di Kecamatan Kepung dimana waktu tanam yang menunggu hujan turun. Dalam tiga tahun terakhir produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura mengalami fluktuasi (ada yang naik ada yang turun). Produksi sayuran utama seperti, cabe kecil dan bawang merah meningkat di tahun 2018.

Komoditas buah-buahan utama tahun 2018 seperti : nanas, mangga, sirsat, durian, alpukat, nangka, rambutan, salak, sawo, blimbing, duku, dan jambu biji mengalami peningkatan. Hal ini terkait dengan peningkatan intensitas budidaya dan iklim yang mendukung.

Namun demikian, kenaikan produktivitas pada sebagian besar komoditas, belum mampu menutupi penurunan produksi yang diakibatkan oleh menurunnya luas tanam dan panen. Untuk itu upaya peningkatan produktivitas harus terus ditingkatkan, baik melalui penggunaan bibit unggul, pemupukan yang berimbang, peningkatan kesuburan tanah, penggunaan teknologi pertanian, sistem tanam, maupun dengan melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP), sehingga laju penurunan produksi akibat penurunan luas tanam dan panen bisa diminimalisasi.

Pengembangan Agribisnis untuk penumbuhan dan pengembangan unit usaha pertanian yang dikelola oleh petani/kelompok tani di pedesaan atau di sentra produksi mulai dari hulu yakni usaha yang bergerak dibidang sarana produksi dan alat mesin pertanian sampai dengan hilir yakni usaha yang bergerak dibidang pengolahan/prosesing dan pemasaran hasil pertanian, berupa produk segar maupun olahan jadi dan setengah jadi. Penerapan agribisnis secara produktif dan efisien dapat menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi di pasar. Disamping itu dengan berkembangnya usaha pertanian di pedesaan dan sentra-sentra produksi akan dapat memperluas kesempatan kerja dan menghambat laju urbanisasi.

2.1.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sesuai dengan lampiran undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Energy dan Sumber Daya Mineral yang meliputi sub urusan geologi, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi dan ketenaga listrikian menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Adapun kewenangan kabupaten/kota pada sub urusan energi baru terbarukan berupa penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota. Terkait sub urusan mineral dan batu bara yang didalamnya termasuk izin pertambangan, kabupaten/kota hanya membantu pemerintah pusat dan provinsi

2.1.3.3.5 Perdagangan

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri telah melaksanakan pembangunan di bidang Perdagangan dan Perindustrian dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain meliputi tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di dalam mendorong iklim berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat baik melalui pembangunan sarana prasarana perdagangan berupa revitalisasi pasar dan rehap pasar, perencanaan pembangunan pasar dan perencanaan kawasan Industri Kabupaten, misi dagang, pameran, pelatihan ekspor impor, serta pelatihan pada Industri Kecil

Menengah (IKM) yang semuanya berorientasi kepada pengembangan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Kediri.

Capaian sasaran strategis perdagangan yaitu meningkatnya kontribusi sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan nilai ekspor tahun 2018 sebesar 58,926.82 USD meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 40,338.29 USD.

Sesuai dengan misi Kabupaten Kediri ke-6 yaitu :“Menumbuh kembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro”. Maka, Dinas Perdagangan ikut berperan untuk mempromosikan produk pelaku usaha maupun IKM, memberdayakan IKM melalui pelatihan, pameran, misi dagang dan temu usaha. Perkembangan kinerja bidang perdagangan pada tahun 2016–2018 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.81
PERKEMBANGAN KINERJA URUSAN PERDAGANGAN
TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
A	Volume perdagangan Perkembangan ekspor : a. Nilai ekspor daerah (ribu US \$) b. % Pertumbuhan ekspor	18,895.16 13.37	40,338.29 108.74	58,926.82 46.08
B	Kepemilikan perizinan usaha perdagangan			
1	% Jumlah usaha perdagangan yg memiliki perizinan	46,40	47,73	
2	Jumlah Pendaftaran Perusahaan (unit)	1.484	1.300	1.075
3	Jumlah permintaan surat izin usaha : a. Besar b. Sedang c. Kecil	1 108 1.210	6 87 1.094	6 87 907
4	Penerbitan SIUP	1.319	1.187	1.002

Sumber :Dinas Perdagangan Kab. Kediri

**) Angka diperbaiki*

***) Angka sementara*

Perkembangan kinerja perdagangan tahun 2018 mengalami tren kenaikan sehingga menyebabkan meningkatnya nilai ekspor daerah. Adapun data kepemilikan perizinan usaha perdagangan tahun 2018 terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh hanya pada periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2018. Dengan berlakunya OSS (Online Single Submission) dimana perijinan langsung ke pusat, sedangkan daerah belum memiliki akses untuk memperoleh data perijinan tersebut.

Capaian kinerja yang perlu dipertahankan adalah keberhasilan menurunkan kasus penyelewengan perdagangan dari tahun 2016-2018. Menurunnya kasus penyelewengan perdagangan berdampak positif pada kelancaran distribusi barang, kestabilan harga dan terutama perlindungan bagi konsumen untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar. Perkembangan nilai ekspor dan impor menurut komoditas kurun waktu tahun 2016-2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.82
PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR DAN IMPOR MENURUT KOMODITAS
TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN			(US \$)
		2016	2017*	2018**	
I	EKSPOR				
1	Produk industri	8.017.403,71	37.001.535,00	39.123.934,19	
2	Kertas				
3	Produk Industri	11.307.291,69	3.007.388,93	17.333.354,11	
4	Kayu	-	246.401,57	-	
	Bahan Kimia	-	82.959,96	25.537,97	
	Produk Pertanian				
	Jumlah	19.324.695,40	40.338.285,46	58.926.818,27	
II	IMPOR				
1	Bahan Baku	128.766.616,20	64.250.932,16	148.645.108,77	
2	Kertas/Pulp				
3	Chemical	24.883.524,35	13.878.608,26	30.110.444,77	
4	Spare parts	6.967.015,97	5.565.806,43	10.943.870,60	
5	Lobak	-	67.673,18	94.784,65	
	Sawi	-	85.265,95	339.436,14	
	Jumlah	160.617.156,52	83.848.285,98	190.133.644,93	

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

2.1.3.3.6 Perindustrian

Capaian kinerja utama industri ditujukan untuk mengembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yang ditunjukkan dengan PDRB ADHK per kapita sebesar 16,98 (juta rupiah) sama dengan target yaitu sebesar 16,98 (juta rupiah) dan Angka

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,16% melebihi dari target Angka Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,98%.

Adapun Capaian kinerja sasaran strategis pembangunan industri daerah diarahkan pada sektor industri yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan industri sebesar 2.884 unit atau dengan capaian sebesar 84,82%.

Penyelenggaraan urusan industri dikelola oleh Dinas Perdagangan dilaksanakan melalui program peningkatan kemampuan teknologi industri yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan. Perkembangan unit usaha sektor industri tahun 2016-2018 setiap tahun menunjukkan kenaikan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.83
PERKEMBANGAN UNIT USAHA DAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI
TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Jenis Usaha (Unit)			
	- Industri Kecil/Rumah Tangga	1.983	2.640	2.667
	- Industri Sedang/Menengah	178	197	203
	- Industri Besar	14	14	14
	Jumlah	2.175	2.851	2.884
2.	Tenaga Kerja (Orang)			
	- Industri Kecil	29.238	29.523	29.712
	- Industri Menengah/Sedang	14.240	14.858	15.308
	- Industri Besar	1.214	1.214	1.214
	Jumlah	44.692	45.595	46.234

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Perkembangan jumlah unit usaha industri tahun 2018 sebesar 2.884 unit usaha. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2016 dan tahun 2017 terfokus pada jenis industri kecil dan industri sedang. Selanjutnya pada tahun 2018 perkembangan jumlah tenaga kerja industri juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 46.234 orang pada industri kecil dan industri sedang/menengah.

Kenaikan jumlah unit usaha industri berjalan paralel dengan perkembangan nilai investasi dan nilai produksi industri tahun 2016 - 2018 setiap tahun mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.84
NILAI INVESTASI DAN NILAI PRODUKSI INDUSTRI
TAHUN 2016 - 2018

TAHUN	NILAI INVESTASI		NILAI PRODUKSI	
	Jumlah (Ribuan Rp)	% Δ thd. Tahun yl	Jumlah (Ribuan Rp)	% Δ thd. Tahun yl
2016	220.330.733	11,07	1.511.225.000	24,26
2017*	313.826.823	42,43	1.838.033.455	21,63
2018**	332.753.573	6,03	2.180.375.265	18,63

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai investasi industri tahun 2018 sebesar Rp. 332.753.000 mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 dan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp. 220.330.733 dan Rp. 313.826.823. Demikian pula nilai produksi industri tahun 2018 sebesar Rp. 2.180.375.265 mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp. 1.511.225.000 dan Rp. 1.838.033.455.

2.1.3.3.7 Transmigrasi

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kapasitas ekonomi penduduk di tengah kemampuan menyediakan lapangan kerja di dalam daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan program Transmigrasi. Dengan paradigma baru, transmigrasi menjadi alternatif dalam rangka mewujudkan pemerataan penduduk, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Perkembangan pelayanan transmigrasi Tahun 2016-2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.85
PERKEMBANGAN PELAYANAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Jumlah kerjasama dengan daerah tujuan penempatan transmigran	-	1	1
2	% Calon transmigran yang lolos diseleksi	93,00	66,67	100
3	% Calon transmigran yang dilatih	50,00	100	100
4	Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK)	-	4	2

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
5	% Jumlah transmigran dilatih yang diberangkatkan	-	4	2

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri.

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Tingkat kemauan masyarakat Kabupaten Kediri pada tahun 2018 untuk bertransmigrasi relatif masih tinggi, Kemauan yang tinggi masyarakat tersebut tidak seluruhnya dapat diakomodasikan karena terbatasnya lokasi daerah tujuan yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat dengan daerah tujuan yang dipilih dan diminati calon transmigran. Hal tersebut tampak dari perbandingan antara jumlah calon transmigran yang diseleksi, dilatih, dan akhirnya diberangkatkan. dari anggota masyarakat yang mendaftar menjadi calon transmigrasi banyak, hal ini tidak bisa kita tindak lanjuti dikarenakan keterbatasan kuota yang ditentukan oleh pusat, Kabupaten Kediri mendapat kouta 2 KK dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Toli Toli Provinsi Sulawesi Tengah dengan UPT Janja di kawasan transmigrasi Basidondo, Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli Toli Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan

Bappeda mengkoordinasikan seluruh proses perencanaan secara teknokratis yaitu perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan/metode dalam rangka menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih (tataran politis), baik untuk kurun waktu jangka menengah/lima tahunan maupun jangka pendek/tahunan. Bappeda melakukan verifikasi, menganalisis dan memformulasikan sesuai kaidah-kaidah ilmiah perencanaan terhadap materi perencanaan yang diperoleh lewat penyerapan aspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders).

Sedangkan tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana umumnya dilakukan secara bersamaan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik (triwulan), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan sebagai dasar melakukan koreksi/penyesuaian yang diperlukan.

Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD atas penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan adalah “Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan dan ketersediaan data informasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Untuk sasaran dan target kinerja realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Bappeda pada tahun 2018 dalam rangka penunjang daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.86
KINERJA TINGKAT EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2018**

No	INDIKATOR	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian
1	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	90%	100%	111%
2	Persentase PD yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	90%	100%	111%
3	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	95%	100%	105%
4	Persentase data dan informasi pembangunan yang dimanfaatkan stakeholder	80%	100%	125%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri.

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

2.1.3.4.2 Keuangan

Fungsi penunjang bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah

2.1.3.4.2.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Capaian sasaran strategis bidang keuangan yang dilaksanakan BPKAD adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditunjukkan dengan indikator opini BPK dalam rangka menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

BPKAD sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan pada tahun 2018 melaksanakan program yaitu Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.

2.1.3.4.2.2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Capaian sasaran strategis terkait pendapatan daerah adalah meningkatnya pajak dan retribusi daerah yang ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan pajak retribusi daerah. Pertumbuhan pajak tahun 2018 sebesar 28,75% melebihi target sebesar 7,82% atau capaian sebesar 367,65%.

Program yang ditangani Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun 2018 antara lain :

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peningkatan Pendapatan Daerah.

Capaian kinerja atas pelaksanaan urusan keuangan pada pendapatan daerah sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.87
PERKEMBANGAN KINERJA PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN			<i>(Persen)</i>
		2016	2017*	2018**	
1	Peningkatan PAD	7,92	57,49	-20,94	
2	Kontribusi PAD thd Pendapatan Daerah	14,16	19,65	16,62	
3	Kontribusi PAD thd Belanja Daerah	12,96	19,28	17,42	
4	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah :				
	1) Pajak	8,95	51,80	28,75	
	2) Retribusi	36,85	9,46	3,19	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

2.1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri tidak terlepas dari kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah, baik dalam menjalankan tugas-tugas umum maupun pembangunan. Pendayagunaan aparatur pemerintah ditujukan untuk menciptakan aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa serta dilandasi semangat dan sikap pengabdian, bersifat meneladani, mengayomi dan melayani masyarakat, serta sanggup menumbuhkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Peningkatan kualitas kerja dan prestasi aparatur harus ditunjang dengan sarana prasarana yang mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan. Dalam mewujudkan sistem kepegawaian, kebijakan pembangunan bidang kepegawaian dilakukan melalui evaluasi terhadap formasi dan pengadaan pegawai, pengelolaan mutasi pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Program pembangunan kepegawaian/aparatur pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) meliputi :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pengukuran kinerja kepegawaian digambarkan melalui empat aspek, yaitu kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, meningkatnya kapasitas penyelenggaraan diklat, pengelolaan aparatur yang profesional, dan kapasitas pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.88
PERKEMBANGAN KAPASITAS SDM DAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	KINERJA		
		2016	2017*	2018**
A	Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah			
1	% Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan :			
	a. Struktural	76.15	78.86	78.89
	b. Teknis	67.44	79.94	81.25

No	INDIKATOR	KINERJA		
		2016	2017*	2018**
	c. Fungsional	32.38	34.96	37.19
2	% Kelulusan peserta pendidikan dan latihan:			
	a. Struktural	100	100	100
	b. Teknis	100	100	100
	c. Fungsional	100	100	100
B	Kapasitas penyelenggaraan Diklat			
1	% penyelenggaraan pendidikan dan latihan:			
	a. Struktural	-	96.39	95.24
	b. Teknis	93.78	100	100
	c. Fungsional	61.53	77.06	62.01
C	Kapasitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
1	% Pemenuhan jumlah pejabat dibanding dengan jumlah jabatan	69,48	79,05	83,10
2	% Pemenuhan pegawai dibanding dengan kebutuhan	67,07	64,11	59,95
3	% Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu :			
	a. SK CPNS	69.48	79.05	83.10
	b. SK PNS	67.07	64.11	58.55
	c. SK Pensiu	100	100	100
	d. SK Kenaikan Pangkat	100	100	100
	e. SK Mutasi	100	100	100
	f. SK Gaji Berkala	100	100	100
D	Pengelolaan Aparatur yang Profesional			
1	% Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	76.15	78.86	78.89
2	% PD yang memiliki jabatan fungsional	13.04	12.00	12.00
3	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai (kasus)	24	15	12

No	INDIKATOR	KINERJA		
		2016	2017*	2018**
4	% Jumlah pegawai fungsional yang mengikuti diklat fungsional	32.38	34.96	37.19
5	% jabatan struktural/eselonering yang terisi	69.45	79.05	83.10
6	% Jabatan Struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 41 tahun 2007	100	109.03	118.19
E	Persentase ASN yang mendapat penilaian prestasi kerja minimal baik	99	99	99

Sumber : BKD Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Secara umum, kegiatan pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu melalui diklat struktural, teknis, dan fungsional. Ketiga kategori pendidikan dan pelatihan tersebut memiliki tingkat kelulusan sebesar 100%, dengan kata lain semua pegawai lulus dalam pendidikan dan pelatihan. Untuk pembinaan pegawai masih dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga capaian persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dipertahankan seperti pada tahun 2017. Untuk perkembangan jumlah PNS di lingkungan Kabupaten Kediri pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.89
PERKEMBANGAN JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN			(Orang)
		2016	2017*		
1. Jumlah PNS berdasarkan Golongan					
	a. Golongan I	219	202	175	
	b. Golongan II	2,000	1,829	1,538	
	c. Golongan III	4,269	4,224	4,119	
	d. Golongan IV	4,771	4,506	4,231	
2. Jumlah PNS berdasarkan pendidikan					
	a. SD	155	146	122	
	b. SLTP	219	193	169	
	c. SLTA	2,056	1,920	1,770	
	d. D-1	138	136	132	

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	
	e. D-2	913	830	737
	f. D-3/ Sarjana Muda	949	952	932
	g. D-4	35	39	41
	h. Sarjana (S1)	6,362	6,141	5,787
	i. Pasca Sarjana (S2)	427	400	370
	j. Doktor (S3)	5	4	3
	k. SD	155	146	122
3.	Jumlah PNS yang mengikuti program diklat			
	a. LPJ (Diklat Prajabatan)	453	-	49
	b. Diklat Kepemimpinan Tk. IV	-	80	40
	c. Diklat Kepemimpinan Tk. III	-	-	-
	d. Diklat Kepemimpinan Tk. II	-	3	2
	e. Diklat Teknis/Fungsional	201	595	599
	f. Psikotes	-	245	276
	g. Izin Belajar	-	45	61
	h. Tugas Belajar	7	6	3
	i. Ujian Dinas	-	83	-
	j. Ujian Penyesuaian Ijasah	-	-	-
	k. Orientasi	-	-	-
4.	PNS yang menduduki jabatan Struktural/Fungsional			
	a. Eselon II	25	24	19
	b. Eselon III	152	150	155
	c. Eselon IV	558	548	534
	d. Eselon V	10	10	10
	e. Jabatan Fungsional Tertentu	7,619	7,650	7,125
	f. Jabatan Fungsional Umum	2,895	2,469	2,220
	g. PNS Pensiu	-	580	572
5.	Jumlah Total PNS	11.259	10.761	10.063
6.	Jumlah kebutuhan pegawai sesuai Analisa Jabatan	16,785	16,785	17,187

Sumber : BKD Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Meningkatnya kinerja kepegawaian juga diikuti dengan upaya menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Untuk memberikan efek jera berbagai kriteria sanksi disiplin dikenakan kepada pegawai. Adapun jumlah pegawai yang mendapatkan sanksi disiplin sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.90
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDAPATKAN
SANKSI DISIPLIN TAHUN 2016 - 2018

(Orang)

No	JENIS SANKSI DISIPLIN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	RINGAN			
	a. Teguran Lisan	-	2	-
	b. Teguran Tertulis	2	1	1
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	1	-	1
2	SEDANG			
	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) paling lama 1 tahun	3	4	1
	b. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	2	1	-
	c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun	4	-	2
3	BERAT			
	a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	5	2	1
	b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	1	-	-
	c. Pembebasan dari jabatan	-	-	-
	d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	1	1	5
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	4	2	1

Sumber : BKD Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendorong Inovasi, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai penguat daya saing daerah. Indikator capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Indikator tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan sekaligus meningkatkan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kediri. Kegiatan penelitian dan pengembangan daerah melibatkan stakeholder dalam penyusunan kajian-kajian diperlukan dalam rangka pengembangan potensi yang ada didaerah. Program yang dilaksanakan oleh Balitbangda yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

TABEL 2.90
CAPAIAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2016-2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Persentase implementasi rencana kelitbangana	-	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangana	-	25	25
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	-	-	20
4	Persentase kabijakan inovasi yang diterapkan Daerah	-	-	100
5	Jumlah dokumen penguatan SIDa	-	1	1

Sumber : BKD Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 jumlah dokumen kelitbangana yang dihasilkan adalah sebanyak 8 dokumen, dan PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah sebanyak 13 PD. Inovasi yang dihasilkan pada tahun 2018 adalah pemanfaatan limbah nanas.

2.1.3.4.5 Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah. Tugas pokok dan fungsinya adalah perumusan program dan kegiatan teknis Sekretariat DPRD, penyusunan rencana, pengelolaan, penelaahan, pengoordinisan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD, penyelenggaraan dan pembinaan administrasi umum, keuangan, aset, kehumasan dan protokol, kepegawaian, persidangan, dan perundang-undangan DPRD, pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD dan pengintegrasian dan sinkronisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.

Data kuantitatif lebih terinci mengenai kinerja peningkatan peran DPRD terlihat dalam tabel berikut:

TABEL 2.91
RINCIAN KINERJA PENINGKATAN PERAN DPRD
TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	KINERJA		
		2016	2017*	2018**
1	% Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	73	78	75
2	% Jumlah Perda yang ditetapkan tepat waktu	73.33	84.62	275
3	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	-	78.9	80.8

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

2.1.3.4.6 Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas PD serta pelayanan administratif Sekretariat Daerah terdiri atas bagian-bagian:

2.1.3.4.6.1 Bagian Administrasi Pemerintah

Fungsi yang diselenggarakan Bagian Administrasi Pemerintahan sebagai pelaksana tugas sekretariat daerah di bidang administrasi pemerintahan yaitu : pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan serta hal-hal teknis tentang pelaksanaan tata pemerintahan, kerja sama daerah, toponimi, kode dan data administrasi wilayah pemerintahan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi wilayah pemerintahan.

Penyiapan Indikator sasaran yang dilaksanakan adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.92
CAPAIAN KINERJA BIDANG PEMERINTAHAN
TAHUN 2016 - 2018

No	Indikator Kinerja	2016	2017*	2018**
1.	% penetapan batas daerah yang sudah berkekuatan hukum	50	50	50
2.	Jumlah perjanjian kerjasama hasil tindaklanjut dari kesepakatan bersama	9	12	12
3.	Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten secara nasional	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Status penyelesaian pembakuan nama-nama unsur rupa bumi (nama Desa dan Dusun untuk Tahun 2016 dan 2017) dan Warisan Budaya yang bersifat Kebendaan Tahun 2018	50	100	35

Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan Kab. Kediri

**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Perkembangan dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.93
PERKEMBANGAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN KINERJA BAGIAN
PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2016 - 2018

No	U R A I A N	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	197	198	112
2	Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	113	136	67
3	Rapat koordinasi unsur Muspida	53	76	67
4	Ketersediaan dokumen LPPD (buku)	30	30	30
5	Jumlah MoU dan Perjanjian	14	21	13
6	Permendagri batas daerah (segmen)	2	-	-

Sumber : Bakesbangpol, Bagian Adm. Pemerintahan dan Bagian Umum Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

2.1.3.4.6.2 Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas, pokok dan fungsi melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai aturan yang berlaku.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Hukum tercermin dari terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum, bantuan hukum dalam kedinasan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara luas untuk pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.94
PERKEMBANGAN KINERJA BAGIAN HUKUM TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Penyelesaian kasus hukum	25	100	11
2	Jumlah raperda yang disusun (buah)	14	11	17
3	% Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	42,85	84,61	73,91
4	% Rancangan Perda yang diajukan ke DPRD	100	42,30	17,39
5	Kelompok Kadarkum yang terbentuk (kelompok)	1	1	1
6	% Perda yang disosialisasikan	100	100	100

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Data kuantitatif penyelenggaraan kegiatan dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum selama tahun 2016 - 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

TABEL 2.95
PERKEMBANGAN PRODUK HUKUM DAN MASALAH HUKUM
TAHUN 2016 - 2018

No	U R A I A N	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Produk Peraturan Perundang-undangan :			
	a. Peraturan Daerah	14	11	11
	b. Peraturan Bupati	69	39	62
	c. Keputusan Bupati	278	386	401
	d. Keputusan Sekretaris Daerah	6	15	11
2.	Rapat Konsultasi dalam rangka Penyusunan Rancangan Raperda	90	95	150
3.	Brosur Penerangan Hukum	8	8	8
4.	Kegiatan Studi Banding dalam rangka Penyusunan Produk Hukum	10	15	5
5.	Jumlah Kasus Hukum yang ditangani	4	6	11
6.	Penyuluhan hukum melalui :			
	a. Masyarakat/pelajar	24.375	35.000	23.275
	b. Radio	3	2	-
	c. Spot TVC, radio	4	5	10
	d. Media Cetak	60	60	60
7.	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	10	10	10
8.	Jumlah Peserta Kadarkum	400	400	400
9.	Penggandaan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100
10.	Penerbitan Lembar Lepas	1.050	1.050	1.050
11.	Lembaran Daerah	150	150	150
12.	Penerbitan Buletin Informasi Hukum	600	600	600

Sumber : Bagian Hukum Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

2.1.3.4.6.3 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, pokok dan fungsi yaitu melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang keagamaan, sosial, seni, budaya, pendidikan, pemuda dan olah raga dan pemberdayaan perempuan.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat antara lain :

1. Fasilitas Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur;
2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan;
3. Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK;
4. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemerintah Daerah.

Penerapan dan penjabaran indikator sasaran dalam perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah :

- a. Kebijakan bidang sosial dan budaya diarahkan pada:
 1. Upaya pengembangan bagi organisasi sosial sebagai mitra kerja pemerintah dalam usaha peningkatan di bidang kesejahteraan bagi penyandang masalah sosial, peningkatan penunjang sarana kegiatan anak didik dan mahasiswa;
 2. Kegiatan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) dalam rangka memperingati hari besar nasional sebagai peningkatan rasa nasionalisme pada NKRI;
- b. Kebijakan bidang olah raga serta pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan prestasi generasi muda dalam bidang keolahragaan, kepeloporan bidang kewirausahaan, peningkatan kesehatan jasmani rohani yang bertujuan untuk pembentukan kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi dalam peningkatan prestasi serta membangkitkan rasa kebangsaan nasional serta peningkatan kesadaran penyuluhan kesehatan dan pencegahan serta pemberantasan penyakit dan narkoba;
- c. Kebijakan bidang agama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama sehingga akan tercapai peningkatan keimanan dan ketaqwaan, kerukunan antar umat beragama, suasana kehidupan beragama yang dinamis dengan dijawi rasa persatuan dan kesatuan yang mantap dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan di bidang keagamaan di Kabupaten Kediri didukung dengan perkembangan sarana dan prasarana keagamaan seperti masjid, mushola/langgar, gereja dan pura. Perkembangan sarana keagamaan selama tahun 2016-2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.96
PERKEMBANGAN SARANA KEAGAMAAN
TAHUN 2016 - 2018

(Buah)

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Masjid	1.907	1.907	1.907
2.	Mushola/Langgar	5.595	5.703	5.703
3.	Gereja Kristen Katolik	35	35	35
4.	Gereja Kristen Protestan	257	257	257
5.	Pura	59	59	59

Sumber : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Meningkatnya kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk hibah untuk kegiatan keagamaan kepada kelompok/anggota masyarakat, sebanyak 415 kegiatan dengan capaian 100% Kegiatan keagamaan yang difasilitasi adalah : Pembinaan mental karyawan/ karyawati, penyelenggaraan safari sholat malam, sholat malam di pendopo, sholat jumat di Masjid Al Furqon, peringatan Hari Besar Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Safari Ramadhan, Istigosah/doa bersama, seleksi peserta MTQ Tingkat Provinsi Jatim dengan capaian kinerja 100%. Capaian indikator kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.97
CAPAIAN INDIKATOR RPJMD KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2018

No	INDIKATOR	2018**
1	% rumusan kebijakan keagamaan yang difasilitasi	95
2	% rumusan kebijakan olahraga yang difasilitasi	90
3	% rumusan kebijakan sosial yang difasilitasi	99

Sumber : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kab. Kediri

**) Angka sementara

Sarana dan prasarana khusus pendidikan keagamaan dapat diketahui dari adanya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan baik di tingkat Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Disamping itu ditunjang dengan lembaga non-formal dan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Kabupaten Kediri. Perkembangan jumlah pondok pesantren sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.98
PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN
TAHUN 2016 - 2018

No	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Pondok Pesantren (Buah)	238	264	264
2.	Penghuni Pondok Pesantren (Orang)	25.323	25.653	25.653

Sumber : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kab. Kediri

**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.4.6.4 Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, serta monitoring perkembangan di bidang sarana prasara perekonomian, produksi daerah, pertambangan umum dan energi serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Capaian strategis bagian perekonomian diarahkan dalam rangka meningkatnya koordinasi di bidang perekonomian yang ditunjukkan dengan indikator persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dan persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan dengan capaian sebesar 100%, dan persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%.

TABEL 2.99
CAPAIAN BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya koordinasi di bidang perekonomian	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	85%	85%
	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan	100%	80%	80%

Sumber : Bagian Perekonomian Kab. Kediri

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Perekonomian pada dasarnya bersifat mendukung dan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ekonomi (urusan koperasi dan UKM, BUMD, perekonomian makro dan mikro, energi dan sumber daya mineral dan sosial) serta melakukan fungsi koordinasi untuk menjaga terkendalinya fluktuasi harga di daerah.

2.1.3.4.6.5 Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan

Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk, pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan.

Dalam pengukuran keberhasilan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Kabupaten Kediri diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. Berikut adalah gambaran umum mengenai capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya :

**TABEL 2.100
CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
LAYANAN PENGADAAN TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Persentase tingkat penyerapan anggaran PD di atas 80%	81,82	84,13	85,99
2	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang prosesnya sesuai perundangan/pedoman	99,29	100	100
3	Persentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yg menjadi kebijakan	100	100	100

Sumber : Bagian Adm. Pembangunan dan Layanan Pengadaan Kab. Kediri

*)Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Pada tahun 2018, persentase tingkat penyerapan anggaran PD di atas 80% tercapai sebesar 85,99%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2017) yang hanya sebesar 84,13%. Hal tersebut dikarenakan Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan melakukan asistensi dan pendampingan kepada PD dalam hal tertib laporan anggaran. Sementara itu, untuk indikator persentase Paket pengadaan barang/jasa yang prosesnya sesuai perundangan/pedoman ditahun 2018 capaiannya dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya (2017) yaitu 100%. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor keberhasilan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait pengadaan barang dan jasa. Adapun untuk indikator ketiga yaitu persentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang menjadi kebijakan telah dipertahankan 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018 yang tercapai dengan angka 100%. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketepatan waktu dalam penyusunan rumusan kebijakan. Dampak dari rumusan kebijakan tersebut dapat dijadikan dasar pedoman dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

2.1.3.4.6.6 Bagian Umum

Bagian Umum merupakan salah satu unsur penyelenggara di bawah Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dalam, persandian dan telekomunikasi. Bagian Umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keuangan Sekretariat Daerah, kegiatan kearsipan, rumah tangga sekretariat serta keamanan dalam terhadap personil, pemeliharaan terhadap bangunan/gedung pejabat daerah, urusan kebersihan taman, pengadministrasian.

Program-program yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dalam mendukung pencapaian misi Pemerintah Daerah pada Tahun 2018 antara lain:

1. Fasilitasi peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur;
2. Pengembangan wawasan kebangsaan;
3. Peningkatan keindahan lingkungan kantor ;
4. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah.

**TABEL 2.101
TINGKAT KINERJA (NILAI IKM) TAHUN 2018**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	81,63	B	Baik
2	Prosedur	82,18	B	Baik
3	Waktu pelayanan	81,49	B	Baik
4	Biaya/tariff	90,88	A	Sangat baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	84,94	B	Baik
6	Kompetensi pelayanan	80,94	B	Baik
7	Perilaku pelaksana	83,98	B	Baik
8	Maklumat pelayanan	78,18	B	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	82,04	B	Baik
	Jumlah	746,27		
	Nilai IKM	82,92	B	Baik

Sumber : Bagian Umum Kab. Kediri

*)Angka diperbaiki **) Angka sementara

2.1.3.4.6.7 Bagian Organisasi

Bagian Organisasi bertugas sebagai pelaksana perumusan kebijakan bidang organisasi, perencanaan program bidang organisasi, penyusunan pengembangan kinerja, penyusunan ketatalaksanaan, perumusan pembinaan pendayagunaan aparatur negara dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang organisasi, pelaksanaan penyusunan kelembagaan dan analisis jabatan.

Program pokok yang dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain :

1. Peningkatan kualitas pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Penataan kelembagaan;
3. Pembinaan dan pengembangan aparatur Pemerintah Daerah.

**TABEL 2.102
PERKEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH
DAERAHTAHUN 2016 – 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Persentase SAKIP PD yang Berpredikat B	65	69	92
2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)	35	35	35
3	Persentase Kelembagaan PD yang tepat sesuai peraturan yang berlaku	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK	100	100	100
5	Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang ketatalaksanaan	100	100	100
6	Persentase PD yang telah menyusun SOP	15,8	15,8	60,3
7	Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang mendapat nilai IKM kriteria baik	33,90	79,92	90
8	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan capaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku	65	75	90

Sumber : Bagian Organisasi & BKD Kab. Kediri
 *)Angka diperbaiki **) Angka sementara

Pada indikator kinerja persentase SAKIP Perangkat Daerah yang berpredikat B target tahun 2018 adalah 83%, hasil evaluasi penilaian dari inspektorat bahwa realisasi persentase SAKIP Perangkat Daerah yang nilai/capaian berpredikat B adalah 92% tercapai dengan angka 110%. Kondisi tersebut dikategorikan sangat berhasil, dikarenakan dari 63 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang nilai capaian SAKIP B adalah 35 OPD. Sementara itu, nilai BB sebanyak 23 OPD, dan yang berpredikat A adalah 5 OPD.

2.1.3.4.7 Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD). Disamping itu Inspektorat juga melaksanakan tugas audit atau pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lain.

**TABEL 2.103
PERKEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2016 - 2018**

(Persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	% Temuan hasil pengawasan/audit yang selesai ditindak-lanjuti	98,89	96,65	96,16
2	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	96,19	90	100
3	% Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP minimal "B"	43	53	53
4	% laporan keuangan pada perangkat daerah sesuai SAP	96,22	98,7	98,7
5	Tingkat kapabilitas APIP	Level 1	Level 2	Level 2

Sumber : Inspektorat Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Secara umum Inspektorat telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Pada tahun 2018 capaian persentase laporan keuangan pada PD sesuai SAP 98,7% hal ini menunjukkan dengan adanya opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2018 "WTP" sehingga temuan hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti mencapai nilai sebesar 98,16%. Perangkat Daerah yang mendapat nilai evaluasi atas Implementasi SAKIP sebesar 53% hal ini karena dari jumlah total 63 PD yang

di evaluasi untuk tahun 2018 hanya 35 PD (26 Kecamatan tidak di evaluasi). Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2018 memperoleh hasil 70,38%.

2.1.3.4.8 Penanggulangan Bencana

Fungsi penunjang urusan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tugas adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penanganan kejadian bencana di Kabupaten Kediri dari beberapa jenis bencana capaiannya 100%. Disamping capaian tersebut pada tahun 2018 telah dibentuk : 4 Desa Tangguh Bencana (DESTANA).

**TABEL 2.104
CAPAIAN PENANGGANAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2018**

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	-	2 Desa	4 Desa
2	% Masyarakat Tangguh Bencana	5%	25%	50%
3	% Penanganan bencana dan pemenuhan logistik kedaruratan secara cepat dan tepat	100%	100%	100%
4	% KK terdampak yang terfasilitasi	100%	100%	100%

Sumber : BPBD Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

2.1.3.4.9 Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun program Bakesbangpol pada tahun 2018 dalam hal ini adalah:

- a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- c. Pendidikan Politik kepada Masyarakat
- d. Pemilihan Umum
- e. Penunjang Biaya Operasional Belanja Hibah

Kinerja atas 5 program tersebut menggunakan indikator sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 2.105
PERKEMBANGAN KINERJA URUSAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI TAHUN 2016 - 2018

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
A	Kerukunan dan kepedulian sosial antar umat beragama dan kelompok masyarakat			
1	Peserta Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Orang)	600	970	700
2	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100	100
3	Persentase tingkat partisipasi aktif tokoh agama dalam penanganan konflik dan memelihara kehidupan umat beragama yang harmonis, rukun dan damai	90	90	90
4	Peserta Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa (Orang)	600	260	500
5	% Pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui seni budaya kesenian	-	441	72
6	% Penyelenggaraan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	100	200	851
7	Persentase Penanganan kejadian konflik terkait poleksosbud dan ketertiban masyarakat			
B	Suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	100	100	100
1	% Koordinasi pengendalian keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	100	159	84
2	% Penyelenggaraan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	67	696	696

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
3	% Peserta kegiatan pelatihan deteksi dan kewaspadaan dini masyarakat	106	800	1.080
4	% tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih	60	60	69
5	% Peningkatan ormas/ LSM yang terdaftar	70	70	0

Sumber : Bakesbangpol Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Dalam upaya Peningkatan Kerukunan dan kepedulian sosial antar umat beragama dan kelompok masyarakat diwilayah Kabupaten Kediri. Kondisi kerukunan, kepedulian sosial antar umat beragama dan kelompok masyarakat di Kabupaten Kediri menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten kediri melalui bakesbangpol, mengingat tingkat heterogenitas agama yang ada dimasyarakat serta banyaknya aktivitas masyarakat yang diwarnai oleh aktivitas pelaksanaan Keyakinan atau keagamaan. Sesuai dengan data hasil laporan beberapa kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Wawasan Kebangsaan, Persentase Penanganan Konflik Agama serta peran aktif Tokoh Agama memperoleh capaian cukup bagus dengan rata-rata hasil proges 100 %. Disisi lain didukung pula dengan capaian target terkait Penanganan Konflik dibidang poleksosbud, Kesadaran akan Nilai-nilai Luhur budaya bangsa, termasuk didalamnya peran aktif sosialisasi terkait FKUB dengan hasil capaian rata-rata di atas 90 %. sebagaimana terlihat pada tabel 4.103 di atas.

Sedangkan terkait dengan peningkatan Kondusifitas Daerah di Wilayah Kabupaten Kediri. Kegiatan Koordinasi pengendalian keamanan dan ketertiban, Penyelenggaraan Kegiatan Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM), Pelatihan deteksi dini Masyarakat menjadi perhatian utama dalam upaya pencapaian kondusifitas Daerah dengan capaian rata-rata 100%.

Untuk pembinaan dan pengendalian aktivitas politik masyarakat, telah berhasil menumbuhkan etika dan budaya politik yang mengedepankan kepentingan bersama dengan lancarnya penyelenggaran Pesta Demokrasi Pilup di Tahun 2015 dan Pilgub di Tahun 2018, meningkatnya peningkatan peran aktif masyarakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan yang peduli tentang politik, penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga berdasarkan pada capaian kegiatan tersebut di atas target yang telah di tetapkan.

Akan tetapi pada tataran pembinaan Ormas terutama terkait Persentase pembinaan ORMAS/LSM yang terdaftar sedikit mengalami stagnansi mengingat sejak Awal Tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2018 bahwa terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas dan LSM sudah menjadi kewenangan Pusat/Mendagri. Adapun perkembangan infrastruktur bidang politik tahun 2016-2018 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.106
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR POLITIK TAHUN 2016 - 2018**

No	U R A I A N	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1.	Partai Politik	12	12	12
2.	Partai Politik peserta Pemilu	12	12	12
3.	Ormas Profesi	20	22	23
4.	Ormas Keagamaan	56	58	59
5.	Ormas Kepemudaan	7	12	12
6.	Lembaga Swadaya Masyarakat	81	83	98

Sumber : Bakesbangpol Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator variabel aspek daya saing daerah antara lain:

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami percepatan. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9, mengalami percepatan sebesar 0,30 poin menjadi 5,20 di tahun 2018.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Penyediaan Sarana Infrastruktur Daerah

Penyediaan sarana infrastruktur daerah salah satunya meliputi pembangunan jalan dan jembatan. Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan berhasil memenuhi seluruh kebutuhan jalan/jembatan, dalam artian kebutuhan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah dapat dipenuhi. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 1.079,41 Km. Perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.107
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN 2014 – 2018

(Km)

No	URAIAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Status dan Panjang jalan :					
	a. Pusat	39.963	39.963	39.963	39.963	39.963
	b. Provinsi	79.616	79.616	79.616	79.616	79.616
	c. Kabupaten	2.669,260	2.740,15	3.171.190	1.224.20	1.224.20
2	Kondisi Jalan Kabupaten :					
	a. Baik	2.166,720	2.356,150	2.740.150	1.106.08	1.079.41
	b. Sedang	343,550	260,25	365.450	38.54	40.71
	c. Rusak	99,550	88.330	65.590	79.58	104.47
	d. Makadam/Tanah	59,430	42.230	40.570	-	-
3	Panjang jalan kabupaten :					
	a. Jalan beraspal	2.609,620	2.697,920	3.171.190	1.224.20	1.224.20
	b. Jalan tidak beraspal	59,430	42.230	40.570	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kediri.

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Panjang status jalan kabupaten pada tahun 2017 terjadi penurunan dari 3.171,19 di tahun 2016 menjadi 1.224,20 pada tahun 2017 dikarenakan ada pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan pedesaan sepanjang 1.673,79 meter. Sementara itu, kondisi jalan kabupaten rusak mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 104.47 kilometer, hal ini disebabkan karena beban jalan bertambah dan tidak dibatasi, Lalulintas Harian Rata-Rata (LHR) tiap tahun bertambah, kurangnya Drainase, yang mengakibatkan genangan air yang juga berpengaruh pada peningkatan tingkat kerusakan permukaan jalan. Meskipun demikian, mulai tahun 2016 permukaan jalan kabupaten makadam sudah ditingkatkan menjadi jalan aspal.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas perlu disikapi secara komprehensif karena hal tersebut merupakan simptom dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tataran praktis, untuk memperkecil peluang terjadinya kriminalitas masyarakat perlu mengefektifkan pelaksanaan pengamanan lingkungan secara swakarsa dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat keamanan. Pada tataran struktural, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018 jumlah 11 kasus criminal tertinggi turun menjadi 513 kasus, dari 674 kasus pada tahun 2017. Perkembangan 11 kasus kriminal tertinggi pada tahun 2016 sampai dengan 2018 ditampilkan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.108
PERKEMBANGAN 11 KASUS KRIMINAL TERTINGGI
TAHUN 2016 - 2018

No	JENIS KASUS	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
1	Perjudian	197	198	97
2	Pencurian dengan pemberatan	113	136	77
3	Pencurian kendaraan bermotor	53	76	46
4	Pencurian dengan kekerasan	22	26	20
5	Pencurian biasa	27	40	46
6	Tipu	6	43	37
7	Penganiayaan berat	30	23	50
8	Pengeroyokan	24	42	18
9	Penggelapan	2	8	59
10	Penggelapan dalam jabatan	6	4	16
11	Perlindungan anak	12	78	47
	Jumlah	492	674	513

Sumber :Bakesbangpol Kab.Kediri dari laporan POLRES Kediri.

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Salah satu indikator fokus Sumber Daya yaitu angkatan kerja dan pengangguran.

2.1.4.4.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja dengan total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun ke atas. Sedangkan Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam sebuah perekonomian, semakin tinggi kualitas tenaga kerja akan berpengaruh pada output

yang dihasilkan dalam proses produksi. Tenaga kerja memiliki peran penting di tengah upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Angkatan Kerja tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.109
ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016 - 2018

No	Indikator	2016	2017*	2018**
1	Angkatan Kerja	809.072	853.996	818.385
2	Angkatan kerja tertampung	769.061	826.827	783.578
3	Pengangguran Terbuka	40.011	27.169	34.807

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab Kediri
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD digunakan untuk melihat capain tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan RPJMD. Untuk mengetahui capaian target yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dengan realisasi yang terjadi dapat dilihat berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan. Evaluasi realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dan target kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.110
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN KINERJA TAHUN 2018 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2019 KABUPATEN KEDIRI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
1.1.1	Pendidikan					Dinas Pendidikan
	Non Urusan					
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98,00	98,00	98,00	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	98,00	98,00	98,00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98,00	98,00	98,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	98,00	98,00	98,00	
	Urusan Pendidikan					
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase gedung sekolah yang layak :				
		SD/MI	92,50	93,25	95,00	
		SMP/MTs	97,50	98,00	99,00	
		Persentase sekolah memiliki perabot layak :				

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
		SD	92,50	92,75	93,30	
		SMP	91,75	92,00	92,50	
		Persentase sekolah memiliki alat peraga :				
		SD	47,20	47,50	45,00	
		SMP	40,75	41,00	41,50	
		Persentase sekolah memiliki buku mata pelajaran :				
		SD	98,50	99,00	100,00	
		SMP	83,00	84,00	86,00	
		Persentase sekolah (SD dan SMP)menerapkan MBS	100,00	100,00	100,00	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	98,45	98,50	98,85	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/Mi	109,72	109,80	109,9	
		APK SMP/MTs	99,70	99,73	99,83	
		APM SD/Mi	99,85	99,90	99,95	
		APM SMP/MTs	78,50	78,75	80,25	
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,03	0,02	0,02	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
Program Pendidikan Luar Biasa (PLB)		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,60	0,50	0,30	
		Angka melanjutkan SD ke SMP	98,70	98,75	98,85	
		Angka Lulusan SD	99,70	99,75	99,85	
		Angka Lulusan SMP	99,80	99,85	99,90	
		Rata-rata nilai UAS SD	7,80	7,82	7,90	
		Rata-rata nilai UAS SMP	7,65	7,70	7,75	
		APK SD/Mi	109,72	109,80	109,9	
		APK SMP/MTs	99,70	99,73	99,83	
		APM SD/Mi	99,85	99,90	99,95	
		APM SMP/MTs	78,50	78,75	80,25	
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Rasio guru terhadap siswa :				
		SD/MI	16	17	18	
		SMP/MTs	16	17	18	
		Kualifikasi guru S1/D-IV :				
		SD/MI	83,00	83,50	84	
		SMP/MTs	98,20	98,50	99	
		Sertifikasi Guru :				

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
Program Pendidikan Non Formal		SD	59,60	59,75	60,25	
		SMP	78,00	78,25	78,75	
		Angka melek aksara	99,80	99,85	99,95	
		Persentase anak putus sekolah mengikuti program paket A, B, C	55,00	60	70	
		Persentase lembaga kursus dengan peserta kursus mengikuti ujian nasional kursus	65,50	66,75	70	
		APK SMA/MA	47,25	48	51,2	
		APM SMA/MA	40,25	41,00	42,75	
		Angka Putus Sekolah SMA/MA	0,60	0,55	0,45	
		Angka melanjutkan SMP ke SMA	70,40	70,50	70,60	
		Angka Lulusan SMA/MA	99,65	99,70	99,85	
	Program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat melalui PKK	-	-	90	
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
	Program Peningkatan Kualitas	Jumlah cabang OR berprestasi	6	6	6	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda pelopor/berprestasi	12	12	15	
1.1.2	Kesehatan					Dinas Kesehatan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasaranan	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	98%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Program Penunjang biaya operasional belanja Hibah, Bansos, BK dan Bagi Hasil	Cakupan layanan penunjang biaya operasional belanja hibah, bansos, BK dan bagi hasil	-	-	100%	
	Urusan Kesehatan					
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina (apotik, IFK, Toko Obat, Puskesmas)	157%	161%	171%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja	77%	78%	80%	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase sistem informasi/sinkronisasi rekomendasi perizinan terintegrasi SIMPDU Online yang tersedia	-	-		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan upaya kesehatan masyarakat terlaksana	90%	90%	90%	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	11,65%	11,65%	11,65%	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	95%	100%	100%	
	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase taman posyandu yang terbentuk	35%	40%	50%	
		Persentase pengadaan susu	100%	100%	100%	
	Program Perbaikan dan Peningkatan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	100%	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	80%	85%	93%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90,50%	91%	92%	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi	81%	100%	100%	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam JKN/Jamkesda	100%	100%		
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Persentase sarana prasarana Puskesmas/Pustu yang memadai	100%	100%	100%	
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Persentase tersedianya sarana prasarana RS yang memadai	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja	67%	68%	70%	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase jumlah sarana/pelaku usaha yang dibina	105%	125%	165%	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu	61,87	58,3	41,64	
		Angka Kematian Bayi	7,42	7,29	6,87	
		Angka Usia Harapan Hidup	72,41	72,50	72,68	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Bidang Kesehatan	Persentase nakes teladan yang terpilih di tingkat Kabupaten	100%	100%	100%	
	Program Kesehatan Anak Usia Sekolah	Persentase cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Pengembangan Uji Laboratorium Kesehatan	Persentase cakupan peningkatan dan pengembangan uji laboratorium kesehatan	100%	100%	100%	
	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persentase desa yang melaksanakan program STBM	83%	90%	100%	
	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD	Persentase Cakupan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas BLUD	100%	100%	100%	
	Program Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Jumlah Gedung yang terbangun	-	1 unit	1 unit	
	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Persentase percepatan pembangunan sanitasi permukiman	-	-	90%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdan Penataan Ruang
	Non Urusan					
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	96%	98%	98%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana	92%	94%	98%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98%	98%	98%	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	75%	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	75%	75%	85%	
	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	90,50	92,50	95,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	83,00	84,50	89,50	
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	72,00	74,00	78,00	
	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase pembangunan turap/talud/bronjong	72,00	74,00	78,00	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	90,50	92,50	95,00	
		Persentase jembatan dalam kondisi	83,00	84,50	89,50	
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase peningkatan sarpras kebinamargaan	76%	78%	82%	
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	71,20%	71,50	72%	
	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Persentase tersedianya data sumber mata air	100%	100%	100%	
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase tersedianya tanah untuk konservasi sumber daya air	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pengelolaan sungai dan sumber air irigasi	Persentase jumlah bangunan dan talud yang dipelihara guna kelancaran irigasi	100%	100%	100%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan/umum	persentase peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan/umum	86,8%	88,1%	89,2%	
	Program pembangunan prasarana penunjang jalan	persentase pembangunan prasarana penunjang jalan	82%	82%	84%	
	Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Persentase pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	100%	100%	100%	
	Program pembangunan sistem informasi/database sumber daya air	Persentase pembangunan sistem informasi/database sumber daya air	100%	100%	100%	
	Program pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan	Persentase pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan	65%	70%	75%	
	Program perencanaan tata ruang	Cakupan perencanaan tata ruang	100%	100%	100%	
	Program pengendalian tata ruang	Persentase pengendalian tata ruang	76%	78%	82%	
	Program pemanfaatan tata ruang	cakupan pemanfaatan tata ruang	100%	100%	100%	
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	jumlah sistem informasi investasi	1	1	1	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program sinkronisasi dan evaluasi	persentase sinkronisasi dan evaluasi	75%	76%	80%	
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	65%	70%	80%	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah	-	-	85%	
1.1.4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.2.4	Pertanahan					
	Non Urusan					
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	91%	92%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	90%	100%	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75%	75%	75%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	Program Pembangunan Bangunan Gedung Perkantoran	cakupan pembangunan sistem informasi/data base gedung dan kantor	100%	100%	100%	
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan pengembangan perumahan	85%	90%	100%	
	Program lingkungan sehat perumahan	cakupan pembangunan lingkungan sehat perumahan	80%	85%	95%	
	Program pemberdayaan komunitas perumahan	cakupan pemberdayaan komunitas perumahan	7%	7%	8%	
	Program pembangunan dan pengembangan penyediaan air minum	Persentase pembangunan dan pengembangan penyediaan air minum	75%	75%	85%	
	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan	89,3%	90,2%	92%	
	Program pemeliharaan sarana dan prasaranan fasilitas umum/pemerintah	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah	86,8%	88,1%	90,2%	
	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah RS baru yang terbangun	1		1	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan	persentase pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan	65%	70%	80%	
	Program pembangunan saluran drainase	persentase pembangunan saluran drainase	65%	70%	80%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan/umum	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan/umum	89,3%	90,2%	92%	
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase penerangan jalan umum milik Pemda yang terbangun	41,25%	42,79%'	45,87%	
	Program pelayanan administrasi umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi PJU	100%	100%	100%	
	Urusan Pertanahan					
	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase pelaksanaan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	60%	60%	65%	
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	persentase Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	25%	25%	35%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
1.1.5	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat					Satpol PP
	Non Urusan					
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang disiplin dan performa kerja Satpol PP	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat					
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pemberantasan barang kena cukai ilegal	Persentase kegiatan peningkatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekat pita cukai di peredaran atau tempat penjualan	100%	100%	100%	
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pengendalian, evaluasi dan pencegahan tindak kriminal	100%	100%	100%	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase peserta pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100%	100%	100%	
	Sub urusan Kebakaran					
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase peningkatan penanganan bahaya kebakaran	84%	86%	88%	
1.1.6	Sosial					Dinas Sosial
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan layanan peningkatan disiplin aparatur	-	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Urusan Sosial					
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial	100%	100%	100%	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan sosial	100%	100%	100%	
	Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penanggulangan kemiskinan	100%	100%	100%	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase latihan ketrampilan bagi PMKS	-	-	100%	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	-	-	100%	
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase pembinaan anak terlantar	-	-	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase pembinaan panti asuhan/panti jompo	-	-	100%	
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase bimbingan sosial dan latihan ketrampilan eks korban Napza	-	-	100%	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	-	-	100%	
	Program Pemeliharaan, Perawatan serta Pengadaan Sarana dan Prasarana PMKS	Persentase Pemeliharaan, Perawatan serta Pengadaan Sarana dan Prasarana PMKS	-	-	100%	
	Program Keluarga Harapan	Persentase pendampingan PKH	-	-	100%	
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pembinaan lingkungan sosial	-	-	100%	
1.2.1 2.8	Tenaga Kerja Transmigrasi					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	98%	100%	100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Urusan Tenaga Kerja					
	Program Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan K3	86%	86%	87%	
		Persentase kepatuhan perusahaan terhadap jamsostek	88%	88%	90%	
	Program Peningkatan Hubungan Industrial dan Jamsostek	Persentase perusahaan yang menerapkan UMK	90%	90%	92%	
		Persentase penyelesaian perselisihan industrial	79%	81%	85%	
		Persentase pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	24%	26%	30%	
	Program Peningkatan kualitas dan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	3.333	3.606	4.152	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	produktivitas tenaga kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.90%	4.83%	4.64%	
	Program Penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	83%	83.50%	84.50%	
		Persentase tingkat penyerapan angkatan kerja	63%	65%	70%	
		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	52%	53%	55%	
	Program Peningkatan Kesempatan kerja	Persentase tingkat penyerapan angkatan kerja	-	-	50%	
	Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase kepuatan perusahaan terhadap jamsostek	-	-	87%	
	Urusan Transmigrasi					
	Program Ketransmigrasian	Persentase meningkatnya pelayanan transmigrasi	86%	87%	89%	
	Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian	Persentase meningkatnya pelayanan transmigrasi	-	-	85%	
1.2.3	Pangan					Dinas Ketahanan Pangan dan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
2.3	Pertanian					Peternakan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasaranan aparatur	90%	90%	90%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase terpenuhinya pelaporan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	
	Urusan Pangan					
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi per kapita	2150 kkal	2150 kkal	2150 kkal	
		Ketersediaan protein per kapita	57 kkal	57 kkal	57 kkal	
		% Pemenuhan konsumsi pangan utama	134,94	-	139,0288169	
	Program pengembangan konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal	Cakupan pengembangan konsumsi, panganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal	-	-		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pengembangan mutu dan keamanan pangan	Cakupan pengembangan mutu dan keamanan pangan	-	-		
	Program pengembangan ketersediaan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan	Persentase penurunan desa rawan pangan	-	-		
	Program pengembangan distribusi, akses dan pengendalian harga pangan	Cakupan pengembangan distribusi, akses dan pengendalian harga pangan	-	-		
	Urusan Pertanian			-		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	- Rasio kasus Brucellosis pada sapi perah	0,89	0,78	0,48	
		- Jumlah kasus yang ditangani	884	866	830,00	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi peternakan (Kg)				
		- daging	18,789,997,00	18,937,027,00	19.200.198,00	
		- telur	52.999.740,00	79.329.506,00	81.555.361,00	
		- susu	12.250.710,00	17.644.225,00	18.947.353,00	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah UMKM hasil ternak	-	250	325,00	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah kelompok ternak	-	150	240,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
Program Pengembangan Data dan Pembangunan Peternakan		Jumlah populasi ternak :				
		-Sapi potong	234,144,00	245,851,00	271.051,00	
		-Sapi perah	10,563,00	10,985,00	11.882,00	
		-Kerbau	374,00	375,00	379,00	
		-Kuda	296,00	297,00	299,00	
		-Kambing	143,765,00	146,065,00	150.895,00	
		-Domba	44,101,00	44,511,00	45.374,00	
		-Babi	2,568,00	2,584,00	2.618,00	
		-Ayam Buras	1,342,737,00	1,358,850,00	1.392.896,00	
		-Ayam Ras Petelur	8,814,390,00	8,893,719,00	9.061.707,00	
		-Ayam Ras Pedaging	2,843,614,00	2,882,003,00	2.962.679,00	
		-Itik	194,742,00	197,176,00	202.296,00	
		-Entok	61,080,00	61,813,00	63.355,00	
		-Kelinci	11,216,00	11,275,00	11.403,00	
		-Burung Puyuh	605,843,00	610,084,00	619.146,00	
		-Burung Dara	21,354,00	21,443,00	21.641,00	
	Program Pengembangan Perbibitan	- SC	1,23	1,23	1,10	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Peternakan	- CI	14 bulan	15 bulan	16 bulan	
		- CR	88,88%	88,76%	90,25%	
	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat melalui PKK	92%	92%	94%	
1.2.5	Lingkungan Hidup					Dinas Lingkungan Hidup
	Non Urusan					
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasaranan aparatur	100%	100%	100%	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kinerja aparatur	75%	-	85%	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Program Fasilitas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur	Persentase peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur	-	-	100%	
	Urusan Lingkungan Hidup					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan cakupan wilayah layanan persampahan	20%	20%	80%	
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan RTHKP publik terbangun	7,20%	10,80%	18%	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tingkat keseimbangan ekosistem	100%	100%	100%	
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah kecamatan yang sudah dikaji biomassa	6	6	26 kecamatan dan 26 pendalaman	
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	80%	80%	80%	
	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat	100%	100%	80%	
	Program Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Persentase tersedianya embung dan sumur resapan	100%	100%	80%	
	Program Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	100%	100%	80%	
	Program Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian dan pencemaran kerusakan LH	100%	100%	80%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	-	-	100%	
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase kegiatan pembinaan lingkungan sosial	-	-	100%	
	Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Persentase pemanfaatan potensi sumber daya hutan	-	-	100%	
	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan	-	-	100%	
	Program Pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan	Persentase Pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan	-	-	100%	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	-	-	100%	
1.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Non Urusan					
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	100%	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	-	-	100%	
	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen adminduk	100%	100%	100%	
1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98%	98%	98%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	95%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98%	98%	98%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	95%	95%	95%	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	92%	92%	92%	
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	80%	80%	80%	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat	95%	95%	95%	
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	90%	90%	90%	
	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase peningkatan kualitas SDM kader PKK	98%	98%	98%	
	Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan	Persentase pembinaan dan pengembangan pengelolaan	95%	95%	95%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	keuangan desa	keuangan desa				
	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	-	-	80%	
1.2.8 1.2.2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Non Urusan					
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
	Program Keluarga Berencana	Prevalensi peserta KB aktif	72,20%	72,30%	72,50%	
	Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Unmeet need	10,75%	10,73%	10%	
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase peserta KB MKJP	29,62%	29,70%	29,80%	
	Program Kesehatan reproduksi remaja	Persentase perkawinan istri usia kurang 20 tahun	19,90%	19,80%	19,60%	
	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling	Persentase perkawinanistri usia kurang 20 tahun	19,90%	19,80%	19,60%	
	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase perkawinan istri usia kurang 20 tahun	80%	80%	19,60%	
	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase kelompok tri bina yang aktif	BKB 80%; BKR 50%;BKL 70%	BKB 80%; BKR 50%;BKL 70%	BKB 85%; BKR 55%;BKL 75%	
	Program pengendalian kependudukan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki informasi data mikro keluarga	0.71%	0.71%	100%	
	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase penataan administrasi kependudukan	-	-		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		60%			
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan	70%	75%	100%	
	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan oleh P2TP2A / Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang difasilitasi	85%	90%	100%	
	Program Peningkatan peran serta perempuan di pedesaan	Persentase kader desa yang aktif	100%	100%	100%	
	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase OPD yang responsif gender	75%	80%	90%	
1.2.9	Perhubungan					Dinas Perhubungan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	95%	95%	95%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	95%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kedisiplinan aparatur dalam bertugas	96%	96%	97%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase keikutsertaan aparatur dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur	80%	80%	80%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan tertib dan tepat waktu	95%	95%	95%	
	Program Fasilitas Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan aparatur	90%	90%	90%	
	Urusan Perhubungan					
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan	95%	95%	95%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana uji kir kendaraan bermotor	90%	90%	90%	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase terpenuhinya SIMPDU Online	-	-	100%	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase rasio angkutan darat dibanding penumpang	85%	85%	85%	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan	85%	85%	85%	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu - Lintas	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas	85%	85%	85%	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kinerja Sektor Perhubungan	Persentase pemenuhan alat kelaikan kendaraan bermotor	90%	90%	90%	
	Program Pembangunan Sistem Informasi Bidang Perhubungan	Persentase pelaksanaan fungsi sistem informasi bidang perhubungan	85%	85%	85%	
	Program Peningkatan Keindahan Lingkungan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan tanaman untuk memperindah kantor	85%	85%	85%	
1.2.10	Komunikasi dan Informatika					Dinas Komunikasi

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
1.2.15	Persandian					dan Informatika
1.2.14	Statistik					
	Non Urusan					
	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	95%	98%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penanganan sarana - prasarana aparatur yang memerlukan pemeliharaan	95.57%	95%	98%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase keikutsertaan aparatur dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur	95%	95%	98%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	-	98%	
	Urusan Komunikasi dan Informatika					
	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persentase pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	95%	95,50%	96%	
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase masyarakat yang memahami bidang telecenter	90,50%	90,50%	92%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Persentase terpenuhinya SIMPDU Online	100%	100%	100%	
	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	95,50%	96%	96%	
	Program kerjasama informasi dengan mass media	Persentase kerjasama dengan mass media	95%	95%	96%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi	Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi	85%	87%	90%	
	Program pengembangan e-Government	Persentase pengembangan e-government	85%	87%	90%	
	Program pengembangan data center	Persentase pengembangan data center	85%	87%	90%	
	Urusan Statistik					
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase publikasi data statistik	100%	100%	100%	
1.2.11	Koperasi, Usaha Mikro					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Non Urusan					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98%	98%	98%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	88%	88%	89%	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98%	98%	98%	
	Urusan Koperasi					
	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	300 orang dan 300 koperasi	300 orang dan 310 koperasi	1550 orang dan 1550 koperasi	
	Urusan Usaha Mikro					
	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Jumlah usaha kecil yang dibina	130 UMKM dan WUB	145 UMKM dan WUB	1565 UMKM dan WUB	
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran	140 UMKM	160 UMKM	2009 UMKM	
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Jumlah pelatihan kewirausahaan	-	-	1 kegiatan	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
1.2.12	Penanaman Modal					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98,30%	98,40%	98,60%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	98,20%	98,25%	98,35%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	98,40%	98,45%	98,55%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	98,20%	98,30%	98,50%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	96,35%	96,35%	96,40%	
	Urusan Penanaman Modal					
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi (Rp Milyar)	488,105114	502,748267	533,365637	
		Persentase daya serap tenaga kerja	10721 orang	11793 orang	10% (14269 orang)	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
		Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal	80%	85%	95%	
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Nilai Investasi (Rp Miliar)	488,105114	502,748267	533,365637	
		Persentase daya serap tenaga kerja	10721 orang	11793 orang	10% (14269 orang)	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah laporan analisis jabatan PNS	-	1 laporan	1 laporan	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Penerbitan Izin	98,50%	98.50%	99%	
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	
		Angka Survei Kepuasan Masyarakat	84	84.5	85.5	
1.2.18	Kearsipan					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.2.17	Perpustakaan					
	Non Urusan					
	Program administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Urusan Perpustakaan					
	Program Pengembangan budaya baca & pembinaan perpustakaan	Persentase Pengembangan budaya baca & pembinaan perpustakaan	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana perpustakaan umum yang memadai	100%	100%	100%	
	Program Pembinaan koleksi perpustakaan	Persentase bahan pustaka yang layak disajikan	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan kualitas layanan informasi perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan umum	33%	36%	44,00%	
	Urusan Kearsipan					
	Program peningkatan kualitas informasi kearsipan	Persentase pengguna informasi kearsipan	50%	50%	50%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Persentase unit kerja yang melakukan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	100%	100%	100%	
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan	100%	100%	100%	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase SDM pengelola kearsipan berkualitas baik	100%	100%	100%	
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pengguna informasi kearsipan	-	-	50%	
2.1	Kelautan dan Perikanan					Dinas Perikanan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Urusan Kelautan dan Perikanan					
	Program Pengembangan Budidaya	Produksi Perikanan				

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Perikanan	- kolam (ton)	17.468	20,273,000	22.350	
		- perairan umum (ton)	179,284	186,456	203,610	
		- ikan hias (ribu ekor)	292.878	307,521,000	335.813	
		- benih ikan (juta ekor)	18.321,161	19,237,219	20.806,976	
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	20,30	20,71	21,54	
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah pelaku UMKM hasil ikan	125	131	145,00	
2.2 1.2.16	Pariwisata Kebudayaan					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	94,85%	94,90%	95,00%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penanganan sarana - prasarana aparatur yang memerlukan pemeliharaan	95,90%	95,93%	96,00%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85,93%	85,95%	86,00%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85,00%	86,00%	90,00%	
	Urusan Pariwisata					
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	96%	96%	97%	
	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase kunjungan wisata dan pengembangan destinasi wisata	92.59%	92,60%	92,63%	
	Program pengembangan kemitraan	Persentase pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata	94.20%	94,30%	94,50%	
	Program Peningkatan & Pemberdayaan melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat melalui Pokja II	100%	100%	100%	
	Urusan Kebudayaan					
	Program pengembangan nilai budaya	Persentase budaya adat daerah yg dilestarikan	98,95%	98,96%	99,00%	
	Program pengelolaan kekayaan budaya	Persentase pelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal	99,40%	99,45%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase pemberdayaan kelompok seni & budaya	100%	100%	100%	
	Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	Persentase penampilan seni budaya lokal ke luar daerah	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
2.3	Pertanian					Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	95%	95%	95%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasaranan aparatur	85%	95%	95%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Program Penunjang Biaya Operasional Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil	Cakupan layanan penunjang biaya operasional belanja hibah, bansos, BK dan bagi hasil	100%	100%	100%	
	Urusan Pertanian					
	Program Penguasaan Teknologi Pertanian	Persentase peningkatan Penguasaan terhadap teknologi pertanian	75%	80%	90%	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase peningkatan kemampuan petani dalam berusaha tani	75%	80%	90%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Data dan Informasi Pertanian	Persentase ketersediaan data dan informasi pertanian	80%	85%	95%	
	Program Pengamanan Produksi Pertanian	Persentase pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman	84%	86%	83%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	65%	70%	80%	
	Program Pengembangan Agribisnis	Persentase pertumbuhan sentra pengembangan agribisnis	72%	75%	80%	
	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Indeks kepuasan petani terhadap pelayanan penyuluhan	70%	75%	85%	
	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	-	-	100%	
	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	-	-	100%	
	Program Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Persentase Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	-	-	100%	
	Program Peningkatan kualitas bahan baku	Persentase Peningkatan kualitas bahan baku	-	-	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan	Cakupan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan	-	-	100%	
	Program pembinaan lingkungan sosial	Persentase pembinaan lingkungan sosial	-	-	100%	
2.6	Perdagangan					
2.7	Perindustrian					Dinas Perdagangan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98%	98%	98%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	88%	88%	89%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan	98%	98%	98%	
	Urusan Perdagangan					
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTTP yang diawasi	12.500 UTTP	15.000 UTTP	75.000 UTTP	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah cetak buku potensi daerah dan pelaku usaha yang mengikuti pameran internasional	3.000 buku dan 12 pelaku usaha	3.100 buku dan 12 pelaku usaha	15.400 buku dan 59 pelaku usaha	
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah produk dalam negeri yang dihasilkan	75 produk	77 produk	88 produk	
	Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan	1 pasar	1 pasar	7 pasar	
	Urusan Perindustrian					
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah peserta yang dilatih	210 orang	170 orang	1.225 orang	
	Program penataan Struktur industri	Jumlah struktur kawasan industri di Kab. Kediri	-	-	kawasan industri	
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase pengembangan industri kecil dan menengah	-	-	80%	
3.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
3.1	Fungsi penunjang Perencanaan					BAPPEDA
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Fungsi Penunjang Perencanaan					
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Waktu pendataan arsip/dokumen dan pengelolaan website OPD	12 bulan	12 bulan	60 bulan	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen jawaban pemda dan pelaporan dana APBN	3 dokumen	3 dokumen	15 dokumen	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	
	Program pengembangan data/informasi daerah	Cakupan ketersediaan data/informasi daerah	100%	100%	100%	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase penjabaran program RPJMD bagi mitra kerja bidang ekonomi dalam RKPD	85%	85%	85%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase penjabaran program RPJMD bagi mitra kerja bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam RKPD	85%	85%	85%	
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase penjabaran program RPJMD bagi mitra kerja bidang fisik dan prasarana dalam RKPD	85%	85%	85%	
	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	-	-	85%	
	Program pengembangan data/informasi	Cakupan ketersediaan data/informasi	-	-	85%	
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah	-	-	85%	
	Program perencanaan tata ruang	Persentase perencanaan tata ruang	-	-	85%	
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	-	-	85%	
	Program penelitian dan pengembangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	-	-	85%	
3.2	Fungsi penunjang Keuangan					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
3.2.1	Fungsi penunjang Keuangan					BPKAD
	Non Urusan					
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Fungsi penunjang keuangan					
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota	100%	100%	100%	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	-	100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	Persentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan desa	-	-	100%	
3.2.2	Fungsi penunjang Keuangan				Badan Pendapatan Daerah	
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	100%	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Fungsi penunjang keuangan					
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	9,98%	10.28%	100%	
		Persentase kontribusi PAD	9,99%	10.29%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
		terhadap belanja daerah				
	Program peningkatan pendapatan daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	4,29	4.45	4.12	
	Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah pasar yang dipelihara	-	-	3	
	Program pembinaan pedagang pasar Pemda	Persentase pedagang pasar yang dibina	-	-	100%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan/umum	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan/umum	-	-	90%	
3.3	Fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					Badan Kepegawaian Daerah
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	98%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan pegawai dapat dilaksanakan sesuai standar, norma dan ketentuan	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	97%	97%	97%	
3.4	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan					BALITBANG
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasaranan aparatur	100%	100%	98%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	98%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan					
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Waktu pendataan arsip/dokumen dan pengelolaan website OPD	12 bulan	12 bulan	60 bulan	
	Program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi	Cakupan waktu penelitian dan pengembangan / Jumlah penelitian yang dipublikasikan	12 bulan / 4 dokumen	12 bulan / 4 dokumen	60 bulan	
3.5	Sekretariat DPRD					Sekretariat DPRD
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	95%	95%	95%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	95%	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase persediaan pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan DPRD	95%	95%	95%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	90%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90%	90%	90%	
	Sekretariat DPRD					
	Program fasilitasi peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur	Persentase peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur	85%	60%	85%	
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase fasilitasi kegiatan hearing, rapat alat kelengkapan DPRD serta tersusunnya laporan kegiatan DPRD	90%	80%	90%	
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	90%	80%	90%	
	Program peningkatan kualitas pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase peningkatan kualitas pemerintah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	85%	80%	90%	
	Program optimalisasi fungsi pengawasan	Persentase optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD	90%	80%	90%	
	Program peningkatan pelaksanaan kode etik DPRD	Persentase peningkatan pelaksanaan kode etik DPRD	80%	70%	90%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program penguatan perumusan perencanaan DPRD	Persentase kegiatan kerjasama antar daerah dan tersusunnya Renja DPRD	90%	70%	90%	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	90%	80%	90%	
	Program penataan dan penyempurnaan dan kebijakan sistem prosedur pengawasan	Persentase penataan dan penyempurnaan dan kebijakan sistem prosedur pengawasan	95%	80%	90%	
	Program penataan peraturan perundang - undangan	Persentase penyusunan prolegda, raperda usul pemda, raprda usul prakarsa DPRD dan keputusan DPRD dan pimpinan DPRD serta hasil kajian regulasi	90%	70%	90%	
	Program peningkatan kompetensi DPRD dan alat kelengkapan DPRD	Persentase peningkatan kompetensi DPRD dan alat kelengkapan DPRD	90%	90%	90%	
3.6	Sekretariat Daerah					Sekretariat Daerah
3.6.1	Bagian Administrasi Pemerintahan					Bagian Administrasi Pemerintahan
	Non Urusan					
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program peningkatan sarana dan prasarana dan aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Sekretariat Daerah					
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	
	Program pengembangan wilayah perbatasan	Cakupan pengembangan wilayah perbatasan	100%	100%	100%	
	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan pengembangan data/informasi	100%	100%	100%	
	Program evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Cakupan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	100%	100%	
	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Cakupan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	100%	
	Program perencanaan tata ruang	Cakupan perencanaan tata ruang	-	-	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	-	100%	
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Cakupan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	-	-	100%	
3.6.2	Bagian Hukum					Bagian Hukum
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	100%	
	Sekretariat Daerah					
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100%	100%	100%	
	Program penataan perundang - undangan	Persentase kelancaran penataan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	100%	100%	
3.6.3	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat					Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	Non Urusan					
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Sekretariat Daerah					
	Program fasilitas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur	Persentase peningkatan fasilitas dan pemeliharaan kesehatan aparatur	100%	100%	100%	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Tingkat peran serta kepemudaan	98%	98%	98%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat melalui Pokja 1 PKK	100%	100%	100%	
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	-	100%	100%	
	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	91,69%	93,07%	95,88%	
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	-	-	90%	
3.6.4	Bagian Perekonomian					Bagian Perekonomian
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	88%	88%	88%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	87%	87%	87%	
	Program Penunjang Biaya Operasional Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil	Cakupan layanan Penunjang Biaya Operasional Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil	90%	90%	90%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	91%	91%	91%	
	Sekretariat Daerah					
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	Cakupan pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	100%	
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Tingkat pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	70%	70%	75%	
	Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	4 kali	4 kali	12 kali	
	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase RT sangat miskin yang meningkat kesejahteraannya	-	-	12 kali	
	Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase desa yang belum teraliri aliran listrik mendapatkan aliran listrik	-	-	12 kali	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang meningkat kesejahteraannya	-	-	12 kali	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase lahan yang termasuk golongan kritis	-	-	12 kali	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Antisipasi Kelangkaan Air Bersih	Persentase desa yang mengalami kekeringan	-	-	12 kali	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase masyarakat yang menggunakan energi secara hemat	-	-	12 kali	
	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	-	-	12 kali	
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase PK5 dan pedagang kaki lima yang dibina	-	-	12 kali	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	-	-	12 kali	
3.6.5	Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan					Bagian Administrasi Pembangunan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	90%	90%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tingkat ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan	90%	90%	90%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	90%	
	Sekretariat Daerah					
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	90%	90%	90%	
	Program pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan	Persentase peningkatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan	90%	90%	90%	
3.6.6	Bagian Umum					Bagian Umum
	Non Urusan					
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	98,5%	97,26%	97,71%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	96,61%	97,27%	97,71%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan	92,38%	95,24%	95,17%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kepatuhan aparatur	99,00%	99,33%	99,20%	
	Program Fasilitas Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur	Persentase Tingkat Fasilitas pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	80,00%	83,33%	81,03%	
	Sekretariat Daerah					
	Program Peningkatan Keindahan Lingkungan Kantor	Persentase Tingkat keindahan lingkungan kantor	91,67%	86,67%	89,86%	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara	96,83%	96,83%	96,83%	
3.6.7	Bagian Organisasi					Bagian Organisasi
	Non Urusan					
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	90%	90%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan	90%	90%	90%	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kepatuhan aparatur	-	-	90%	
	Sekretariat Daerah					
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase peningkatan profesional aparatur	90%	90%	90%	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kinerja aparatur	90%	90%	90%	
	Program peningkatan kualitas pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase perbaikan penyelenggaraan pemerintah yang efektif	90%	90%	90%	
	Program penataan kelembagaan	Persentase kelancaran dalam penyusunan SOTK & tupoksi OPD	90%	90%	90%	
3.7	Inspektorat					Inspektorat
	Non Urusan					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Inspektorat					
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten	Persentase LPPD yang akuntabel, efisien dan efektif	97%	98%	100%	
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penerapan implementasi SAKIP	95%	97%	100%	
	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase auditor yang profesional	95%	100%	100%	
	Program peningkatan kualitas pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai capaian reformasi birokrasi	C	C	C	
3.8	Sub urusan Bencana				PD pelaksana sub urusan Bencana	
	Non Urusan					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	90%	90%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kepatuhan aparatur	90%	90%	90%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan	90%	90%	90%	
	Sub urusan Bencana					
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase peserta penanggulangan bencana dan jumlah dokumen kebencanaan	90%	90%	90%	
	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana logistik dalam 5 tahun	90%	90%	90%	
	Program Rehabilitasi dan rekonstruksi	Persentase dokumen SOP Kebencanaan, JITUPASNA, Pemenuhan rehabilitasi dan rekonstruksi	90%	90%	90%	
	Program pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	Persentase pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	-	-	90%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia penanggulangan bencana	Persentase peningkatan kapasitas dan SDM penanggulangan bencana	-	-	90%	
	Program pencegahan dan mitigasi bencana	Persentase pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	90%	
	Program pengembangan budaya sadar bencana	Persentase pengembangan budaya sadar bencana	-	-	90%	
3.9	Kesatuan Bangsa dan Politik					Bakesbangpol
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	95%	95%	95%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan	90%	90%	90%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	-	-	90%	
	Program Penunjang Biaya Operasional Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi	Persentase penunjang biaya operasional hibah dan bantuan sosial	95%	95%	95%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Hasil					
	Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman dan pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat	80%	90%	90%	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana karsipan	85%	85%	85%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan	90%	90%	90%	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	90%	90%	90%	
	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	-	90%	
	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	-	-	90%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	-	-	90%	
	Program Penunjang Pemilihan Umum	Persentase Pilkada Serentak	-	-	100%	
3.10	Kecamatan					Kecamatan
	Kecamatan Pare					Kecamatan Pare
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	98%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase kelompok kesenian yang terbina	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Persentase lingkungan yang sehat dan bersih	100%	100%	100%	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan musrenbang di kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	Tingkat kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Program peningkatan keindahan lingkungan kantor	Persentase pelaksanaan keindahan lingkungan kantor	100%	100%	100%	
	Program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & perempuan	Cakupan kegiatan keberdayaan posyandu	100%	100%	100%	
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/perkotaan	Cakupan keberdayaan masyarakat perkotaan	100%	100%	100%	
	Kecamatan Gurah					Kecamatan Gurah
	Non Urusan					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	97%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase kelompok kesenian yang terbina	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Tingkat keberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan musrenbang di kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan desa	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Kecamatan Plosoklaten					Kecamatan Plosoklaten
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasaranan aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan kegiatan dalam rangka pengelolaan keragaman budaya lokal dan produk unggulan	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase keberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan pengelola keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Kandangan					Kecamatan Kandangan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	92%	95%	94,20%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan kegiatan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan kegiatan dalam rangka pengelolaan keragaman budaya lokal dan pengembangan potensi UKM	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program Peningkatan Keindahan Lingkungan Kantor	Cakupan kegiatan peningkatan keindahan lingkungan kantor	90%	92%	97%	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Kepung					Kecamatan Kepung
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	98%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kelompok kesenian yang terbina	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan pengelola keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Puncu					Kecamatan Puncu
	Non Urusan					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	95,40%	95,40%	95,40%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasaranan aparatur	99,93%	99,93%	99,93%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase kelompok kesenian yang terbina	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah musrenbang di kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelola keuangan desa	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Kecamatan Badas					Kecamatan Badas
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	98%	98%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	99%	99%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kegiatan pagelaran kesenian dan budaya	2	2	10	
	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan pengelola keuangan	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Keuangan Desa	desa				
	Program Peningkatan keindahan lingkungan kantor	Persentase peningkatan keindahan lingkungan kantor	-	-		
	Kecamatan Papar					Kecamatan Papar
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	95,40%	95,40%	95,40%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	99,93%	99,93%	99,93%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100,00%	100%	100%	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kelompok Kesenian yang terbina	100,00%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100,00%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100%	100%	
	Kecamatan Purwosari					Kecamatan Purwosari
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	97%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan	Persentase penanganan konflik	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	dan Kenyamanan Lingkungan	di tingkat kecamatan				
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan kegiatan penunjang pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase keberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	100%	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan dan kualitas pengelolaan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Pagu					Kecamatan Pagu
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasaranan aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketetapan waktu pengelola capaian kinerja keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat perkembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase keberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelola keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Plemahan					Kecamatan Plemahan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	98%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Tingkat perkembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Tingkat keberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	
	Kecamatan Kunjang					Kecamatan Kunjang
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketetapan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Tingkat perkembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase sertifikat aset Pemda	94%	96%	98%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Musrenbang di tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program pembinaan dan pengelolaan keuangan desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Kecamatan Kayen Kidul					Kecamatan Kayen Kidul
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	97%	97%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Cakupan kegiatan dalam rangka pengelolaan keragaman budaya lokal dan produk unggulan	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program pembinaan dan pembangunan daerah pengelolaan keuangan desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Gampengrejo					Kecamatan Gampengrejo
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	97%	97%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan	100,00%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase kelompok kesenian yang terbina	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pensertifikatan aset daerah	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Mojo					Kecamatan Mojo
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	97%	97%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan	100,00%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah musrenbang di tingkat kecamatan	100%	1 kali	100%	
	Program pembinaan dan pembangunan daerah pengelolaan keuangan desa	Tingkat ketepatan dan kualitas pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Program pembinaan keindahan lingkungan	Persentase pembinaan keindahan lingkungan	100%	100%	100%	
	Kecamatan Semen					Kecamatan Semen
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	98%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program pembinaan dan pembangunan daerah pengelolaan keuangan desa	Tingkat ketepatan dan kualitas pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Grogol					Kecamatan Grogol
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98%	98%	97%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program peningkatan keindahan lingkungan kantor	Tingkat keindahan lingkungan kantor	100%	100%	100%	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan dan kualitas pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Tarokan					Kecamatan Tarokan
	Non Urusan					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	99%	99%	99%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasaranan aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	98%	98%	98%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Cakupan pembinaan kelompok kesenian	100%	100%	100%	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	99%	99%	99%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program peningkatan keindahan lingkungan kantor	Tingkat keindahan lingkungan kantor	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	
	Kecamatan Banyak					Kecamatan Banyak
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	tingkat perkembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%	100%	1 kegiatan	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program peningkatan keindahan lingkungan kantor	Terlaksananya keindahan lingkungan kantor	100%	100%		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketetapan waktu pelaporan pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Ngadiluwih					Kecamatan Ngadiluwih
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	98%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Program peningkatan keindahan lingkungan kantor	Persentase peningkatan keindahan lingkungan kantor	-	-	100%	
	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah	-	-	100%	
	Kecamatan Kras					Kecamatan Kras
	Non Urusan					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98%	98%	97%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasaranan aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Progam pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Kecamatan Kandat					Kecamatan Kandat
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	97%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	99,99%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	program pengelolaan keragaman budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Musrenbang di Kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Wates					Kecamatan Wates
	Non Urusan					
	Pelayanan administrasi kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	-	
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Pengelolaan keragaman budaya	Tingkat perkembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
		melalui PKK				
	Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Musrenbang di kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Pembinaan dari pengembangan pengelolaan keuangan desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelola keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Ngancar					Kecamatan Ngancar
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	95,40%	95,40%	95,40%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	99,93%	99,93%	99,93%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100,00%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100,00%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase kelompok kesenian yang terbina	100%	100%	100,00%	
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase hasil produksi yang dipamerkan	100%	100%	100,00%	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Cakupan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100,00%	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program pengelolaan kekayaan budaya	Persentase pelestarian kebudayaan	100%	100%	100%	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Kecamatan Ringinrejo					Kecamatan Ringinrejo
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	97%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase pameran kesenian dan budaya	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Musrenbang tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	
	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Tingkat keberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	
	Program peningkatan keindahan lingkungan kantor	Persentase peningkatan keindahan lingkungan kantor	-	-	95%	
	Kecamatan Ngasem					Kecamatan Ngasem
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan layanan administrasi	97%	97%	98%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)	PD Penanggung Jawab
	Perkantoran	perkantoran				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
	Kecamatan					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat perkembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Tingkat keberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali	5 kali	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan pengelola keuangan desa	100,00%	100%	100%	

2.3 Permasalahan Pembangunan

Perumusan masalah merupakan salah satu tahapan awal yang harus dilakukan dalam proses perencanaan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dari kinerja pembangunan daerah tahun lalu. Faktor-faktor peluang maupun penghambat perlu untuk ditelaah dan dilakukan pendalaman analisis sehingga menghasilkan perbaikan untuk tahun berikutnya.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018, Isu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2020, Isu Strategis RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 serta pertimbangan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah, maka perlu untuk merumuskan isu strategis yang akan menjadi bahan kebijakan perencanaan kegiatan untuk Tahun 2020.

Isu strategis yang akan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 tidak terlepas dari tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yaitu ““Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”” dan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yaitu “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Isu strategis Pembangunan Nasional Tahun 2020 meliputi isu strategis Kewilayahan diantaranya yaitu:

1. Penurunan Ketimpangan Antar Wilayah
2. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah.
3. Pengelolaan Urbanisasi.
4. Pemanfaatan Ruang.

Sedangkan Isu Strategis RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2020 adalah:

1. Pengembangan agropolitan didukung pariwisata
2. Perlunya hilirisasi ekonomi (industr) untuk mengolah hasil produksi agropolitan
3. Disparitas wilayah jatim, antara wilayah pantura jawa dengan wilayah selatan dan madura
4. Masih rendahnya IPM dan disparitas wilayah jatim dibanding nasional
5. Masih Kurang optimalnya daerah irigasi untuk mendukung pangan.

Dengan memperhatikan isu strategis dan permasalahan Pembangunan Nasional, RKPD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021, maka isu strategis Kabupaten Kediri Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan (*governance*);
2. Peningkatan daya saing daerah;
3. Kesejahteraan masyarakat;
4. Pengelolaan Lingkungan hidup.

Rancangan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah.
3. Pengembangan agribisnis, industri, perdagangan dan pariwisata dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban.

Hubungan antara Isu Strategis Kabupaten Kediri dengan Prioritas Daerah RKPD tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.111
HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIS
DENGAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2020**

No.	Isu strategis	Prioritas RKPD Tahun 2020
1	Peningkatan daya saing daerah;	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta percepatan penanggulangan kemiskinan.
2	Tata kelola pemerintahan (<i>governance</i>);	Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah.
		Peningkatan ketentraman dan ketertiban.
3	Kesejahteraan masyarakat;	Pengembangan agribisnis, industri, perdagangan dan pariwisata dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup.
4	Pengelolaan Lingkungan hidup	

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bidang, yaitu (i) Bidang Pemerintahan Umum, (ii) Bidang Ekonomi, (iii) Bidang Sosial Budaya, dan (iv) Bidang Infrastruktur. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dari hasil evaluasi dan proyeksi masa mendatang, berikut identifikasi permasalahan pembangunan daerah tahun 2020.

**TABEL 2.112
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

No.	Bidang Urusan	Permasalahan
1.	Bidang Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Dasar b. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah c. Pengelolaan Perangkat Daerah d. Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi e. Penyusunan, Implementasi dan Penegakan Regulasi Daerah f. Keterbukaan Informasi, Akuntabilitas Publik, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan g. Kerjasama antar Daerah dan Dunia Usaha (<i>Private Sector</i>)

No.	Bidang Urusan	Permasalahan
		h. Kerjasama Internal Penyelenggara Pemerintahan dan DPRD i. Permasalahan Manajemen Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan j. Permasalahan Perlindungan Masyarakat dan konflik sosial
2.	Bidang Ekonomi	a. Koperasi dan UKM b. Penanaman Modal c. Ketahanan Pangan d. Pertanian e. Energi dan Sumber Daya Mineral f. Perdagangan g. Industri
3.	Bidang Sosial Budaya	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perempuan dan Anak d. Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga e. Kepemudaan dan Olahraga f. Sosial g. Ketenagakerjaan h. Kearsipan dan Perpustakaan i. Kebudayaan dan Pariwisata
4.	Bidang Infrastruktur	a. Perhubungan b. Pekerjaan Umum c. Komunikasi dan Informatika d. Perumahan e. Lingkungan Hidup f. Penataan Ruang

III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Secara umum kerangka ekonomi daerah mencerminkan kondisi dinamis perekonomian daerah sekaligus merupakan gambaran umum perekonomian Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut juga menggambarkan proyeksi perekonomian tahun berjalan 2019 maupun tahun 2020 yang meliputi sasaran-sasaran yang akan dicapai serta sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah akan menjabarkan (i) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan (ii) Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah menjelaskan tentang Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019, serta Tantangan dan Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2020. Arah kebijakan keuangan daerah akan membahas Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan pembangunan terkait dengan kapasitas fiskal daerah maupun peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah. Kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika ekonomi nasional maupun regional sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan keuangan daerah. Dalam hal ini penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Sehingga dalam penerapannya, konsekuensi atas integrasi kegiatan perencanaan dan penganggaran perlu diperhatikan. Dengan kata lain bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah dan daya dukung keuangan daerah secara bersama-sama akan menentukan kualitas pembangunan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2020 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar ada sinergitas antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya

arah kebijakan ini, akan dipedomani dalam pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Kediri dapat digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara umum dibagi ke dalam nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada RKPD Tahun 2020 ini, penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 dengan menggunakan 17 lapangan usaha. Gambaran selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Di Kabupaten Kediri lapangan usaha yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB pada tahun 2018 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar Rp. 10.250.452.600.000,- atau sebesar 26.92%. Sektor andalan Kabupaten Kediri dalam peningkatan ekonomi masyarakat ini beberapa tahun terakhir tercatat menurun padahal produksi pertanian naik, ini terjadi karena kenaikannya lebih rendah daripada sektor lain. Lapangan usaha ini merupakan potensi unggulan dan harus lebih diperhatikan, salah satu contohnya dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani dan pengembangan pola *agroekonomi* yang didukung oleh lapangan usaha lain yang terkait.

Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.1
KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018 DAN TARGET TAHUN 2019

Kate gori	Uraian (Lapangan Usaha)	(Juta Rupiah)								
		2016	%	2017*	%	2018**	%	Target 2019	%	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.685.259,4	26,15	9.001.574,7	25,09	10.250.452,60	26,92	10.940.618,34	26,94	
B	Pertambangan & Penggalian	546.997,6	1,65	592.724,7	1,65	614.640,50	1,61	651.519,89	1,60	
C	Industri Pengolahan	6.414.384,6	19,31	7.078.756,2	19,73	6.975.982,89	18,32	7.394.646,38	18,21	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.879,5	0,07	24.614,9	0,07	22.673,74	0,06	23.457,37	0,06	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.414,4	0,06	19.920,4	0,06	20.586,85	0,05	21.862,00	0,05	
F	Konstruksi	3.120.497,7	9,40	3.416.774,9	9,53	3.582.579,54	9,41	3.825.560,51	9,42	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.482.566,9	19,52	7.143.243,9	19,91	7.579.735,35	19,91	8.106.228,04	19,96	
H	Transportasi dan Pergudangan	613.113,1	1,85	672.385,9	1,87	723.806,65	1,90	781.286,97	1,92	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	476.593,4	1,43	525.821,8	1,47	533.740,64	1,40	575.075,97	1,42	
J	Informasi dan Komunikasi	1.695.852,9	5,11	1.861.308,1	5,19	1.936.820,56	5,09	2.076.422,17	5,11	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	623.631,0	1,88	672.872,3	1,88	748.261,67	1,97	807.433,77	1,99	
L	Real Estate	649.604,9	1,96	704.489,8	1,96	736.726,99	1,93	784.333,28	1,93	
M,N	Jasa Perusahaan	98.558,3	0,30	107.577,6	0,30	118.553,12	0,31	127.080,16	0,31	
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.243.523,4	3,74	1.335.310,2	3,72	1.367.475,47	3,59	1.436.646,01	3,54	
P	Jasa Pendidikan	1.668.784,0	5,02	1.788.611,2	4,99	1.909.660,80	5,01	2.042.152,10	5,03	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	261.760,1	0,79	282.757,4	0,79	302.153,7	0,79	323.599,30	0,80	
R,S,T,U	Jasa lainnya	590.967,2	1,78	641.892,5	1,79	655.545,30	1,72	696.988,01	1,72	
PDRB		33.212.388,5	100,00	35.870.636,6	100,00	38.079.396,33	100,00	40.614.910,27	100,00	

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Mencermati tabel diatas, perekonomian Kabupaten Kediri ditopang oleh empat lapangan usaha yaitu:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 10.250.452.600.000,- tahun 2018 dan pada tahun 2019 ditargetkan meningkat menjadi Rp. 10.940.618.340.000,-.
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2018 sebesar Rp. 7.579.735.350.000,- dan tahun 2019 ditargetkan naik menjadi Rp. 8.106.228.040.000,-.
- Industri Pengolahan tahun 2018 sebesar Rp. 6.975.982.890.000,- dan pada tahun 2019 ditargetkan naik menjadi Rp. 7.394.646.380.000,-.
- Konstruksi pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.582.579.540.000,- dan tahun 2019 ditargetkan naik menjadi Rp. 3.825.560.510.000,-.

Stabilitas dan pertumbuhan pada keempat sektor tersebut berdampak luas terhadap stabilitas dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kediri secara keseluruhan.

2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kondisi perekonomian secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Tahun dasar yang digunakan untuk penetapan harga konstan sudah menggunakan tahun dasar 2010. Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Kediri pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dan tahun berjalan 2019 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.2
KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018 DAN TARGET TAHUN 2019

(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2016	%	2017*	%	2018**	%	Target 2019	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.968.736,4	23,67	6.025.860,2	22,79	6.425.328,05	22.59	6.598.434,13	22.10
B	Pertambangan & Penggalian	388.302,5	1,54	400.933,3	1,52	398.903,06	1.40	405.434,06	1.36
C	Industri Pengolahan	4.941.742,1	19,60	5.242.999,1	19,83	5.881.699,03	20.68	6.300.362,52	21.10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19.485,3	0,08	20.406,2	0,08	19.387,00	0.07	19.822,77	0.07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.636,1	0,06	15.457,6	0,06	15.825,22	0.06	16.454,86	0.06
F	Konstruksi	2.380.304,2	9,44	2.521.562,8	9,53	2.690.970,01	9.46	2.817.629,12	9.44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.190.448,8	20,59	5.536.744,6	20,94	5.833.294,29	20.51	6.126.296,16	20.52
H	Transportasi dan Pergudangan	481.207,4	1,91	512.693,7	1,94	547.701,60	1.93	579.857,12	1.94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336.027,5	1,33	359.911,7	1,36	368.408,01	1.30	386.942,42	1.30
J	Informasi dan Komunikasi	1.552.033,9	6,16	1.676.874,4	6,34	1.804.620,15	6.35	1.928.686,68	6.46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	458.369,1	1,82	483.329,9	1,83	527.699,16	1.86	556.944,39	1.87
L	Real Estate	524.209,1	2,08	552.949,0	2,09	584.389,83	2.05	612.439,40	2.05
M,N	Jasa Perusahaan	76.740,6	0,30	81.079,3	0,31	85.824,66	0.30	90.175,28	0.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	949.213,1	3,76	984.505,3	3,72	966.467,84	3.40	986.888,69	3.31
P	Jasa Pendidikan	1.242.219,4	4,93	1.305.911,3	4,94	1.364.868,79	4.80	1.429.237,21	4.79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207.638,5	0,82	218.903,3	0,83	233.863,05	0.82	246.092,88	0.82
R,S,T,U	Jasa lainnya	480.586,3	1,91	506.052,2	1,91	689.156,51	2.42	753.136,01	2,52
	PDRB	25.211.900,6	100,00	26.446.174,0	100,00	28.438.406,26	100.00	29.854.833,70	100.00

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Pada PDRB ADHK pada tahun 2018 kontribusi sektor yang dominan masih pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar Rp. 6.425.328.050.000,- dan ditargetkan naik menjadi Rp. 6.598.434.130.000,- pada tahun 2019. Pada urutan kedua adalah sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 5.881.699.030.000,- dan pada tahun 2018 ditargetkan naik menjadi Rp. 6.300.362.520.000,-.

Secara keseluruhan PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.438.406.260.000,- dan target pada tahun 2019 sebesar Rp. 29.854.833.700.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.416.427.440.000.

3) Pertumbuhan Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri bersifat fluktuatif. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% mengalami perlambatan menjadi 4,90% pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 mengalami percepatan lagi sebesar 0,30% menjadi 5,20%. Tren percepatan ini didorong oleh kontribusi 17 sektor usaha yang secara dominan juga mengalami peningkatan yang juga dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing lapangan usaha dan kondisi regional serta global yang semakin kondusif.

4) Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB

PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2018 secara nominal mengalami kenaikan yang merata di semua sektor. Namun demikian, secara prosentase terdapat beberapa kontribusi sektor yang mengalami penurunan. Sebagai contoh yaitu sektor pertanian yang secara nominal naik, namun secara prosentase turun menjadi 22,59% dibanding dengan tahun 2017 sebesar 23,14%. Turunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB disebabkan adanya penurunan produktivitas dan kurangnya minat para pemuda pada bidang pertanian serta faktor-faktor lainnya, sebagaimana tabel 3.2 dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih mempunyai kontribusi paling besar terhadap PDRB.

5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

PDRB per kapita yang lebih kita kenal dengan pendapatan per kapita didapat dari volume PDRB Kabupaten Kediri selama jangka waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Kediri baik secara ADHK maupun ADHB pada tahun 2018 terus mengalami kenaikan. Pendapatan per kapita

atas dasar harga berlaku (ADHB) pada akhir tahun 2018 sebesar 25,39 juta rupiah, naik sebesar 1,89 juta rupiah dibandingkan tahun 2017 yaitu 23,32, sedangkan pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2017 sebesar 16,98 juta rupiah dan tahun 2018 sebesar 17,8 juta rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 0,82 juta rupiah di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Dengan peningkatan PDRB Perkapita yang relatif stabil, diharapkan meningkat pula kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri. PDRB Perkapita Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2018 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.3
PDRB PER KAPITA KABUPATEN KEDIRI
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN
TAHUN 2016 - 2018

(Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2016	2017*	2018**
1	ADHB PDRB Perkapita	21,43	23,32	25,39
2	ADHK PDRB Perkapita	16,24	16,98	17,80

Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

6) Perkembangan Harga (Inflasi)

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat, begitu pula sebaliknya. Laju inflasi dapat pula menggambarkan stabilitas perekonomian daerah.

Tingkat inflasi Kabupaten Kediri tahun 2018 sebesar 4,26% atau mengalami kenaikan sebesar 0,37% dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,89%. Nilai inflasi Kabupaten Kediri tidak terlepas dari pengaruh tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagai satu kesatuan perekonomian. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2018 serta target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.4
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018 SERTA TARGET TAHUN 2019

NO	URAIAN	2016	2017*	2018**	Target 2019
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,02	4,90	5,20	5,42
2	Inflasi	3,68	3,89	4,26	3,57

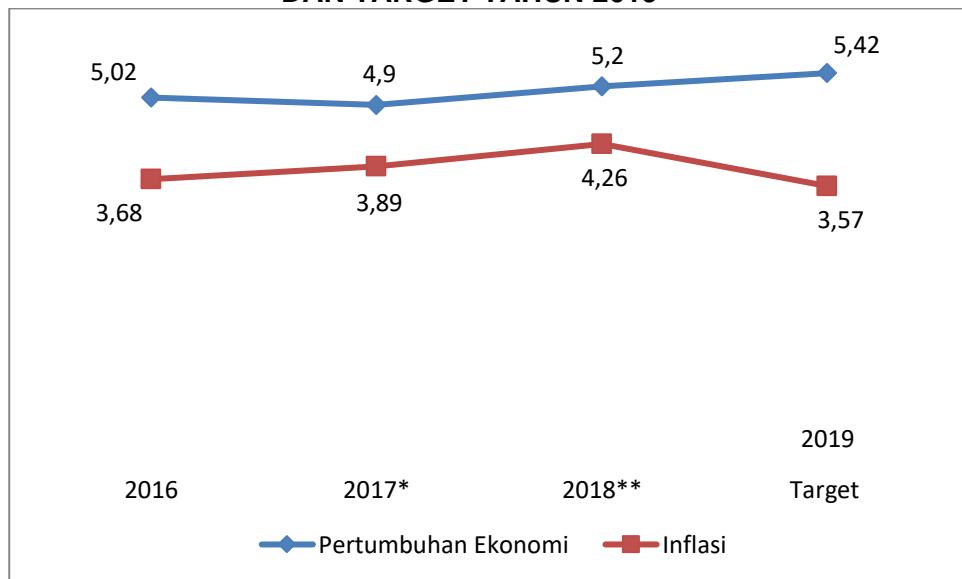
Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Kediri

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri pada tahun 2019 ditargetkan mengalami peningkatan menjadi 5,42%. Laju pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Kabupaten Kediri tahun 2016 - 2018 serta target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebagaimana grafik berikut.

GRAFIK 3.1
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2018
DAN TARGET TAHUN 2019



Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Kediri

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

7) Tingkat Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir, nilai investasi di Kabupaten Kediri masih bersifat fluktuatif, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 462.935.069.997,-, pada tahun 2017 sebesar Rp. 819.704.459.551 dan kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp. 586.856.516.495. Penanaman modal/Investasi di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.5
PENANAMAN MODAL/INVESTASI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016 - 2018**

NO	URAIAN	Nilai Investasi (Rp)
1	2016	462.935.069.997
2	2017 *	819.704.459.551
3	2018**	586.856.516.495

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kediri

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Sesuai dengan perkembangan perekonomian Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai dengan 2018 serta proyeksi Tahun 2019, maka faktor yang diperkirakan menjadi tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2020

Pada tahun 2020, diperkirakan Pemerintah Kabupaten Kediri masih akan menghadapi sejumlah tantangan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar dan ketenagakerjaan;
- b) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Kediri sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan;
- c) Meningkatkan produktivitas pertanian dan daya saing UMKM;
- d) Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif untuk menciptakan lapangan kerja;

- e) Mengembangkan potensi wisata lokal sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun asing.

3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Meninjau kondisi perekonomian Kabupaten Kediri tahun 2016 sampai dengan 2018 dan perkiraan tahun 2019, maka prospek perekonomian pada Tahun 2020 sebagai berikut:

- a) PDRB HK dan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Kediri pada tahun 2020 diharapkan mengalami kenaikan antara 5 - 6%.
- b) Begitu juga PDRB HB dan PDRB perkapita, ADHB pada tahun 2020 diharapkan mengalami kenaikan antara 6 - 8%.
- c) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri tahun 2020 diperkirakan mengalami peningkatan yaitu pada kisaran angka 5,66%.
- d) Inflasi pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 3,30%.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

Transparansi tentang Anggaran Daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

2. Disiplin Anggaran.

Belanja daerah Kabupaten Kediri diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

3. Keadilan Anggaran.

Pembentukan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

5. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing Perangkat Daerah maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

3.2.1 Proyeksi/Target Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2017 - 2018, tahun berjalan 2019 dan proyeksi/target pada tahun 2020 - 2021 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.6
REALISASI TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019
DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 - 2021
(Rupiah)

No	Uraian	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi /Target tahun 2020	Proyeksi /Target tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	533.985.244.135,13	476.905.008.817,62	390.995.860.728,70	424.921.835.514,82	440.325.196.890,82
1.1.1	Pajak Daerah	206.034.579.491,00	265.267.313.670,79	175.000.000.000,00	182.920.000.000,00	190.840.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	31.901.432.343,00	32.834.519.991,80	30.836.150.100,00	28.607.872.100,00	30.836.150.100,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.169.396.038,40	8.396.015.368,47	8.615.814.511,40	8.870.897.887,40	8.125.981.263,40
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	287.879.836.262,73	170.407.159.786,56	176.543.896.117,30	204.523.065.527,42	209.523.065.527,42
1.2	Dana Perimbangan	1.683.437.725.657,00	1.769.048.284.685,00	1.886.554.251.000,00	2.032.268.085.310,00	2.151.845.124.270,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	90.232.919.453,00	137.139.936.519,00	152.375.090.000,00	156.910.536.300,00	156.910.536.300,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.220.408.783.000,00	1.225.331.641.000,00	1.275.628.643.000,00	1.275.628.643.000,00	1.275.628.643.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	372.796.023.204,00	406.576.707.166,00	458.550.518.000,00	599.728.906.010,00	719.305.944.970,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	500.990.164.904,07	621.997.214.890,22	665.661.289.476,00	633.848.214.344,00	633.848.214.344,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	120.022.381.060,97	128.694.925.000,00	127.488.008.000,00	127.488.008.000,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	186.109.359.344,00	186.249.309.187,00	166.586.688.476,00	195.326.047.344,00	195.326.047.344,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	278.633.039.000,00	305.441.907.000,00	370.319.676.000,00	310.974.159.000,00	310.974.159.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	15.925.000.000,00	7.313.886.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lain-Lain	20.322.766.560,07	2.969.731.142,25	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	2.718.413.134.696,20	2.867.950.508.392,84	2.943.211.401.204,70	3.091.038.135.168,82	3.226.018.535.504,82

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kabupaten Kediri

3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Analisa dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah secara garis besar merupakan proses mengamati dan menggali sumber pendapatan yang dapat diperoleh serta melakukan perkiraan terhadap jenis-jenis sumber dana tersebut. Pembahasan terhadap analisa dan perkiraan sumber-sumber pendanaan Kabupaten Kediri diuraikan sebagai berikut.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kediri tahun 2020 pada sisi pendapatan masih dilaksanakan melalui optimalisasi dan intensifikasi/ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan seminimal mungkin membebani masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada sehingga tercapai peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran setiap tahunnya, dengan demikian tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat ditekan menuju pembiayaan mandiri (self financing). Adapun sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan (meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus), lain-lain pendapatan daerah yang sah (meliputi hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya) dan pembiayaan daerah (meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisalebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah).

Gambaran pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Kediri, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 22 ayat (1) berasal dari:

- (i) Pajak Daerah;
- (ii) Retribusi Daerah;
- (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- (a) Pajak Hotel;
- (b) Pajak Restoran;
- (c) Pajak Hiburan;
- (d) Pajak Reklame;
- (e) Pajak Penerangan Jalan;
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (g) Pajak Parkir;
- (h) Pajak Air Tanah;
- (i) Pajak Sarang Burung Walet;
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kediri telah menerbitkan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017.

Karena pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat, maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan ditingkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

1. Mengadakan pendataan ulang terhadap objek pajak atau objek retribusi baru;
2. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi (WR) dengan menerapkan manajemen standar ISO;
4. Penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak/retribusi dengan memberikan kemudahan akses WP/WR (penerapan sistem *online* via bank) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembayaran Pajak Daerah Melalui Bank di Kabupaten Kediri;
5. Menegakkan hukum untuk membangun ketataan WP/WR;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pajak daerah dengan penerapan sistem E-tax.

Pada tahun 2018 tercatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 476.905.008.817,62, dengan proporsi terhadap pendapatan daerah sebesar 19,64%. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Proporsinya terhadap pendapatan daerah tahun 2017 - 2018, Tahun Berjalan 2019 dan Proyeksi/Target Tahun 2020 - 2021 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.7
PERKEMBANGAN PAD DAN PROPORSINYA TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019 DAN PROYEKSI 2020 - 2021

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan daerah (Rp)	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
1.	2017	533.985.244.135,13	2.718.413.134.696,20	19,64
2.	2018	476.905.008.817,62	2.867.950.508.392,84	16,63
3.	Tahun Berjalan 2019*	390.995.860.728,70	2.943.211.401.204,70	13,28
4.	Proyeksi 2020**	424.921.835.514,82	3.091.038.135.168,82	13,75
5.	Proyeksi 2021**	440.325.196.890,82	3.226.018.535.504,82	13,65

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kabupaten Kediri

*) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Berjalan 2019 proyeksikan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 390.995.860.728.70,00 dengan proporsi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 13,28% dan pada Tahun 2020 diproyeksikan naik lagi menjadi Rp. 424.921.835.514,82 dengan proporsi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 13,75%.

Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2018, Tahun Berjalan 2019 dan Proyeksi tahun 2020 - 2021 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.8
STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019
DAN PROYEKSI TAHUN 2020 - 2021**

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ((3)+(4)+(5))
1.	2017	533.985.244.135,13	1.683.437.725.657,00	500.990.164.904,07	2.718.413.134.696,20
2.	2018*	476.905.008.817,62	1.769.048.284.685,00	621.997.214.890,22	2.867.950.508.392,84
3.	Tahun Berjalan 2019**	390.995.860.728,70	1.886.554.251.000,00	665.661.289.476,00	2.943.211.401.204,70
4.	Proyeksi 2020**	424.921.835.514,82	2.032.268.085.310,00	633.848.214.344,00	3.091.038.135.168,82
5.	Proyeksi 2021**	440.325.196.890,82	2.151.845.124.270,00	633.848.214.344,00	3.226.018.535.504,82

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kabupaten Kediri, data diolah

*) Angka diperbaiki **)Angka sementara

Sedangkan Kontribusi Pajak terhadap PAD Kabupaten Kediri tahun 2017 - 2018, Tahun Berjalan 2019 dan Proyeksi/Target Tahun 2020 - 2021 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.9
KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PAD KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019
DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2020 - 2021**

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Pajak thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3)/(4))
1.	2017	206.034.579.491,00	533.985.244.135,13	38,58
2.	2018	265.267.313.670,79	476.905.008.817,62	55,62
3.	Tahun Berjalan 2019*	175.000.000.000,00	390.995.860.728,70	44,76
4.	Proyeksi/Target 2020**	182.920.000.000,00	424.921.835.514,82	43,05
5.	Proyeksi/Target 2021**	190.840.000.000,00	440.325.196.890,82	34,00

Sumber : Bapenda Kabupaten Kediri, data diolah

*) Angka diperbaiki **)Angka sementara

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi hasil pendapatan (*revenue sharing policy*). Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Terhadap dana perimbangan ini maka strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Kediri secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan pendapatan lainnya yang merupakan pendapatan bagi hasil bagi daerah.
2. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.

Pada tahun berjalan 2019 proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 64,09% dan pada tahun 2020 naik menjadi 65,75% dari total Pendapatan Daerah. Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2017 - 2018, tahun berjalan 2019 dan proyeksi/target tahun 2020 - 2021 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.10
DANA PERIMBANGAN DAN PROPORSINYA
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019
DAN PROYEKSI TAHUN 2020 - 2021**

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
1.	2017	1.683.437.725.657,00	2.718.413.134.696,20	61.93
2.	2018	1.769.048.284.685,00	2.867.950.508.392,84	61.68
3.	Tahun Berjalan 2019*	1.886.554.251.000,00	2.943.211.401.204,70	64.09
4.	Proyeksi 2020**	2.032.268.085.310,00	3.091.038.135.168,82	65.75
5.	Proyeksi 2021**	2.151.845.124.270,00	3.226.018.535.504,82	66.70

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kabupaten Kediri, data diolah
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan penerimaan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah dengan aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan dapat memperoleh alokasi dana/anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui hibah, dana/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2017 dan 2018, tahun berjalan 2019 beserta proyeksi/target pada tahun 2020 - 2021 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.11
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAN PROPORSINYA
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019
DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2020-2021**

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah thd Pendapatan Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
1.	2017	500.990.164.904,07	2.718.413.134.696,20	18,43
2.	2018	621.997.214.890,22	2.867.950.508.392,84	21,69
3.	Berjalan 2019*	665.661.289.476,00	2.943.211.401.204,70	22,61
4.	Proyeksi 2020**	633.848.214.344,00	3.091.038.135.168,82	20,50
5.	Proyeksi 2021**	633.848.214.344,00	3.226.018.535.504,82	19,64

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kab. Kediri
*) Angka diperbaiki**) Angka sementara

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Kediri selama kurun waktu tahun 2017 - 2018, tahun Berjalan 2019 serta proyeksi/target tahun 2020 - 2021, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Secara bertahap berusaha meningkatkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional;
2. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara :
 - (a) Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kediri yaitu :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 tahun 2017.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2017.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2017.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kediri Nomor 6 tahun 2015.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (b) Sejak tahun 2013 pengelolaan PBB sudah dilaksanakan secara *online realtime* langsung setor ke Kas Umum Daerah (Kasda).
3. Melakukan program-program untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri;
 4. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur;
 5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana bagi hasil dari provinsi sehingga diharapkan akan meningkat setiap tahunnya;
 6. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah;

7. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut;
8. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Kediri, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan pedesaan dan kecamatan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan belanja daerah tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas yang mendukung program-program strategis. Belanja daerah memprioritaskan belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Kediri, meskipun terjadi dinamika ekonomi global dan domestik. Belanja daerah dikelola berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Peningkatan tuntutan masyarakat atas layanan pemerintah yang berkualitas, memiliki konsekuensi logis dengan meningkatnya kualitas belanja daerah. Disamping itu inovasi-inovasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengembangan jenis dan volume kegiatan.

Arah belanja daerah juga mengacu pada prioritas pembangunan baik Nasional maupun Provinsi. Prioritas pembangunan tersebut diwujudkan dalam berbagai jenis kegiatan yang menunjukkan adanya peningkatan daya kreativitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, demikian juga dengan penambahan volume kegiatan menunjukkan peningkatan *coverage* (luasan) sasaran kegiatan untuk meningkatkan *aksesibilitas* (keterjangkauan) masyarakat,

sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Kediri.

Prioritas belanja daerah digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Daerah disusun dengan mengedepankan program prioritas yang sinergi dengan program prioritas nasional maupun provinsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat serta lebih menarik bagi para investor;
- c. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan;
- d. Mengalokasikan dana belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mengantisipasi dan menangani keadaan darurat serta bantuan sosial akibat bencana alam;
- f. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun dan disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan;
- g. Menguatkan program - program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- h. Belanja daerah lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 4 (empat) urusan, yaitu Urusan Wajib Dasar, Wajib Non Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang, dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020 Kabupaten Kediri memproyeksikan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.221.771.971.810,00.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
 - c. Belanja hibah, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau BUMD, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri memproyeksikan anggaran belanja hibah pada tahun 2020 sebesar Rp. 141,565,750,905,00,00.
 - d. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Pemerintah Kabupaten Kediri memproyeksikan anggaran belanja bantuan sosial tahun 2020 sebesar Rp. 100.555.057.614,38.

- e. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Kediri memproyeksikan anggaran belanja bagi hasil tahun 2020 sebesar Rp. 24,942,450,300.00.
- f. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Anggaran belanja bantuan keuangan tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 477,713,003,000.00.
- g. Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diproyeksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Anggaran belanja tidak terduga tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 11.000.000.000.00.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja ini merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Yang termasuk dalam kategori belanja barang/jasa adalah Belanja Pengadaan barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
 - c. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Struktur Belanja Kabupaten Kediri Tahun 2017 - 2018, Tahun Berjalan 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 - 2021 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.12
STRUKTUR BELANJA KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019
DAN PROYEKSI TAHUN 2020 - 2021**

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) + (4))
1.	2017	1.579.456.346.655,76	1.189.533.391.118,15	2.768.989.737.773,91
2.	2018	1.743.779.904.034,00	1.146.189.931.095,00	2.889.969.835.129,00
3.	Tahun Berjalan 2019*	1.834.757.848.852,70	1.385.701.506.455,00	3.220.459.355.307,70
4.	Proyeksi 2020**	1.977.548.233.629,82	1.575.032.971.839,44	3.552.581.205.468,82
5.	Proyeksi 2021**	1.911.091.674.263,38	1.636.469.931.541,44	3.547.561.605.804,82

Sumber: BPKAD Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Untuk realisasi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2017 - 2018, Tahun Berjalan 2019 dan proyeksi tahun 2020 - 2021 Pemerintah Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.13
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 – 2018, TAHUN BERJALAN 2019
DAN PROYEKSI TAHUN 2020 - 2021

(Rupiah)

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi pada Tahun 2020	Proyeksi pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.579.456.346.655,76	1.743.779.904.034,00	1.834.757.848.852,70	1.977.548.233.629,82	1.911.091.674.263,38
2.1.1	Belanja Pegawai	1.063.606.112.339,00	1.207.269.413.209,00	1.212.450.095.322,70	1.221.771.971.810,00	1.181.892.371.810
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Hibah	49.239.709.185,00	52.302.600.000,00	58.768.000.000,00	141.565.750.905,00	111.643.350.905,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	19.878.765.125,76	28.186.070.000,00	49.032.114.596,00	100.555.057.614,38	95.555.057.614,38
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19.655.621.660,00	22.961.355.925,00	24.287.890.934,00	24.942.450.300,00	24.287.890.934,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	425.957.298.900,00	429.060.464.900,00	482.174.468.000,00	477.213.003.000,00	477.713.003.000,00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	1.118.839.446,00	4.000.000.000,00	8.045.280.000,00	11.000.000.000,00	20.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.189.533.391.118,15	1.146.189.931.095,00	1.385.701.506.455,00	1.575.032.971.839,44	1.636.469.931.541,44
2.2.1	Belanja Pegawai	51.475.453.473,73	57.309.496.554,75	69.285.075.323,00	78.751.648.592,00	81.823.496.500
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	462.778.661.589,17	401.166.475.883,25	484.995.527.260,00	551.361.540.144,00	572.764.146.000,00
2.2.3	Belanja Modal	675.279.276.055,25	687.713.958.657,00	831.420.903.872,00	945.019.783.103,44	981.881.959.041,44
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.768.989.737.773,91	2.889.969.835.129,00	3.220.459.355.307,70	3.552.581.205.468,82	3.547.561.605.804,82

Sumber: BPKAD Kab. Kediri

Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 34,39%, mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 37,65% pada tahun 2019. Angka proporsi ini mencerminkan bahwa alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan relatif lebih besar dibandingkan alokasi dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.14
PROPORSI BELANJA PEGAWAI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019
DAN PROYEKSI 2020 - 2021**

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
1.	2017	1.063.606.112.339,00	2.768.989.737.773,91	38,41
2.	2018	1.207.269.413.209,00	2.889.969.835.129,00	41,77
3.	Tahun Berjalan 2019	1.212.450.095.322,70	3.220.459.355.307,70	37,65
4.	Proyeksi 2020**	1.221.771.971.810,00	3.552.581.205.468,82	34,39
5.	Proyeksi 2021**	1.181.892.371.810,00	3.547.561.605.804,82	33,32

Sumber: BPKAD Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Kediri terkait dengan pengelolaan belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung dalam APBD adalah mengedepankan pola pembelanjaan yang proporsional berdasarkan prioritas pembangunan daerah dengan efektif dan efisien serta sinergi dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan dari sisi belanja daerah, Kabupaten Kediri pada tahun 2020 akan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah di Kabupaten Kediri disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat serta lebih menarik bagi para investor;
- c. Memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar memiliki daya saing.

- d. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan;
- e. Belanja pegawai diarahkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan pegawai dengan memperhitungkan yang besarnya sekitar 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan) serta pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- f. Mengalokasikan dana belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak tertuang dalam bentuk program/kegiatan;
- h. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun dan disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan;
- i. Menguatkan program-program pengurangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- j. Belanja daerah lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah diarahkan untuk membiayai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penetapan SiLPA menyesuaikan dengan kapasitas potensi riil untuk mengurangi kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Untuk menghindari terjadinya dana yang mengganggu (idle money) diupayakan dengan meminimalkan adanya sisa lebih pembiayaan tahun berjalan. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan APBD tahun berikutnya;
2. Penerimaan piutang daerah.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;
4. Optimalisasi lembaga keuangan mikro, terutama yang beroperasi di wilayah perdesaan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Penyertaan modal pada BUMD;
2. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kediri.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 - 2018, Tahun Berjalan 2019 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2020 - 2021 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.15
REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2017 - 2018, TAHUN BERJALAN 2019
DAN PROYEKSI TAHUN 2020 - 2021 DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI

(Rupiah)

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi pada Tahun 2020	Proyeksi pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	473.605.797.114,38	200.000.000.000,00	297.373.454.103,00	430.000.000.000,00	330.000.000.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	1.019.295.707,24	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.1.7	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	70.000.000.000,00	0,00
3.1.9	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.482.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		477.107.693.821,62	200.200.000.000,00	297.473.454.103,00	500.100.000.000,00	330.100.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	403.600.000,00	225.500.000,00	8.556.929.700,00	8.556.929.700,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pembayaran Utang/Kewajiban kepada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	JUMLAH PENGELOUARAN PEMBIAYAAN	0,00	403.600.000,00	20.225.500.000,00	38.556.929.700,00	8.556.929.700,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		694.956.441.964,43	476.107.693.821,62	277.247.954.103,00	461.543.070.300,00	321.543.070.300,00

Sumber: BPKAD Kab. Kediri

IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program yang didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan hasil analisis terhadap visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan isu strategis di Kabupaten Kediri pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi dan efektivitas bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Kediri juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan untuk semua (*development for all*) dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Kediri tahun 2020 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 periode ke-3 (tiga) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2016 - 2021. RKPD Tahun 2020 merupakan tahun ke-4 (empat) bagi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021. Dengan demikian, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2020 mengacu kepada Visi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 yaitu:

"Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional ."

Visi tersebut dijabarkan lebih rinci dengan Tujuan dan sasaran pada masing misi-misi sebagai berikut:

**TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI**

Tujuan	Sasaran
Misi 1 Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni	
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pengamalan agama di masyarakat b. Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman
Misi 2 Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian b. Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat c. Meningkatkan produksi bahan pangan utama d. Meningkatnya produksi hasil perkebunan e. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan
Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku c. Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat d. Meningkatnya koordinasi dalam rangka pengendalian fluktuasi harga.

Tujuan	Sasaran
Misi 4 Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan	
Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan
Misi 5 Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan	
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Misi 6 Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro	
Mengembangkan Kreatifitas, Produktifitas Dan Pendapatan Masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah (UKM) b. Meningkatnya volume perdagangan c. Meningkatnya sektor industri d. Meningkatnya kemandirian keuangan pemerintah
Misi 7 Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	
Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreatifitas dan produktifitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata b. Tersedianya landasan dan pengembangan sistem inovasi daerah c. Meningkatnya Kualitas Kelompok Seni Budaya
Misi 8 Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan	
Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Koperasi
Misi 9 Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat,	

Tujuan	Sasaran
terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha	
Mempermudah Perizinan sebagai Pendorong Investasi dan Dunia Usaha	Meningkatnya investasi di daerah
Misi 10 Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan	
Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pemberdayaan masyarakat, terutama kaum perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana b. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan c. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan d. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal
Misi 11 Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi	
Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. b. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan. c. Meningkatnya profesionalitas ASN. d. Meningkatnya kualitas pengendalian administrasi pembangunan. e. Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum serta kesadaran hukum masyarakat. f. Meningkatnya kerjasama daerah. g. Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan.
Misi 12 Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang	
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur guna menunjang Percepatan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah b. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

Tujuan	Sasaran
Misi 13 Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi	
Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Misi 14 Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.	
Mengembangkan Lingkungan Hidup yang Seimbang dan Sehat	a. Menurunnya beban pencemaran lingkungan b. Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang
Misi 15 Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat	
Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdaya saing	a. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja b. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja

Dengan menganalisa hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tahun 2020, maka tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah "Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Dalam Menunjang Pengembangan Potensi Daerah". Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2020 " Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas ". Maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 - 5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0 - 4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8- 5,1 persen.

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2020, mengacu pada prioritas Nasional dan Provinsi yaitu sebagai berikut:

Nasional	Provinsi
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah	2. Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan pangan, Air, Energi dan lingkungan Hidup	4. Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan keamanan	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban

Dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri sebagai berikut:

1. Bidang Hukum dan Pemerintahan
 - a. Peningkatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat
 - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
 - c. Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa.
 - d. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat
 - e. Meningkatkan sosialisasi terhadap produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Daerah
 - f. Pengawasan terhadap pengisian perangkat desa agar dapat dilaksanakan secara obyektif dan transparan
 - g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang administrasi kependudukan
 - h. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - i. Melakukan pengawasan kepastian pelayanan sertifikasi tanah
 - j. Mempermudah perizinan terhadap pelaku usaha, terutama usaha mikro.
 - k. Mengevaluasi secara menyeluruh Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Kediri guna tercapainya produk hukum yang efektif dan efisien.
 - l. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dalam bidang hukum dan HAM yang mendukung tegaknya peraturan perundang- undangan.
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - a. Pemberdayaan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
 - b. Peningkatan SDM Petani pedesaan.
 - c. Pemberian bantuan modal/peralatan guna pemberdayaan dan peningkatan UMKM
 - d. Pengawasan terhadap ketersediaan pupuk dan bibit untuk menunjang produktivitas petani.
 - e. Pengembangan dan pengelolaan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - f. Meningkatkan kebersihan dan tata kelola pasar tradisional

- g. Peningkatan ekonomi kewirausahaan dengan bentuk kegiatan bantuan modal bagi para petani dan peternak serta pelatihan terhadap kelompok tani.
- h. Peningkatan promosi hasil UMKM melalui media sosial.
- i. Peningkatan pengawasan terhadap harga komoditas dan Produktifitas petani.
- j. Optimalisasi pemanfaatan potensi wisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan

3. Bidang Pembangunan.

- a. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya.
- b. Peningkatan pembangunan drainase untuk meminimalisir banjir dan kerusakan jalan
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung menuju obyek wisata dan pengembangan pusat perekonomian masyarakat
- d. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan
- e. Pembangunan dan perbaikan sarana-sarana olahraga
- f. Pembangunan dan perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (P JL) secara menyeluruh
- g. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan ruang terbuka hijau.
- h. Program peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan bangunan gedung,

4. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan anak
- c. Mengembangkan pendidikan bagi anak penyandang Disabilitas.
- d. Pemberdayaan dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi penyandang Disabilitas.
- e. Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- f. Mensosialisasikan Balai Latihan Kerja (BLK) ke sekolah-sekolah SLTA sederajat tentang rencana pelatihan kerja di BLK guna meningkatkan produktifitas kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan guru untuk Pendidikan non formal seperti pondok pesantren maupun Madrasah Diniyah

- h. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- i. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelatihan-pelatihan terhadap generasi muda untuk mengurangi pengangguran.
- j. Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan agar semua macam bantuan dapat tepat sasaran

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri tahun 2020 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

- a. Identifikasi Prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015 - 2020;
- b. Identifikasi Prioritas dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2020;
- c. Identifikasi Prioritas dan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
- d. Identifikasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005 - 2025;
- e. Identifikasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021;
- f. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2020;
- g. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kediri Pada Musrenbang RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020;
- h. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan berbagai isu strategis serta permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kediri, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah.
3. Pengembangan agribisnis, industri, perdagangan dan pariwisata dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban.

TABEL 4.2
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

No.	Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas RKPD Tahun 2020
1.	Perwujudan masyarakat mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dengan biaya murah (terjangkau), Pengembangan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan Peningkatan kesejahteraan lahir batin di masyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta percepatan penanggulangan kemiskinan
2.	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Percepatan Pembangunan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
3.	Pengembangan Lingkungan Hidup yang Seimbang dan Sehat Pengembangan industri pariwisata untuk mendorong kreatifitas dan produktifitas masyarakat memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah Pengembangan koperasi Kemudahan perizinan sebagai pendorong investasi dan dunia usaha	Pengembangan agribisnis, industri, perdagangan dan pariwisata dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup
4.	Perwujudan Aparatur Pemerintah Yang Profesional Pembangunan Kehidupan Masyarakat yang Tertata, Taat Hukum, Tertib Berbasis Kependudukan Peningkatan kualitas kehidupan beragama	Peningkatan ketentraman dan ketertiban

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 4.3
PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PRIORITAS 1**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		PD Penanggung jawab
			Indikator	Target	
1.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nasional: “Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan”. ❖ Provinsi: “Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan” ❖ Kab. Kediri: “Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta percepatan penanggulangan kemiskinan” 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ▪ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ▪ Program Manajemen pelayanan pendidikan ▪ Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) ▪ Program Pendidikan Non Formal ▪ Program peningkatan kualitas pemuda dan olahraga ▪ Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ▪ Program Kesehatan Reproduksi Remaja ▪ Program Upaya Kesehatan Masyarakat ▪ Program Pengawasan Obat dan Makanan ▪ Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ▪ Program Perbaikan Gizi Masyarakat ▪ Program Pengembangan Lingkungan Sehat 	1) APK PAUD	98,65	Dinas Pendidikan
			2) Angka rata-rata lama sekolah	8,29	
			3) Angka Partisipasi Kasar (APK)		
			- SD/MI/ Paket A	109,85	
			- SMP/MTs/ Paket B	99,80	
			4) Angka Partisipasi Murni (APM)		
			- SD/MI/ Paket A	99,93	
			- SMP/MTs/ Paket B	80	
			5) Angka kelulusan (AL):		
			- SD/MI	99,80	
			- SMP/MTs	99,87	
		<ul style="list-style-type: none"> 1) Angka Kematian Ibu 2) Angka Kematian Bayi 3) Angka usia harapan hidup 	1) Angka Kematian Ibu	58,30	Dinas Kesehatan
			2) Angka Kematian Bayi	7,08	
			3) Angka usia harapan hidup	72,59	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		PD Penanggung jawab
			Indikator	Target	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ▪ Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ▪ Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ▪ Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya ▪ Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata ▪ Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia ▪ Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan ▪ Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Bidang Kesehatan ▪ Program Kesehatan Anak Usia Sekolah ▪ Program Pengadaan, Peningkatan dan Pengembangan Uji Laboratorium Kesehatan ▪ Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ▪ Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Keluarga Berencana ▪ Program Pelayanan Kontrasepsi ▪ Program Kesehatan reproduksi remaja ▪ Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri ▪ Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ▪ Program Pengembangan pusat pelayanan informasi 	1) Persentase Peserta KB MKJP	29,75	DPPK BP3A

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		PD Penanggung jawab
			Indikator	Target	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ dan konseling ■ Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga ■ Program pengendalian penduduk 			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ■ Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan ■ Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan ■ Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 	2) Persentase kasus KDRT yang difasilitasi	95	DPPKBP3A
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa ■ Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan ■ Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa ■ Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa ■ Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK ■ Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa 	1) Persentase BUMDes 2) Jumlah Desa tertinggal	100 93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Program Perlindungan Tenaga Kerja ■ Program Peningkatan Hubungan Industrial dan Jamsostek ■ Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ■ Program Penempatan tenaga kerja ■ Program Ketransmigrasian 	1) Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2) Persentase Kepatuhan perusahaan terhadap norma jamsostek	54 -	Dinas Tenaga Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pemberdayaan Sosial • Program Penanggulangan Kemiskinan 	1) Persentase PMKS yang ditangani	22,73	Dinas Sosial
		■ Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1) Jumlah Desa	8	BPBD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		PD Penanggung jawab
			Indikator	Target	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Kedauratan dan logistik ▪ Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana <ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan dan pengembangan aparatur 	Tangguh Bencana		
		<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan dan pengembangan aparatur 	1) Persentase pejabat struktural yang telah diklat PIM sesuai jenjangnya 2) Persentase ASN yang mendapat penilaian prestasi kinerja minimal baik	87,98 94	BKD
		<ul style="list-style-type: none"> • Program fasilitaspeningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur • Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah • Program penataan dan penyempurnaan dan kebijakan sistem prosedur pengawasan • Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi • Program penataan peraturan perundang – undangan • Program peningkatan kualitas pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik • Program optimalisasi fungsi pengawasan • Program peningkatan kompetensi DPRD dan alat kelengkapan DPRD • Program peningkatan pelaksanaan kode etik DPRD • Program penguatan perumusan perencanaan DPRD 	1) Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklajuti 2) Persentase Perda yang disetujui bersama	90 75	Sekretariat DPRD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		PD Penanggung jawab
			Indikator	Target	
		<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan dan pengembangan aparatur • Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur • Program penataan kelembagaan • Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH • Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan • Program peningkatan kualitas pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik • Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah • Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan • Program peningkatan disiplin aparatur • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Program perencanaan pembangunan daerah • Program pengembangan data/informasi daerah • Program perencanaan pembangunan ekonomi • Program perencanaan sosial dan budaya • Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 	3) Nilai SAKIP	BB	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat daerah - Inspektorat - BPKAD - Bappeda
		<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kualitas pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik • Program Fasilitas Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur • Program Peningkatan 	4) Persentase OPD Pelayanan yang mendapat nilai IKM kriteria baik	90	Sekretariat Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		PD Penanggung jawab
			Indikator	Target	
		Keindahan Lingkungan Kantor <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program peningkatan kapasitas kelembagaan • Program penataan administrasi kependudukan 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah • Program pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan 	5) Persentase tingkat penyerapan anggaran OPD diatas 80%	84	
		<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa • Program penataan perundang-undangan • Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 	6) Persentase Penyelesaian produk hukum	95	
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program pengembangan wilayah perbatasan • Program Pengembangan Data/Informasi • Program evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah • Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah • Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 	7) Jumlah perjanjian kerjasama hasil tindak lanjut dari kesepakatan bersama	12	

TABEL 4.4
PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PRIORITAS 2

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		PD Penanggung jawab
			Indikator	Target	
1	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nasional: “Infrastruktur dan pemerataan wilayah”. ❖ Provinsi: “Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan”. ❖ Kab. Kediri: “Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah”. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pembangunan jalan dan jembatan ▪ Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong ▪ Program pembangunan turap/talud/bronjong ▪ Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan ▪ Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan/ jembatan/gedung kantor ▪ Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan ▪ Program pembangunan infrastruktur pedesaan ▪ Program pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah ▪ Program sinkronisasi dan koordinasi ▪ Program pembangunan prasarana penunjang jalan ▪ Program perencanaan tata ruang ▪ Program pengendalian tata ruang ▪ Program pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan ▪ Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Jembatan dalam kondisi baik 2. Persentase panjang Jalan dalam kondisi baik 	86 93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ▪ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ ▪ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan ▪ Program Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Persentase transportasi umum yang laik fungsi 4. Persentase Ketersediaan rambu lalu lintas lain 	92,5 76	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		PD Penanggung jawab
			Indikator	Target	
		<p>Sarana dan Prasarana Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu - Lintas ▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Kinerja Sektor Perhubungan ▪ Program Pembangunan Sistem Informasi Bidang Perhubungan 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan ▪ Program pembangunan rumah sakit ▪ Program pembangunan infrastruktur perdesaan ▪ Program pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan ▪ Program Pengembangan Perumahan ▪ Program lingkungan sehat perumahan ▪ Program pemberdayaan komunitas perumahan ▪ Program pelayanan administrasi umum ▪ Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ▪ Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan ▪ Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 	<p>5. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh</p> <p>6. Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak</p>	<p>20 90</p>	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ▪ Program peningkatan pendapatan daerah 	1) Persentase PeningkatanP AD	4,28	Bapenda
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa ▪ Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi ▪ Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 	7. Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		PD Penanggung jawab
			Indikator	Target	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program kerjasama informasi dengan mass media ▪ Program peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi ▪ Program pengembangan e-Government ▪ Program pengembangan data center ▪ Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 			

**TABEL 4.5
PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PRIORITAS 3**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
1.	❖ Nasional: “Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja” Dan “Ketahanan pangan, Air, Energi dan lingkungan Hidup”. ❖ Provinsi: “Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja” Dan “Peningkatan ketahanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah ▪ Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif ▪ Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi ▪ Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan ▪ Program peningkatan dan pengembangan ekspor ▪ Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan ▪ Program peningkatan efisiensi pedagangan dalam negeri ▪ Program peningkatan kemampuan teknologi industri ▪ Program penataan Struktur industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah IKM yang berdaya ▪ Persentase koperasi aktif ▪ Nilai ekspor daerah (ribu US \$) ▪ Pertumbuhan industri ▪ Nilai realisasi investasi (Miliar Rupiah) 	455 70,50 25.000 3.500 517,83 0715	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro DIKOPUS MIK Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 			DPMPTS P

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
	pangan, pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup". ❖ Kab. Kediri: “Pengembangan agribisnis, industri, perdagangan dan pariwisata dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup”.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi ▪ Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Budidaya Perikanan • Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan • Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase peningkatan Produksi perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Kolam (ton) - Perairan Umum (ton) 	5,49 5	Dinas Perikanan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan pemasaran pariwisata ▪ Program pengembangan destinasi pariwisata ▪ Program pengembangan kemitraan ▪ Program Peningkatan & Pemberdayaan melalui PKK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Kunjungan Wisata yang tercatat 	2.438.6 11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan nilai budaya ▪ Program pengelolaan kekayaan budaya ▪ Program pengelolaan keragaman budaya ▪ Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan 	50	
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak • Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan • Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan • Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan • Program Pengembangan Perbibitan Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase peningkatan produksi peternakan <ul style="list-style-type: none"> - Daging - Telur - Susu ▪ Jumlah produksi peternakan (kg) <ul style="list-style-type: none"> - Daging - Telur 	0,65 0,92 4 19.060. 159 80.782. 876	DKPP

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			- Susu	19.083.993	
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Ketahanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rata-rata Ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun) ▪ Persentase pemenuhan konsumsi pangan utama 	140,40 133,6	DKPP
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Penguasaan Teknologi Pertanian • Program Peningkatan Kesejahteraan Petani • Program Pengembangan Data dan Informasi Pertanian • Program Pengamanan Produksi Pertanian • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian • Program Pengembangan Agribisnis • Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Produksi bahan pangan utama ▪ Nilai produksi Perkebunan 	824.500 239.380	Dinas Pertanian dan Perkebunan

TABEL 4.6
PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PRIORITAS 4

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
1.	❖ Nasional: “Stabilitas Pertahanan dan keamanan”. ❖ Provinsi: “Peningkatan ketentraman dan ketertiban” ❖ Kab. Kediri “Peningkatan ketentraman dan ketertiban”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ▪ Program Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup ▪ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ▪ Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam ▪ Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 	8. Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4	Dinas Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) ▪ Program Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup 	9. Angka luasan RTH KP Publik terbangun di wilayah Perkotaan	9.602	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya ▪ Program penyediaan dan pengelolaan air baku ▪ Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya ▪ Program pengelolaan sungai dan sumber air irigasi ▪ Program pembangunan sistem informasi/database sumber daya air 	10. Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	80,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pembangunan dan pengembangan penyediaan air minum ▪ Program pembangunan saluran drainase 			DPKP
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ▪ Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ▪ Program Pendidikan 	2) Persentase penanganan konflik berlatar belakang beragama	100	Bakesbangpol

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
		Politik Masyarakat			
		▪ Program Penunjang Pemilihan Umum			
		▪ Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah	3) Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	94,46	Sekretariat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan • Program pemberantasan barang kena cukai ilegal • Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ▪ Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 	4) Persentase Penegakan Perda	100	Satpol PP



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 digunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun kerangka anggaran, yang dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Rencana program dan kegiatan yang diusulkan, telah dilaksanakan melalui serangkaian proses perencanaan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program dan kegiatan tahun 2020. Dan dilaksanakan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021.

Program dan kegiatan RKPD Tahun 2020 harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah maupun Perangkat Daerah dengan masyarakat pada umumnya melalui rapat koordinasi, forum perencanaan, maupun penjaringan aspirasi masyarakat. Rencana penganggaran Tahun 2020 merupakan total kebutuhan dana dari masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran dokumen RKPD ini.



KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama 2016 - 2018 dan target 2019 - 2020 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2018 dan
Target 2019 - 2020

No	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus konflik berlatar belakang agama	0	0	0	0	0
2.	Nilai Pola Pangan Harapan	87,9	88,4	88,9	89,4	89,9
3.	Angka kemiskinan	12,67	12,44	12,21	11,98	11,75
4.	Angka rata-rata lama sekolah	7,68	8,08	8,10	8,15	8,29
5.	Angka harapan lama sekolah	12,48	13,07	13,11	13,21	13,43
6.	Angka usia harapan hidup	72,23	72,32	72,41	72,50	72,59
7.	PDRB per kapita (juta rupiah)	16,24	16,98	17,86	18,84	19,92
8.	PDRB ADHB (juta rupiah)	33.317.802 ,45	36.409.162,64	39.753.613,02	43.672.386,12	48.200.267,02
9.	Persentase koperasi sehat	87,10	87,20	87,30	87,40	87,50
10.	Persentase nilai investasi	3	3	3	3	3
11.	Persentase kesertaan KB aktif	72	72,10	72,20	72,30	72,40
12.	Indeks Reformasi Birokrasi	D	D	C	C	CC
13.	Angka pertumbuhan ekonomi	5,18	4,98	5,20	5,42	5,66
14.	Nilai pemeringkatan e-government di tingkat Provinsi	2,86	3,10	3,25	3,37	3,48
15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50	53	56	59	62
16.	TPT	5,10	5	4,90	4,83	4,75

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Target capaian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Kediri

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian			Target	
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1	PDRB ADHB (juta rupiah)	33.317.802,45	36.409.162,64	39.753.613,02	43.672.386,12	48.200.267,02
1.2	PDRB per kapita (juta rupiah)	16,24	16,98	17,86	18,84	19,92
1.3	Angka Kemiskinan	12,64	12,39	12,14	11,90	11,66
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	7,68	8,08	8,10	8,15	8,29
1.2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,48	13,07	13,11	13,21	13,43
1.3	Angka Partisipasi Kasar					
	- SD/MI	109,69	109,69	109,72	109,80	109,85
	- SMP/MTs	99,68	99,68	99,70	99,73	99,80
1.4	Angka Partisipasi Murni					
	- SD/MI	99,81	99,83	99,85	99,90	99,93
	- SMP/MTs	78,34	78,40	78,50	78,75	80
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	72,23	72,32	72,41	72,50	72,59

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian			Target	
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar						
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini :					
1.1.1	APK PAUD	98,38	98,40	98,45	98,50	98,65
1.2	Angka Kelulusan (AL)					
1.2.1	AL SD/MI	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80
1.2.2	AL SMP/MTs	99,78	99,78	99,80	99,85	99,87
2	Kesehatan					
2.1	Angka Kematian Ibu	68,79	65,36	61,87	58,30	58,30
2.2	Angka Kematian Bayi	7,61	7,68	7,42	7,29	7,08
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Persentase jalan dengan kondisi baik	86	89	90,5	92,5	93
3.2	Persentase jembatan kabupaten dengan kondisi baik	77,85	79	83	84,5	86
3.3	Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	77	77,5	78,25	79,25	80,50
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	54	65	75	85	90
4.2	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	100,00	75	50	30	20

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian			Target	
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					
5.1	Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100
5.2	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	84	86	88	90	90
6	Sosial					
6.1	Persentase jumlah PMKS yang ditangani	20,61	21,12	21,64	22,18	22,73
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar					
1	Tenaga Kerja					
1.1	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	50	51	52	53	54
1.2	Persentase kepatuhan perusahaan terhadap norma Jamsostek	87	88	88	88	89
1.3	% Peningkatan Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jamsostek	20,3	20,3	100	100	100
2.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
2.1	Persentase kasus KDRT yang ditangani	80	80	85	90	95
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	74,09	74,19	74,24	74,29	72,34
3.	Pangan					
3.1	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	134,92	136,27	137,63	139,01	140,40
4.	Lingkungan Hidup					
4.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	50	53	56	59	62
4.2	Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan	2	2	3	3	4

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian			Target	
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.3	Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	8.402	8.702	9.002	9.302	9.602
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
5.1	Persentase BUMDes	12,54	41,69	70,84	100	100
5.2	Presentase BUMDes yang aktif	1,7	4,6	6,9	9,3	11,6
5.3	Jumlah desa tertinggal	113	108	103	98	93
6.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
6.1	CBR	16,52	16,18	15,58	15,51	15,18
6.2	Persentase Kesertaan KB MKJP	29,60	29,60	29,62	29,70	29,75
6.3	Prevalensi peserta KB aktif	71,09	71,37	71,66	71,94	72,22
7	Perhubungan					
7.1	Persentase ketersediaan rambu lalu lintas lain	67,52	70	75	75,5	76
7.2	Persentase transportasi umum yang laik fungsi	84,98	85	90	91,5	92,5
7.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	74,62	75	75,50	76	76,50
7.4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	82,50	84,09	86,99	87,46	88,11
8.	Komunikasi dan Informatika					
8.1	Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi	66	70	73	82	91
8.2	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	2	3	3	4	4
9.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian			Target	
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.1	Persentase koperasi sehat	87,10	87,20	87,30	87,40	87,50
9.2	Presentasi Koperasi Aktif	68,25	69	69,50	70	70,50
9.3	Persentase pertumbuhan usaha mikro	1,03	1,58	2,03	2,48	2,93
10.	Penanaman Modal					
10.1	Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah)	460,085883	473,888460	488,105114	502,748267	517,830715
11.	Kebudayaan					
11.1	Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	40	42,50	45	47,50	50
12.	Kearsipan					
12.1	Persentase OPD yang menerapkan sistem karsipan sesuai standar	21,43	38,57	61,43	81,43	94,28
	Urusan Pemerintahan Pilihan					
1.	Kelautan dan Perikanan					
1.1	Persentase peningkatan produksi perikanan					
	- Kolam	0,81	4,12	12,01	16,05	5,49
	- Perairan umum	4,97	4	5	4	5
2.	Pariwisata					
2.1	Jumlah kunjungan wisata yang tercatat	1.490.866	1.723.892	1.959.964	2.198.352	2.438.611
3.	Pertanian					
3.1	Nilai produksi bahan pangan utama	815.421	816.450	819.000	822.200	824.500
3.2	Nilai produksi perkebunan	238.158	238.163	238.170	239.270	239.380

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian			Target	
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.3	Persentase peningkatan produksi peternakan					
	- Daging	14,77	1,04	0,68	0,78	0,65
	- Telur	47,29	0,85	0,87	0,90	0,92
	- Susu	33,16	4	4	4	4
4.	Perdagangan					
4.1	Nilai ekspor daerah (ribu US \$)	19.000	21.000	23.000	24.000	25.000
5.	Perindustrian					
5.1	Jumlah IKM yang berdaya	315	350	385	420	455
5.2	Angka pertumbuhan industri	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; Perencanaan; Keuangan; Penelitian dan Pengembangan					
1.	Sekretariat Daerah					
1.1	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	89	90,34	91,69	93,07	94,46
1.2	Persentase penanganan fluktuasi harga	100	100	100	100	100
1.3	Nilai SAKIP	CC	B	B	BB	BB
1.4	Hasil nilai IKM	82	82	84	85	85
1.5	Persentase OPD Pelayanan yang mendapat nilai IKM kriteria baik	75	80	80	90	90
1.6	Persentase tingkat penyerapan anggaran OPD di atas 80%	80,27	81,55	82	83	84
1.7	Persentase penyelesaian produk hukum	80	80	85	90	95

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian			Target	
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.8	Jumlah Perjanjian kerjasama hasil tindak lanjut dari kesepakatan bersama	8	9	10	11	12
2.	Sekretariat DPRD					
2.1	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklajuti	85	85	90	70	90
2.2	Persentase Perda yang disetujui bersama	80	80	80	80	75
3.	Fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
3.1	Persentase pejabat struktural yang telah diklatPIM sesuai jenjangnya	67,52	72,63	77,75	82,86	87,98
3.2	Persentase ASN yang mendapat penilaian prestasi kerja minimal baik	90	91	92	93	94
3.3	Indeks profesionalitas ASN	76	78	80	82	84
4.	Fungsi penunjang Keuangan					
4.1	Persentase peningkatan PAD	-1,05	-2,07	5,17	5,29	5,04
5.	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan					
5.1	Jumlah dokumen Penguatan Sistem Inovasi Daerah	1	1	1	1	1
6.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik					
6.1	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama	100	100	100	100	100
7.	Sub urusan Bencana					
7.1	Jumlah desa tangguh bencana	-	2	4	6	8
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Kemampuan Ekonomi					
1.1	Persentase nilai investasi	3	3	3	3	3

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian			Target	
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Fasilitas wilayah/infrastruktur					
2.1	Presentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik	86	88	90	92	94
2.2	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	54	65	75	85	90
3.	Iklim Berinvestasi					
3.1	Jumlah desa tertinggal	113	108	103	98	93
4.	Sumber Daya Manusia					
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,1	5	4,9	4,83	4,75

VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju yang mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2020 disusun melalui mekanisme/tahapan yang dimulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan, forum PD dan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah berdasarkan analisa kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang pendanaannya selain melalui APBD, juga diusulkan untuk dapat didanai dari APBD Provinsi maupun APBN, baik melalui DAK, Bantuan Keuangan serta sumber dana lainnya.

RKPD berfungsi sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dijadikan pedoman dalam menyempurnakan rancangan Renja PD di Kabupaten Kediri. Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RKPD ini akan dapat terlaksana lebih efektif sesuai sasaran dan tujuan yang diharapkan, apabila didukung oleh keterlibatan semua pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Untuk itu, peran nyata segenap elemen masyarakat sangat diharapkan dalam mendukung dan bekerja secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kediri melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN KESRA

